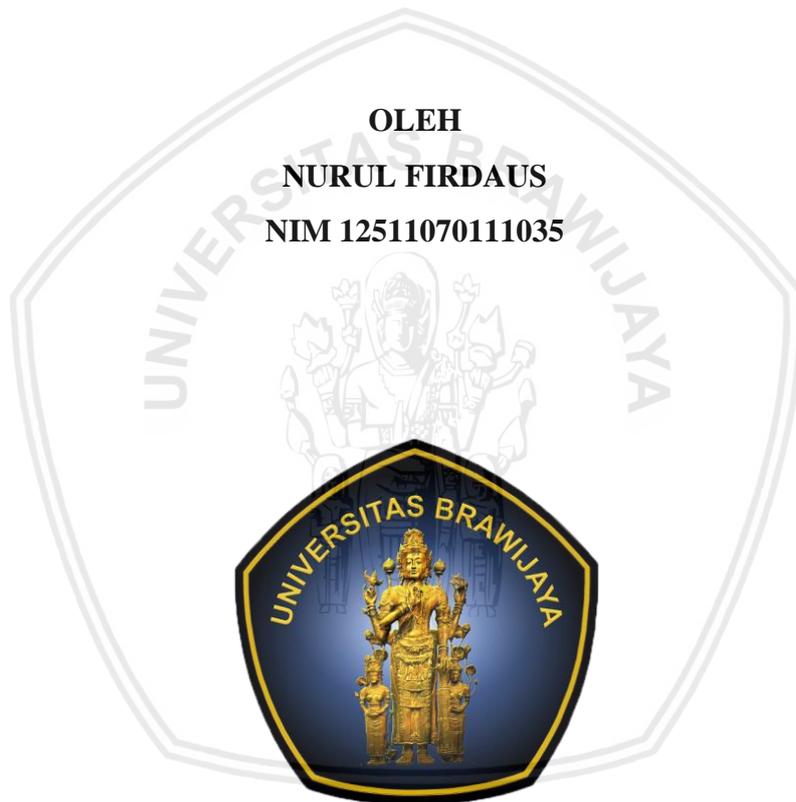


**SEJARAH HEGEMONI ORDE BARU DALAM NOVEL
KALATIDHA KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA**

SKRIPSI

**OLEH
NURUL FIRDAUS
NIM 12511070111035**



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2019

**SEJARAH HEGEMONI ORDE BARU DALAM NOVEL *KALATIDHA*
KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

**OLEH
NURUL FIRDAUS
NIM 125110700111035**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nurul Firdaus

NIM : 125110700111035

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan.

Malang, 11 Juli 2019



(Nurul Firdaus)
NIM 125110700111035

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Nurul Firdaus telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 11 Juli 2019

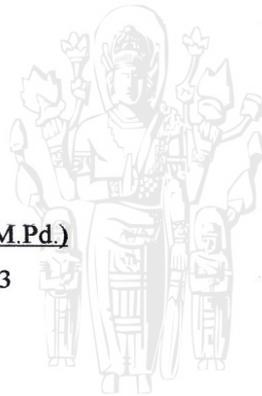
Pembimbing



(Nanang Bustanul Fauzi, S.S., M.Pd.)

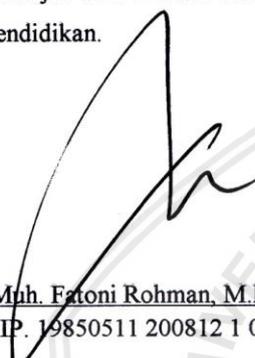
NIP. 19850511 1 200812 1 003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Nurul Firdaus telah disetujui oleh Dewan Penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.



(Mh. Fatoni Rohman, M.Pd.) Ketua Dewan Penguji
NIP. 19850511 200812 1 003



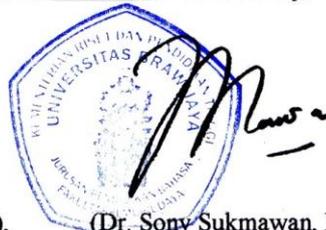
(Nanang Bustanul Fauzi, S.S, M.Pd.) Anggota Dewan Penguji
NIP. 19810509 200812 1 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Menyetujui,
Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa
Fakultas Ilmu Budaya



(Nanang Bustanul Fauzi, S.S, M.Pd.)
NIP. 19850511 200812 1 003



(Dr. Sony Sukmawan, M.Pd.)
NIP. 19770719 200604 1 001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat yang telah diberikan, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Skripsi ini berjudul “Sejarah Hegemoni Orde Baru dalam novel Kalatidha Karya Seno Gumira Ajidarma”. Skripsi ini diajukan kepada Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan kajian analisis karya sastra. Penelitian ini membahas tentang Instrumen-instrumen yang digunakan oleh Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaannya pasca peristiwa G30S.

Hasil penelitian ini adalah adanya legitimasi melalui bahasa, hukum, moral, simbol yang dipergunakan oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan. Instrumen-instrumen yang digunakan oleh Orde Baru digambarkan oleh Seno Gumira Ajidarma melalui tokoh aku yang mengalami pengalaman-pengalaman mengerikan, peristiwa pencidukan, klipng koran milik kakaknya, dan gadis kembar yang mengalami pembakaran rumah. Pemaparan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai sejarah Indonesia serta kondisi sosial politik pada waktu itu.

Skripsi ini dapat dikerjakan dengan baik atas bantuan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa sebagai berikut.

1. Ayah Joko Herlambang, Ibu Eny Uriandari, dan Adik Muhammad Nuur Habib serta seluruh keluarga besar yang tak hentinya memberikan doa, dukungan moral, dan material dalam setiap langkah menuju keberhasilan peneliti.
2. Bapak Nanang Bustanul Fauzi sebagai pembimbing yang dengan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan, serta saran dan masukan dalam proses hingga penyelesaian skripsi ini.

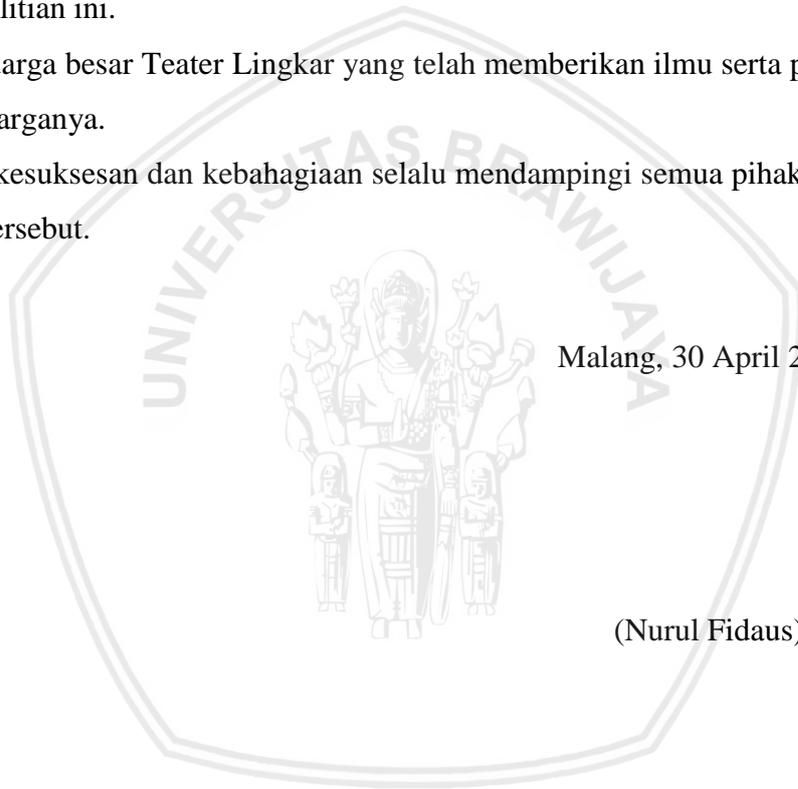


3. Bapak Muh. Fatoni Rohman sebagai penguji yang dengan sabar dan teliti dalam menguji, membimbing, mengoreksi kesalahan, dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
4. Bagi seluruh dosen Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
5. Sahabat seperjuangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2012 yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Keluarga besar Teater Lingkar yang telah memberikan ilmu serta pengalaman berharganya.

Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu mendampingi semua pihak yang telah berjasa tersebut.

Malang, 30 April 2019

(Nurul Fidaus)



ABSTRAK

Firdaus, Nurul. 2019. **Sejarah Hegemoni Orde Baru dalam Novel Kalatidha Karya Seno Gumira Ajidarma**. Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Nanang Bustanul Fauzi, S.S., M.Pd.

Kata Kunci: Hegemoni Orde Baru, Supratruktur Ideologis.

Novel Kalatidha merupakan Novel Karya Seno Gumira Ajidarma yang merekam peristiwa pasca-1965 serta hegemoni negara Orde Baru. Hegemoni merupakan kepemimpinan secara intelektual moral. Tokoh aku mengalami peristiwa-peristiwa mengerikan selama pencidukan, cerita tentang pembunuhan massal, dan cerita keluarga para tapol. Penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah; Instrumen-instrumen apa saja yang digunakan/dipakai oleh rezim Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaan yang terdapat dalam Novel Kalatidha karya Seno Gumira Ajidarma?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan instrumen yang digunakan oleh Orde Baru untuk menghegemoni. Penelitian deskriptif secara tekstual digunakan karena penelitian ini menganalisis novel Kalatidha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Orde baru menggunakan beberapa “suprastruktur ideologis” sebagai instrumen untuk melangsungkan hegemoninya. Instrumen-instrumen tersebut antara lain, bahasa, hukum, moral, dan simbol. Hegemoni dalam bahasa meliputi adanya (1) Penggunaan eufimisme, (2) Penghapusan ingatan melalui Ejaan, (3) Wacana Anti-Komunisme. Hegemoni dalam hukum dengan adanya (1) KOPKAMTIB, (2) UU 5/1969, (3) Tap MPRS XXV tahun 1966, (4) SUPERSEMAR. Hegemoni moral meliputi (1) Moral Perorangan, (2) Moral Keluarga, (3) Moral Masyarakat. Hegemoni melalui simbol meliputi (1) Semua hal yang berkaitan dengan PKI dianggap haram, (2) Pengkultusan, (3) Legitimasi melalui Monumen, (4) Legitimasi melalui sekolah.

ABSTRACT

Firdaus, Nurul. 2019. **The History of Orde Baru's Hegemony in Novel Kalatidha Written by Seno Gumira Ajidarma**. Education of Indonesian Language and Literature Study Program, Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Nanang Bustanul Fauzi, S.S., M.Pd.
Kata Kunci: *Orde Baru* Hegemony, Ideology Suprastructure.

Novel Kalatidha is a novel written by Seno Gumira Ajidarma that is telling about the event after-1965 and also the hegemony of the Indonesian country in Soeharto era (*orde baru*). Hegemony is the leading action by the way of controlling moral intellectual. The *aku* character live during the events of abduction, mass murder, and the stories from the family of *tapol*. This research tried to answer a problem; What instruments that were used by the government of *Orde Baru* to legitimate their reign, found in Novel Kalatidha written by Seno Gumira Ajidarma?

This research used descriptive qualitative approach to describe the instruments that were used by the government of Orde Baru to do the hegemony. Descriptive research is textually used in this research since the author did the analysis to Kalathida novel.

The result of this study showed that the government of *Orde Baru* used some few 'ideology suprastructures' as the instrument to do their hegemony. Those are, language, law, moral, and symbol. Hegemony in language are (1) the using of eufimisme, (2) Removing memories from orthography, (3) Anti-Communism concept, Hegemony in law (1) KOBKAMTIB, (2) UU 5/1969 (3) Tap MPR XXV 1996, (4) SUPERSEMAR. Hegemony in moral are (1) individual moral, (2) family moral (3) Mass moral. Hegemony in symbols are (1) anything interelated with PKI would be called haram (2) cult, (3) legitimation through monument, (4) legitimation through schools.

DAFTAR ISI

HALAMAN KOVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6 Definisi Istilah Kunci	8
BAB II	9
KAJIAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Hegemoni	12
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Data dan Sumber Data	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
3.4 Teknik Analisis Data	17
3.5 Keabsahan Data	21
BAB IV	23

PEMBAHASAN	23
4.1 Bahasa Sebagai Legitimasi Kekuasaan	23
4.1.1 Eufimisme Bahasa	23
4.1.2 Penghapusan Ingatan melalui Perubahan Ejaan	26
4.1.3 Wacana Anti-Komunisme	28
4.2 Hukum Sebagai Legitimasi Kekuasaan	36
4.2.1 Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) sebagai Rantai Komando Pembunuhan Massal.....	36
4.2.2 Undang-Undang No. 5/1969 (Penahanan Tanpa Jangka Waktu yang Ditentukan).....	44
4.2.3 TAP MPRS XXV Tahun 1966 (Pembubaran Partai dan Pelarangan Marxisme-Leninisme)	49
4.2.4 SUPERSEMAR (Pembersihan Menteri-menteri Soekarno)	54
4.3 Legitimasi Kekuasaan Melalui Moral	59
4.3.1 Moral perorangan	60
4.3.2 Moral Keluarga	61
4.3.3 Moral Masyarakat	66
4.4 Simbol Sebagai Legitimasi Kekuasaan	68
4.4.1 Segala yang Berhubungan dengan PKI Haram	68
4.4.2 Pengkultusan	72
4.4.3 Legitimasi Melalui Monumen	74
4.4.4 Legitimasi Melalui Sekolah	75
BAB V	78
PENUTUP	78
5.1 Simpulan.....	78
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	96



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penyajian data dan Pemberian Kode Data Hegemoni.....18



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan beberapa subbab berupa (1) latar belakang penelitian, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) ruang lingkup penelitian, dan (6) definisi istilah kunci.

1.1 Latar Belakang

Menurut Plato, sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan (*mimesis*) yang ada dalam dunia ide (Ratna, 2014, hal.4). Filsafat ide Plato yang semata-mata bersifat praktis ditolak oleh Aristoteles. Menurutnya, seni justru mengangkat jiwa manusia, yaitu melalui proses penyucian (*katharsis*), sebab karya seni membebaskan dari nafsu yang rendah. Dalam memahami kenyataan, seni didominasi oleh penafsiran. Karena itu, seniman tidak semata-mata meniru kenyataan, tetapi menciptakan dunianya sendiri. (Ratna, 2014, hal.5)

Teori tersebut dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Hubungan sastra dan sosial dikaji lebih lanjut pada Sosiologi Sastra. Sosiologi Sastra merupakan interdisiplin ilmu antara Sosiologi dan Sastra yang mengaitkan sastra dengan lingkungan terbentuknya karya sastra. Sosiologi sastra muncul karena kejenuhan akibat banyaknya kajian-kajian yang hanya membahas tentang struktur. Paradigma mutakhir ditunjukkan melalui konsepi-konsepsi yang timbul sesudah strukturalisme klasik mengalami stagnasi, yang diawali oleh strukturalime genetik, semiotika, resepsi, dan interteks (Ratna, 2013, hal.6). Dengan

mempertibangkan aspek-aspek kemasyarakatannya sosiologi sastra juga disebut sosio kritik sastra (Ratna, 2013, hal.7)

Tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan. Sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai hasil interaksi pengarang dengan masyarakat, sebagai kesadaran politik, sedangkan psikologi sastra memandang sastra sebagai rekaman keistimewaan individu. (Ratna, 2013, hal.11-13).

Mengenai hubungan sastra dengan sosial, Seno Gumira Adjidarma (SGA) muncul dengan karya yang konsisten. Misalnya pada “Saksi Mata,” merupakan kumpulan cerpen tentang Timor Timur atau pada “Penembak Misterius”, dan “Mengapa Kau Culik Anak Kami?” yang bercerita tentang kekerasan Rezim Orde Baru.

SGA adalah pelopor jurnalisme sastra. Lewat bukunya *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara*, SGA berpendapat bahwa ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Fakta-fakta bisa diembargo, dimanipulasi, atau ditutup dengan tinta hitam, tapi kebenaran muncul dengan sendirinya, seperti kenyataan (Ajidarma,1997, hal.1).

SGA berpendapat bahwa buku sastra bisa dibredel, tapi kebenaran dan kesusastraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan tertahankan. Menutupi fakta adalah tindakan politik, menutupi kebenaran adalah tindakan paling bodoh yang bisa dilakukan manusia di muka bumi. (Ajidarma,1997, hal.1-2). Kebenaran

dalam kesusatraan adalah sebuah perlawanan bagi historisisme, sejarah yang hanya diciptakan bagi pembenaran kekuasaan. (Ajidarma,1997, hal.8)

SGA salah satu sastrawan sangat piawai dalam meramu antara cerita politik (fakta) dengan fiksi yang indah. SGA juga dikenal dengan gaya kepenulisan fragmentasi. SGA telah menulis puluhan cerpen yang dimuat di beberapa media massa. Karyanya yang berjudul “Pelajaran Mengarang” menjadi cerpen terbaik Kompas 1993. Buku kumpulan cerpennya antara lain: Manusia Kamar (1988), Penembak Misterius (1993), Saksi Mata (1994), Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi (1995), Sebuah Pertanyaan Untuk Cinta (1996), Iblis Tidak Pernah Mati (1999), Senja dan Cinta Yang Berdarah (2014). Karya lain berupa novel Matinya Seorang Penari Telanjang (2000), Nagabumi, dan lain-lain.

Novel Kalatidha merupakan novel yang unik, tidak seperti yang disajikan oleh novel-novel yang lainnya. Nampaknya SGA memberikan suatu tawaran terhadap Novel Indonesia, salah satunya adalah menampilkan potongan-potongan koran/kliping sebagai sarana pendukung penceritaan. Kemunculan kliping koran berperan sebagai pengganti dialog tokoh kakak aku yang dalam cerita telah hilang dalam gelombang pencidukan 1965-1966. Selain potongan koran juga terdapat gambar dalam novel tersebut. Bahkan juga potongan lirik lagu. Kemudian ditampilkan kembali pada bagian lampiran sebagai penjelasan sehingga menimbulkan kesan ilmiah. Selanjutnya, Segi alur yang meloncat-loncat yang akan sedikit membuat bingung pembaca.

Novel Kalatidha karya SGA mengambil setting perlihatkan Orde Lama ke zaman Orde Baru (Orba) sampai sekitar tahun sembilanpuluhan. Merekam

peristiwa terjadinya pencidukan, pembunuhan, penahan, terhadap orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Karya SGA ini dibumbui dengan gaya cerita yang surealis, seorang wanita gila korban kebakaran rumah yang dirasuki saudara kembarnya melakukan balas dendam (perlawanan) terhadap pelaku pembakaran rumah anggota organisasi terlarang (PKI). Tokoh aku menjadi saksi atas pencidukan, pembunuhan, pembakaran, terhadap anggota organisasi terlarang (PKI). Karena memiliki ikatan dan pengalaman mengenai kejadian pencidukan, tokoh aku bertemu dan mendapat pengakuan-pengakuan mengerikan dari para tapol.

Semasa kecil ia mengalami pengalaman-pengalaman yang mengerikan tentang pencidukan, dan merasa ingin tahu tentang apa yang dimaksud PKI. Sebagai kaki tangan pembobol bank yang tertangkap, tokoh aku menghabiskan waktu di tahanan dengan membaca klipng koran milik kakaknya yang juga hilang dalam gelombang pencidukan pada masa itu. Tokoh aku sadar bahwa apa yang mereka pelajari sebagai pelajaran sejarah ternyata hanya sebuah pelajaran berbohong.

Orde baru menjalankan hegemoni untuk tetap mempertahankan posisinya. Pembentukan ideologi anti-komunisme hingga pembubaran organisasi juga merupakan strategi untuk melanggengkan hegemoni tersebut. Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, folklor agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan karya sastra (Herlambang,2013,

hal.5). G30S menjadi sebuah momentum dalam melakukan hegemoni tersebut. Selain itu munculnya “Normalisasi” kekerasan 1965-1966 yang meligitimasi tindakan yang dilakukan atas nama negara. Selain itu, dalam melakukan hegemoninya Orde Baru menggunakan tindakan represif. Serta dalam praktek hegemoninya, munculah propaganda dan pertarungan ideologi melalui media (terutama koran).

Negara merupakan realitas politik yang diterima secara tidak sadar berada di luar kesadaran manusia sebagai sesuatu yang seolah-olah dari dulu sudah ada atau semacam kodrat. Menurut Patria dan Arief (1999, hal.1) bahwa dalam kesadaran individual, negara baru dirasakan kehadirannya manakala ia berbenturan dengan kekuasaan. Jadi terdapat realitas di luar diri individu yang beroperasi dalam ranah publik, tetapi berpengaruh terhadap kehidupan individu tersebut, sehingga realitas tersebut menurut prespektif politik dan legitimasi merupakan realitas kekuasaan negara dalam masyarakat.

Kekuasaan mengenai negara telah dibahas sejak zaman kuno. Pada masa Plato dan Aristoteles, bahwa negara membutuhkan kekuasaan secara penuh untuk mengatur dan medidik warganya dengan nilai-nilai moral dan rasional. Pada zaman pertengahan, ide tersebut mengalami perkembangan bahwa negara dianggap sebagai wakil gereja dan gereja merupakan wakil tuhan untuk menegakan moral di dunia, lingkup kekuasaan berada pada teologis gereja. Ini lantas menjadi legitimasi kekuasaan mutlak dari negara (Budiman dalam Arief, 1999, hal.2). Pada abad *Renaissance*, terjadi proses sekulerisasi yang memisahkan gereja dan negara. Munculah beberapa filsuf yang melakukan kritik terhadap

kekuasaan negara pada abad pertengahan. Mereka menawarkan konsep negara liberalisme sebagai gaya berpikir *Rainissance* yang mengagungkan otonomi manusia. Negara dalam konsep ini menjamin otonomi manusia dari kekuasaan diluar dirinya. Sedangkan Marx menolak pandangan ini bahwa negara merupakan kesepakatan dari seluruh masyarakat. Ia menyuguhkan formulasinya tentang masyarakat kapitalis sebagai suatu masyarakat kelas, yang didominasi oleh borjuis , karena negara merupakan ekspresi politik dari kelas dominan.

Hegemoni merupakan teori yang dikembangkan oleh filsuf yang berasal dari Itali yakni Antonio Gramsci atas pengembangan dari pemikiran Marx. Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut 'eugemonia' yang diterapkan untuk menunjukan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (polis atau *citystates*) secara individual. Misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang sejajar. (Hendarto dalam Arief, 1999, hal.115). Hegemoni menurut Gramsci merujuk pada pengertian tentang situasi-politik, dalam terminologinya disebut 'momen' dimana filsafat dan prkatek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang: dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan maniefetasi perorangan. (Arief, 1999, hal.12). Kekuasaan (hegemoni) menurut Gramsci mengalir ke bawah mengarah pada perjuangan kaum tertindas untuk menentang sumber kekuasaan tunggal (Ratna, 2010, hal.179).

Atas dasar pemikiran Marx tersebut bagi gramsci, klas sosial akan memperoleh keunggulan (supermasi) melalui dua cara yaitu dominasi (*dominio*) atau paksaan (*coerciono*) dan yang kedua adalah melalui kepemimpinan

intelektual dan moral. Selain itu hegemoni kelas berkuasa terhadap kelas dikuasai, sesungguhnya juga dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. (Arief, 1999, hal.125).

Relevansi fakta sosial dalam novel dengan teori hegemoni menjadi dasar penelitian ini. Selain itu, realitas sosial dalam novel sebagai representasi pergolakan politik pada zaman Orde Baru juga menjadi alasan penelitian. Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena untuk melihat bagaimana hegemoni Orde Baru dibangun. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul Sejarah Hegemoni Orde Baru dalam novel Kalathida.

1.2 Rumusan Masalah

Instrumen-instrumen apa saja yang digunakan oleh rezim Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaan yang terdapat dalam Novel Kalatidha karya Seno Gumira Adjidarma?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui instrumen-instrumen yang digunakan oleh rezim Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaan yang terdapat dalam Novel Kalatidha karya Seno Gumira Adjidarma.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teori yang diperoleh penelitian ini adalah memberikan sumbangan ilmu kajian untuk perkembangan teori sastra, khususnya bidang sosiologi sastra serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya di Program Pendidikan Bahasas dan Sastra Indonesia Universitas Brawijaya. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan meningkatkan apresiasi pembaca terhadap karya sastra dari berbagai genre. Serta sebagai sumbangan pada kepustakaan studi sastra.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada hegemoni orde baru yang terdapat dalam novel *Kalatidha*. Hegemoni meliputi Hegemoni Negara kepada Organisasi-organisasi (dianggap musuh) melalui suprastruktur ideologis (budaya, moral, filsafat, hukum, agama, estetika, dll). Hegemoni yang dilakukan oleh Orde Baru menjadi latar cerita dalam Novel ini.

1.6 Definisi Istilah Kunci

Hegemoni adalah kepemimpinan secara intelektual dan moral kepada golongan tertentu (musuh). Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut 'eugemonia' yang diterapkan untuk menunjukkan dominansi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (polis atau citystates) secara individual. Misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang seajar. (Hendarto dalam Arief, 1999 hal.115).

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab II kajian pustaka akan dipaparkan beberapa subbab berupa (1) landasan teori yang meliputi teori hegemoni, (2) penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama berjudul *Hegemoni Mitos Nyai Roro Kidul Terhadap Kekuasaan Jawa Dalam Novel Sang Nyai Karya Budi Sardjono* oleh HERNING Puspitarini mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hegemoni mitos Nyai Roro Kidul terhadap kekuasaan Jawa serta menjelaskan perlawanan terhadap hegemoni mitos Nyai Roro Kidul dalam novel *Sang Nyai* karya Budi Sardjono. Penelitian ini dikaji menggunakan teori Sosiologi Sastra Hegemoni Gramsci dan teori struktural. Pada Penelitian ini, ditemukan bentuk-bentuk hegemoni berupa, (1) Sang Nyai Sebagai Ratu; (2) Sang Nyai Mendukung Eksistensi Raja; (3) Sang Nyai Sebagai Penguasa Kosmis; (4) Sang Nyai dalam Tradisi. Akibat dari hegemoni mitos Nyai Roro Kidul dengan ideologi tradisional tersebut, maka terjadi perlawanan dari tokoh dengan ideologi modern yang rasional terhadap hegemoni yang ada. Namun, perlawanan tersebut kalah dengan ideologi tradisional masyarakat Jawa yang terdapat dalam novel *Sang Nyai* karya Budi Sardjono.

Penelitian kedua berjudul *Hegemoni kekuasaan dalam novel bibir merah Karya achmad munif* oleh Shalikhatin Pawestri mahasiswa Universitas Negeri

Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Formasi Ideologi, Kekuasaan yang beroperasi, dan elemen fiksi yang digunakan untuk mempresentasikan hegemoni dalam novel *kekuasaan dalam novel bibir merah Karya achmad munif*. Penelitian ini dikaji menggunakan teori Hegemoni Gramsci. Pada penelitian ini ditemukan (1) Formasi Ideologi (2) Hegemoni kekuasaan yang beroperasi (3) Elemen fiksi yang digunakan untuk mempresentasikan hegemoni kekuasaan. Formasi Ideologi yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain, Otoritarianisme, Feodalisme, Kapitalisme, Sosialisme, dan Vandalisme. Akibat dari Pertarungan ideologi ini munculah konflik. Kemudian, Hegemoni yang beroperasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua wilayah, sesuai dengan teori Gramsci yang membagi masyarakat menjadi dua yakni masyarakat politik dan Masyarakat sipil. Masyarakat sipil menjadi korban masyarakat kelas atas yakni masyarakat politik. Akibat Hegemoni dari kelas berkuasa, terjadi perlawanan kelas bawah beserta sekutu untuk menjatuhkan kekuasaan kelas atas. Sedangkan elemen fiksi yang digunakan untuk mempresentasikan hegemoni kekuasaan antara lain, Tema, Tokoh, Latar atau Setting, dan Alur.

Penelitian ketiga berjudul *Kritik Sosial Dalam Novel Kalatidha Karya Seno Gumira Ajidarma: Tinjauan Sosiologi Sastra* oleh Bayu adhie biantoro mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur yang membangun dalam novel Kalatidha dan mendeskripsikan kritik sosial dalam novel Kalatidha karya Seno Gumira Ajidarma. Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan sosiologi sastra yaitu pendekatan tentang hubungan karya sastra dengan kehidupan sosial masyarakat.

Pada penelitian ini ditemukan struktur pembentuk karya (1) Kritik Terhadap Pemerintah Orde Baru; (2) Kritik Terhadap Masyarakat Indonesia (3) Implementasi Kritik Sosial dalam Novel Kalatidha Karya Seno Gimira Ajidarma. Kritik terhadap Orde Baru antara lain, Kritik terhadap kebebasan berpendapat, kritik untuk para pejabat yang melakukan korupsi, kritik terhadap Soeharto mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya, kritik terhadap konsep yang dibangun Orde Baru terhadap pembasmian PKI, kritik terhadap pencidukan yang dilakukan kepada orang yang tidak bersalah serta kritik terhadap pelaku pencidukan yang melakukan kekejaman, kritik kepada pelaku pencidukan kepada orang yang belum tentu bersalah dengan cara represif, kritik dalam hal memanipulasi sejarah tentang kejadian G30S pada tahun 1965. Kritik terhadap masyarakat Indonesia, meliputi kritik kepada priayi yang merasa derajatnya lebih tinggi, kritik terhadap manusia yang melakukan penindasan, kritik untuk masyarakat di kota-kota besar yang konsumtif, kritik terhadap manusia yang menilai dari penampilan luar, kritik terhadap media massa yang seringkali digunakan untuk keuntungan pribadi.

Penelitian Pertama memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni menggunakan teori yang sama yakni Hegemoni Gramsci, tetapi berbeda objek kajian dengan tujuan penelitian untuk menemukan bentuk hegemoni dan perlawanan yang muncul. Penelitian kedua yakni menggunakan teori yang sama pula yakni Hegemoni Gramsci, tetapi berbeda objek kajian untuk menemukan formasi Ideologi, bentuk hegemoni, serta perlawanan yang muncul. Sedangkan, penelitian ketiga menggunakan objek kajian yang sama terhadap

penelitian yang akan dilakukan, yakni Novel *Kalatidha* karya Seno Gumira Adjidarma. Penelitian ketiga ini menggunakan pendekatan yang sama yakni sosiologi sastra, hal yang dikemukakan adalah kritik terhadap orde baru, dan kritik terhadap masyarakat Indonesia, beserta implementasinya sebagai media pembelajaran di kelas. Namun, berbeda dengan penelitian yang ketiga ini, yang menggunakan teori hegemoni Gramsci untuk mengetahui bentuk hegemoni serta formasi ideologi yang terdapat dalam novel *Kalatidha* karya Seno Gumira Adjidarma.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Hegemoni

Hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno '*eugemoni*', menunjukkan dominasi terhadap posisi yang diklaim negara-negara kota secara individual seperti yang dilakukan negara Athena dan Sparta, terhadap negara-negara yang sejajar lainnya. Gramsci juga mengambil pandangan Marx tentang "hegemoni" borjuis dalam masyarakat sipil seperti yang diungkapkan oleh Marx dan Engels dalam *The German Ideology*, dan mengolahnya menjadi tema inti menurut versinya tentang bekerjanya sistem kapitalis. Konsep hegemoni merupakan sumbangan Gramsci yang utama terhadap teori politik, dan bersumber pada revisinya terhadap marxisme klasik.

Supermasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara "sebagai dominasi" dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk

menghancurkan atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dilain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. (Gramsci,1976. hal.57-58)

Hegemoni merupakan kepemimpinan secara intelektual dan moral oleh kelas yang mendominasi terhadap kelas dibawahnya. Kelas yang mendominasi dalam prakteknya menggunakan suprastruktur ideologis untuk menaklukan kelas di bawahnya. Sedangkan “Suprastruktur Ideologis”-Istilah Marxis bagi pandangan moral, filsafat, hukum, agama, estetika dan lain sebagainya-berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu (Magnis-Suseno, 1992, hal.266)

Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (bellamy dalam patria, 2008, hal.121). Kapitalisme masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum ini, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan tak perlu untuk memertahankan kekuasaan. Sehingga massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya klas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara bisa terjadi.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa simbol (bahasa, seni dan pengetahuan) memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan, memelihara dan mengubah nilai-nilai moral dalam masyarakat, dan itu sebabnya menjadi ampuh: ada kekuatan besar di dalam simbol. Praktik kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan terhadap pihak lain sering kali digunakan untuk tujuan mendapatkan kepercayaan, kesetian, kewajiban; namun

paralel dengan Galtung, praktik semacam ini dapat juga diartikan sebagai proses untuk mempengaruhi pikiran masyarakat untuk melihat tindak kekerasan sebagai hal yang alamiah atau bahkan untuk tidak melihatnya sama sekali.

Sementara itu, negara hadir seolah-olah sebagai sesuatu yang *given*. Di sisi lain, negara baru disadari kemunculannya ketika bersinggungan langsung dengan kekuasaan. Ada realitas kekuasaan negara dalam masyarakat yang tidak disadari secara langsung. Menurut Marx, negara adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas, yang fungsinya secara politik meredam usaha-usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas atas. Marx menolak pandangan bahwa negara merupakan kesepakatan masyarakat. Menurut Marx, masyarakat membentuk negara, dan masyarakat dibentuk pula oleh cara produksi yang dominan dan hubungan-hubungan produksi yang ada di dalamnya. Karena itu negara merupakan ekspresi politik dari struktur kelas yang melekat dalam produksi (Arief, 2008, hal.18). Jadi, negara merupakan ekspresi politik dari kelas dominan. Teori fundamental ketiga dari Marx tentang negara adalah bahwa negara dalam masyarakat borjuis merupakan senjata represif dari kaum borjuis. (Arief, 2008, hal.30).

Kemunculan konsensus bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada ini sebagai keinginan mereka. Justru sebaliknya hal tersebut terjadi karena mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif. ”(Arief, 2015, hal.126-127). Ada dua hal yang mendasari kurangnya basis konseptual yakni pendidikan dan kelembagaan. Kurangnya pendidikan

menyebabkan tidak adanya kemungkinan berpikir kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Kelembagaan (sekolah, gereja, partai politik, media massa, dll) telah menjadi kaki tangan bagi kelompok yang berkuasa untuk menanamkan ideologi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab III metode penelitian ini, akan dipaparkan beberapa subbab berupa (1) jenis penelitian, (2) data dan sumber data, (3) teknik pengumpulan data, (4) Teknik analisis data, dan (5) keabsahan data

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.. Menurut Sutopo (2006, hal.40) menambahkan bahwa “penelitian deskripsi menekankan pada penyajian data dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya dari objek yang diteliti”. Penelitian ini untuk mendeskripsikan hegemoni orde baru yang terdapat dalam novel serta menghubungkan dengan data kepustakaan.

3.2 Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2013, hal.22) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sedangkan Lofland (dalam Moleong, 2004) menyatakan bahwa data utama dalam penelitian kualitatif ialah-kata-kata, dan tindakan, selebihnya dalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Kalatidha karya Seno Gumira Adjidarma (SGA)*. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka

Utama Jakarta, cetakan pertama Januari 2007 dengan tebal halaman 234. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dialog, kalimat yang mengandung Hegemoni dalam novel *Kalatidha*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013, hal.224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Pertama, membaca keseluruhan novel secara intensif untuk menemukan data yang memuat hegemoni orde baru. Kedua, melakukan studi pustaka untuk mendukung analisis data berupa penelitian maupun buku-buku yang membahas tentang hegemoni orde baru. Ketiga, mengklasifikasi data yang telah ditemukan. Keempat, membuat kodifikasi data hegemoni orde baru dalam novel tersebut.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Krippendorff (1986, hal.8), analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan sah datanya dengan memerhatikan konteksnya. Sedangkan menurut Eriyanto model analisis isi bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi bagaimana pesan itu disampaikan hingga bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks (2001, hal.xv).

Tabel 3.1 Penyajian data dan Pemberian Kode Data Hegemoni**Penjelasan Kode:**

Judul Novel/Hegemoni/Subaspek/data ke-n/halaman

K	: Kalatidha	HGM	: Hegemoni	
B	: Bahasa	EF	: Eufimisme	
EY	: EYD	AK	: Anti-Komunis	
H	: Hukum	KOB	: KOBKAMTIB	
UU	: UU 5/1969	TAP	: Tap MPRS XXV 1966	SS : SUPERSEMAR
M	: Moral	MP	: Moral Perorangan	
MK	: Moral Keluarga	MS	: Moral Masyarakat	
S	: Simbol	HR	: Berhubungan dengan PKI (Haram)	
PK	: Pengkultusan	MN	: Monumen	SK : Sekolah

No	Aspek	Subaspek	Indikator	Data	Kodifikasi
1	Bahasa	Eufimisme	Deskripsi/istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana bahasa yang mendapat penghalusan dari maksud aslinya	Hari-hari itu memang aku banyak mendengar kosa kata baru . mungkin lebih tepat kosa kata lama yang mendapatkan makna baru, seperti misalnya kata ciduk.	K/HGM/B/EF/ 1/20 K/HGM/B/EF/ 2/... K/HGM/B/EF/ 3/...
		Pengubahan ejaan (EYD)	Deskripsi/istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana bahasa yang menyatakan adanya dampak perubahan ejaan	Meskipun keinginanku untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa itu besar, aku tak tahan membaca cara penulisan yang buruk. Barangkali seleraiku terlanjur dibentuk oleh buku-buku bacaan yang baru kusadari belakangan ditulis dengan sangat bagus.	K/HGM/B/EY /1/153 K/HGM/B/EY /2/... K/HGM/B/EY /3/...
		Wacana Anti-Komunisme	Deskripsi/istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana bahasa untuk menarasikan keburukan Komunis	Senjata gelap masih berada ditangan Gestapu Sehubungan dengan itu Bridgen Amir Machmud menjdelaskan bahwa beberapa ratus sendjata gelap masih berada di tangan Gestapu. Tokoh tokoh mereka masih ada jang dapat menjelinap masuk dalam	K/HGM/B/AK /1/37 K/HGM/B/AK /2/... K/HGM/B/AK /3/...

				organisasi ² lain dan sementara ini mereka ini luput dari pendedjaran...	
2.	Hukum	KOBKAM TIB	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya keterlibatan KOBKAMTIB	Kemudian sangat sering kudengar cerita tentang pencidukan ini. Mereka yang sedang tidur pintu rumahnya digedor anantara pukul dua atau tiga pagi, dan begitu saja dibawa pergi entah kemana—kini aku percaya jika dikatakan mereka dibunuh, tetapi waktu itu sebagai anak kecil aku mendapat pengetahuan yang sangat terbatas mengenai apa yang terjadi. Hanya dikatakan mereka diciduk.	K/HGM/H/K OB/1/21 K/HGM/H/K OB/2/...
		UU 5/1969	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya penahan terhadap tapol G30S	Aku yang sengaja datang ke stasiun untuk menyaksikan pelepasan para tahanan politik mendatangi mereka	K/HGM/H/U U/1/61 K/HGM/H/U U/2/... K/HGM/H/U U/3/...
		TAP MPRS XXV tahun 1966	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya dampak penggunaan Tap MPRS XXV 1966	wilayah Indonesia serta pelarangan setiap kegiatan untuk menjebarkan atau mengembangkan Sidang paripurna MPRS kemaren dengan aklamai telah menerima perumusan ketetapan MPRS yang dihasilkan oleh komisi C tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan dijatakn sebagai organisasi terlarang diseluruh paham atau adjaran komunisme/Marxisme-Leninisme diseluruh wilayah Indonesia.	K/HGM/H/TA P/1/116 K/HGM/H/TA P/2/... K/HGM/H/TA P/3/...
		SUPERSEMAR	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya dampak penggunaan supersemar	Ban & J.M.D mulai sinting? Djakarta, 27 april (AB) Bekas Waperdam DR. Subandriono dan bekas Menteri Jusuf MD dan berapa bekas menteri lainja, ketjuali Ir. Surrachman dan Achadi jang belum tertangkap, telah dilakukan pemeriksaan jang teliti oleh team-pemeriksa dari ke-4 angkatan...	K/HGM/H/SS/ 1/43 K/HGM/H/SS/ 2/... K/HGM/H/SS/ 3/...
3.	Moral	Perorangan	Deskripsi /istilah	“Bohong, tentu karena	K/HGM/M/M

			/dialog/kliping koran yang menggunakan sarana Moral terhadap seseorang yang dianggap PKI	bukan orang jepang, kan? Meski tidak ada keluarganya kan boleh saja dipindah ke pemakaman umum?" "bapak tidak bohong, malah dia pesan agar dibawakan mainan. Tapi bapak nggak ngerti, mainan seperti apa yang dia mau" ..."kasihan juga pikirku"	P/1/12 K/HGM/M/M P/2/...
		Keluarga	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana Moral terhadap keluarga yang dianggap PKI	. Wajah teman-temanku sama ganasnya dengan orang-orang yang memburu orang sampai masuk kelas waktu itu. "bapakmu PKI ,ya?" "Bapakmu PKI?" "kamu PKI?" Memang sudah sering kudengar istilah PKI waktu itu. Suatu hari ada seorang anak yang tak pernah datang lagi ke sekolah dan penjelasan yang ku dengar hanyalah, "Bapaknya PKI,"Namun aku sungguh tidak tahu apa hubungan gambar palu arit itu dengan PKI.	K/HGM/M/M K/1/24 K/HGM/M/M K/2/...
		Masyarakat	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana Moral terhadap Masyarakat yang melakukan kekerasan massal	Nafasnya memburu, tubuhnya berkeringat, dan ia sudah terpojok. Orang-orang yang memburu masuk kelas membawa pentungan, golok, dan celurit.	K/HGM/M/M M/1/19 K/HGM/M/M M/2/...
4.	Simbol	Berhubungan dengan PKI (haram)	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana objek, simbol, yang berkaitan dengan PKI	Namun semenjak berlangsung pencidukan di mana-mana, sekarang kami mempunyai gambar lain; itulah simbol bergambar belati pasukan komando baret merah yang menjadi pujaan dimana-mana. Setelah beberapa bulan aku pun bosan dan suatu kali menggambar yang lain: yakni lambang palu arit	K/HGM/S/HR /1/22 K/HGM/S/HR /2/...
		Pengkultusan	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana objek, simbol, yang dikultuskan (baik/buruk)	Padahal di dalam hutan bambu itu hanya terdapat kuburan .ada dua belas kuburan di sana, sebelas kuburan tentara jepang dan satu kuburan anak kecil yang bisa diduga dari ukurannya	K/HGM/S/PK/ 1/3-4 K/HGM/S/PK/ 2/...

				yang juga kecil.	
		Monumen	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana monumen untuk melegitimasi kekuasaan	Menurut Bridgen Hartono, sumur maut tsb, kini telah dipagari dan diberi atap. Rumah2 sekitarnya, bekas tempat penjemputan djendral2 sebelum dibunuh, tetap dirawat sebagai mana adnja untuk dijadikan pengisi monumen	K/HGM/S/M N/1/41 K/HGM/S/M N/2/...
		Sekolah	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana objek, simbol, yang disampaikan melalui Sekolah	Berapa lama kami menjadi buta dalam memandang orang-orang yang diciduk? Berapa lama kami semua, anak-anak kecil yang tidak terdidik di sekolah dengan mestinya mengira berapa orang-orang yang diciduk memang pantas diciduk? Berapa lama kami semua mendapatkan pelajaran sejarah yang ternyata kini hanya bisa dibaca sebagai pelajaran cara berbohong? Aku masih saja membaca.	K/HGM/S/SK/ 1/159 K/HGM/S/SK/ 2/...

3.5 Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang absah, tepat, dan sesuai dengan rumusan masalah kajian ini, maka peneliti menggunakan langkah triangulasi. Selanjutnya mengenai triangulasi tersebut peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Mendiskusikan data dengan dosen dan teman sejawat. Diskusi tersebut dilakukan dengan cara membahas tentang pokok permasalahan yang telah dipilih. Teman sejawat yang dipilih diantaranya sesama mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang juga membahas kajian hegemoni, kemudian yang kedua mahasiswa lain untuk memberikan masukan mengenai pengecekan kaidah penulisan penelitian.

- 2) Mengamati, mencermati, membaca ulang, dan meneliti kembali analisis data yang telah dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.
- 3) Membaca berbagai pustaka dan dokumen pendukung mengenai kajian hegemoni, orde baru, sejarah, politik dan sebagainya. Pembacaan mengenai buku tersebut dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang sesuai.



BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab IV akan dipaparkan hasil analisis berupa (1) Bahasa Sebagai Legitimasi Kekuasaan (2) Hukum Sebagai Legitimasi Kekuasaan (3) Moral Sebagai Legitimasi Kekuasaan (4) Simbol sebagai Legitimasi Kekuasaan

4.1 Bahasa Sebagai Legitimasi Kekuasaan

Bahasa menurut KBBI **bahasa**¹/ba-ha-sa/ n 1 *Ling* sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; 2 percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun: *baik budi -- nya;-- menunjukkan bangsa, pb* budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan). Bahasa tidak hanya dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam sehari-sehari. Bahasa juga digunakan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan. Selanjutnya, akan dibahas kegunaan bahasa dalam praktik kekuasaan Orde Baru pada sub bab di bawah ini.

4.1.1 Eufimisme Bahasa

Bahasa digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh Orde Baru dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah penggunaan eufimisme dalam bahasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya istilah *ciduk* yang didengar dan dilihat secara langsung oleh tokoh aku dalam kutipan data berikut.

“Hari-hari itu memang aku banyak mendengar kosa kata baru . mungkin lebih tepat kosa kata lama yang mendapatkan makna baru, seperti misalnya kata *ciduk*” (K/HGM/B/EF/1/20)

Selama ini kata itu ku kenal dalam hubungannya dengan mandi, bahwa kalau mandi kita memakai gayung atau *ciduk*, dan kalau mengambil air kita *menciduk*; juga dengan hubungannya dengan makan, bahwa di meja makan kita *menciduk* sayur dan mangkok besar dan memindahkannya ke piring. Suatu hari tetanggaku sekeluarga menghilang dan katanya mereka dicituk. (K/HGM/B/EF/2/21)

Pada masa pencidukan, tokoh aku masih kecil. Ia sering mendengar tentang istilah *ciduk*. Menurut tokoh aku, istilah *ciduk* adalah kosa kata lama yang memiliki makna baru bahwa selama ini tokoh aku mengira istilah *ciduk* berhubungan dengan gayung atau *ciduk* , dan *menciduk* berhubungan dengan mengambil air atau sayur kemudian memindahkannya ke suatu tempat.

Hampir semua cerita tentang pencidukan hanya kudengar. Namun satu hari kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Pencidukan pada siang hari bolong, yang sangat tidak mirip dengan pencidukan sama sekali. (K/HGM/B/EF/4/24)

Ketika tokoh aku melihat secara langsung apa yang dimaksud pencidukan, tokoh aku terheran-heran peristiwa yang terjadi bukan seperti pencidukan. Tokoh aku melihat pembakaran rumah gadis kembar yang kena fitnah bahwa ayah mereka termasuk anggota Lekra dan mengajarkan lagu *Genjer-genjer*. Seseorang menyelamatkan seorang gadis yang dalam keadaan rumah terbakar malah berakhir tragis dengan kapak tertancap di punggungnya. Gadis yang masih hidup akan menjelma seorang wanita gila. Sedangkan kembarannya telah ikut hangus terbakar dimakamkan di hutan bambu dekat rumah tokoh aku. Pada cerita berikutnya kembarannya yang mati terbakar akan merasuki wanita gila dan

membalaskan dendam terhadap orang-orang yang terlibat dalam gelombang pencidukan 1965-1966.

Menurut KBBI **ciduk**/*ci-duk/ n* cedok air dibuat dari tempurung kelapa dan sebagainya yang diberi bertangkai; **menciduk**/*men-ci-duk/ v 1* mengambil dengan ciduk (gayung, sendok, dan sebagainya); mencedok; **2 ki** mengambil untuk ditahan (tentang alat negara, polisi): *polisi telah ~ dua gembong penjahat itu*; **terciduk**/*ter-ci-duk/ v 1* sudah diambil dengan ciduk (gayung, sendok, dan sebagainya); **2 ki** sudah diambil untuk ditahan; **cidukan**/*ci-duk-an/ n* hasil menciduk.

Penggunaan istilah *ciduk* terdapat eufimisme dari maksud yang sebenarnya adalah ditangkap/dibunuh. Istilah *ciduk* lebih tidak menyeramkan ketimbang *dibunuh* atau *dibakar hidup-hidup*. Selain itu istilah *diciduk* tidak lebih kejam dari kedua istilah tersebut. Jelas bahwa penggunaan istilah *ciduk* menghilangkan efek kekejaman. Pada titik ini bahasa mengambil peran “Normalisasi” terhadap tindakan kekerasan. Meminjam konsep kekerasan budaya bahwa produk-produk budaya seperti Ideologi, bahasa, agama, seni dan pengetahuan dapat digunakan untuk meligitimasi praktik kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung (fisik) maupun struktural (sistem sosial).

Bahasa tidak hanya merupakan alat komunikasi saja melainkan juga memiliki fungsi tertentu misalnya fungsi politis. Dengan menghubungkan bahasa dan potensi fungsi kekerasannya, Gay secara jelas mengindikasikan bahwa selalu membawa muatan ideologis tertentu, dan dengan demikian, bahasa sebagai sebuah institusi dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk menindas dan

menyerang kelompok lain. “Bahasa secara umum dapat memelihara penindasan di dalam sebuah sistem yang opresif, tanpa peduli apakah tiap-tiap individu secara sadar mengalami siksaan yang ditujukan pada diri mereka”. (Herlambang, 2013, hal.50). Jadi, Orde Baru pada peralihan kekuasaanya menggunakan bahasa sebagai alat legitimasi kekerasan terhadap musuhnya yakni PKI dan organisasi di bawahnya. Pada penggunaan istilah *ciduk* mengalami eufimisme dari maksud yang sebenarnya. Maka bahasa berfungsi sebagai penghalus dari kenyataan sebenarnya yang dilakukan Orde Baru.

4.1 2 Penghapusan Ingatan melalui Perubahan Ejaan

Orde Baru menggunakan bahasa sebagai kontrol pikiran masyarakat, dengan adanya perubahan ejaan Suwandi menjadi Ejaan Yang Di Sempurnakan (EYD) dengan dalih memperbaiki bahasa. Ternyata dalam praktiknya memiliki efek-efek tertentu dan terselubung. Kutipan di bawah ini memberikan informasi telah terjadi adanya pergantian ejaan. .

Meskipun keinginanku untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa itu besar, aku tak tahan membaca cara penulisan yang buruk. Barangkali seleraku terlanjur dibentuk oleh buku-buku bacaan yang baru kusadari belakangan ditulis dengan sangat bagus. (K/HGM/B/EY/1/153)

Kliping koran yang dibaca tokoh aku didapatkan dari kakaknya yang hilang pada pencidukan 1965 dan masih dibaca setelah 40 tahun berlalu dalam penjara. Maka *setting* saat tokoh aku masih membaca kliping koran di penjara adalah sekitar tahun 2000-an. Selanjutnya, tokoh aku merasa perlu tahu tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Lebih tepatnya apakah orang-orang yang dicituk memang pantas dicituk dan dosa apa yang telah diperbuatnya

Tokoh aku meskipun dengan rasa penasarannya yang besar merasa tak tahan dengan cara penulisan tersebut. Maka tidak heran jika orang tidak akan betah membaca tulisan zaman itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, khususnya narasi sejarah tentang G30S. Maka ada paradigma bahwa tulisan yang ditulis pada zaman itu buruk dari pada tulisan zaman Orde Baru, hal ini dikarenakan telah terjadi perubahan dalam penulisan ejaan.

Pada masa kolonial, penjajah menggunakan politik bahasa untuk .mengobok-obok dan mengontrol Bahasa Indonesia, meskipun hanya melalui penggunaan ejaan *Van Ophusen*. Seperti halnya Orde Baru menggunakan bahasa sebagai kontrol pikiran masyarakat, dengan adanya perubahan ejaan Suwandi menjadi Ejaan Yang Di Sempurnakan (EYD) dengan dalih memperbaiki bahasa. Ternyata dalam praktiknya memiliki efek-efek tertentu dan terselubung.

Pada tahun 1972, perubahan ejaan dalam bahasa dari ejaan Suwandi menjadi Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bukanlah tanpa adanya sebab politis. Di sinilah ia mendapati dampak buruk EYD; betapa efektif perubahan edjaan itu bagi ingatan publik dan kreativitas generasi muda. Baginja peralihan dari edjaan Suwandi ke EYD telah merupakan batas tegas antara apa jang ditulis pada zaman orde bau dan zaman sebelumnja. Tidak ada kelandjutan antara kedua zaman itu. Generasi muda jang tidak kreatif dan hanja bisa meng-ulang² bahasa orde bau disebutnja telah kena penghapusan sedjarah. (Wibisono, 2012, hal.87)

Hasrat untuk membakukan bahasa masa Orde Baru bukannya sebagai usaha mengembangkan kelestarian bahasa Indonesia semata, namun juga sebagai contoh manipulasi bahasa yang bertendensi untuk mempertahankan kekuasaan.

Hooker (1996, hal.56-77). Jadi, dibalik adanya usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan bahasa ternyata terdapat upaya terselubung bagi rezim Orde Baru untuk memutus hubungan dengan rezim sebelumnya.

4.1.3 Wacana Anti-Komunisme

Anti-Komunisme telah menjadi wacana utama dalam masyarakat Indonesia sepanjang sejarah pemerintah Orde Baru (1966-1998) dan sesudahnya. Salah satu aspek penting yang memberikan kontribusi terhadap bagaimana ideologi anti-komunisme dibentuk oleh rezim Orde Baru dan dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama adalah kampanye kebudayaan dan meligitamasi kekerasan terhadap simpatisan komunis 1965-1966 (Herlambang, 2013, hal.1). Hal tersebut bisa ditemui dalam kutipan data berikut.

KOMPAS

Antara Tugas dan Tjinta
Jogjakarta (Antara)

MARSIJATIN, gadis djelita mahasiswa IKIP Jogja yang diperiksa Pepekuper Kulonprogo karena terlibat “G30S” mengakui bahwa dia termasuk regu penganiaja tjalon korban “G30S”. Ia dijadikan honorarium, tiap djiwa yang dibunuh berupa uang sebanyak Rp 1 djuta dari Aidit melalui tokoh PKI setempat.

Gadis djelita itu telah berhasil menipu seorang anggota ABRI setempat, sehingga dikawin oleh anggota ABRI itu.

Setelah disinjilir Masijatin termasuk “G30S”, maka dengan kesadaran yang mendalam dan karena terdjebak penipuan gadis itu, sang suami segera menjerahkan M kepada yang berwadajib. (K/HGM/B/AK /5/156)

Tokoh aku setelah dewasa terlibat dalam pembobolan bank. Ketika dia masuk dalam penjara, dia mulai mengisi hari-harinya dengan membaca kliping koran milik kakaknya. Kutipan kliping koran itu tertulis tanggal 9 Desember 1965. Berita tersebut bersisi tentang mahasiswi yang masuk dalam regu

penganiaya calon korban G30S. Berita tersebut menarasikan bahwa sebelum para perwira meninggal telah mengalami penyiksaan yang dituduhkan pada PKI dan organisasi-organisasi yang bernaung dibawahnya. Propaganda yang lain dalam kliping tokoh kakak aku juga dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Bridgen, Hartono Ass IV Men/Pangdad selaku ketua rombongan antara lain dalam kata pendjelasannya mengatakan bahwa almarhum Djendral A. Yani beserta 6 Orang Pahlawan revolusi lainnja sebelum dimasukkan kedalam sumur tsb. Lebih dulu disiksa dan dibunuh setjara kedjam oleh manusia2 biadab Gestapu/PKI (**K/HGM/B/AK /4/40**)

Tokoh aku semasa kecil ketika membaca berita tersebut memiliki kesadaran apakah orang-orang yang dicituk selama ini termasuk manusia-manusia biadab yang membunuh para jendral itu. Sedangkan kalau tidak kenapa mereka harus dicituk dan tidak pernah kembali. Tokoh aku bertanya-tanya kenapa orang-orang yang memberi perintah untuk melakukan pencidukan sambil membawa golok, pentungan, dan celurit tidak bisa membedakan mana orang yang mestinya ditangkap (termasuk tokoh kakak aku). Berita tersebut memuat pernyataan seorang bridgen ketika meninjau sumu lubang buaya dan menyatakan bahwa sebelum para jendral dimasukan ke dalam sumur terlebih dahulu mengalami penyiksaan secara kejam.

Pembantaian massal di indonesia, disusul sejumlah peristiwa yang menyertainya sepanjang 1965-1966 merujuk pada keterkaitan erat peristiwa dengan propaganda. Mutilasi para jendral yang dituduhkan pada gerwani adalah rekayasa yang ‘membuktikan’ sekaligus memelihara dongeng kebejatan komunis. (Southwood, 2013, hal 79). Bahkan penyiksaan tersebut dilakukan lewat upacara “harum bunga” yang dimaksudkan adalah para perempuan bugil yang terdiri dari

anggota-anggota Gerwani yang tidak lain adalah barisan komunis perempuan. Tujuan dari semua itu adalah untuk membakar emosi massa dalam rangka membangun prakondisi, agar mudah bisa didorong melakukan pembantaian pada orang-orang komunis, sekalipun pembantaian itu tetap harus dipelopori oleh tentara, karena bagaimanapun massa rakyat bukanlah massa yang terlatih melakukan pembunuhan seperti tentara yang memang terlatih dan dilatih untuk itu.

Keterkaitan antara pengalaman pencidukan yang mengerikan dialami tokoh aku merupakan efek dari adanya propaganda yang dimuat melalui media masa. Pengalaman melihat seorang pemuda rakyat yang diseret keluar kelas dengan kepala yang mengucur darah di lantai oleh massa yang marah sambil berteriak-teriak membawa pentungan, golok, dan alat lainnya. Lalu pengalaman melihat pembakaran rumah seorang keluarga yang dituduh PKI karena mendapat fitnah telah mengajarkan lagu genjer-genjer kepada anak-anak juga merupakan efek yang dihasilkan oleh dahsyatnya propaganda-propaganda di masyarakat.

Gagasan untuk membunuh para anggota PKI dan kaum kiri tidak muncul secara spontan. Sebaliknya, ini didorong dan difasilitasi oleh pimpinan Angkatan Darat melalui penggunaan bahasa yang sengaja digunakan untuk menciptakan atmosfer ini, membunuh siapa pun yang dikatakan dengan terlibat PKI terlihat tidak hanya dibenarkan secara moral, tetapi juga tugas patriotik dan keagamaan. Bahasa tersebut menyebar luas melalui surat kabar dan televisi yang dikendalikan oleh angkatan darat. Sebagian lagi melalui radio, rapat-rapat umum, demonstrasi, upacara, deklarasi, khotbah, dan pertemuan tatap muka. Dalam atmosfer histeria

antikomunis yang dihasilkannya, konflik-konflik yang sudah ada terkait politik, agama, budaya, dan lahan lebih muda tersulut. Robinson (2018, hal.220) Ada juga koran yang terkenal independensinya yakni *Kompas* di bawah kekuasaan orba juga digunakan untuk melakukan propaganda tentang Antikomunisme. Bahkan koran – koran independen pun, seperti misalnya *kompas*, yang belakangan menjadi koran acuan terkemuka selama tahun-tahun kekuasaan soeharto, ikut ambil bagian dalam kampanye militer untuk menggalakkan histeria anti-PKI (Roosa, 2017, hal.32). Misal dalam klipng koran Kompas yang memuat berita tentang keterlibatan mahasiswi dalam G30S dalam data (K/HGM/B/AK /5/156).

Berita dalam data (K/HGM/B/AK /5/156) menarasikan seorang mahasiswi ikut terlibat dalam penyiksaan dan telah menipu anggota ABRI. Narasi tersebut memperkuat propaganda bahwa yang melakukan penyiksaan terhadap para jenderal adalah para wanita komunis. Berita tersebut juga menyatakan bahwa mahasiswi tersebut juga menerima honorarium dari pemimpin PKI yakni D.N Aidit melalui tokoh PKI setempat. Berita ini memuat stigma terhadap PKI bahwa untuk melaksanakan tujuannya, PKI melakukan dengan segala cara, bahkan dengan cara yang sangat licik dan keji. Sejalan dengan itu Southwood (2013, hal.87) menyatakan bahwa propaganda lubang buaya yang vulgar dan bernada pornografi—dengan penekanan pada boboroknya moral-moral wanita-wanita komunis—menjadi tema sentral kampanye anti-PKI.

Mengacu pada dokumen yang ditemukan *visum et repertum* (autopsi). Ben Anderson dalam kata pengantarnya “*How did the generals Die?*”, menyatakan bahwa di antara semua pengakuan yang memenuhi pemberitaan surat kabar

sepanjang bulan-bulan Oktober, November, Desember, sementara tengah berlangsung pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh berafiliasi dengan PKI, terdapat dua hal hal yang sangat menarik. *Pertama* adalah desakan bahwa tujuh pria yang dibunuh itu telah mengalami penyiksaan yang mengerikan, yaitu pencungkilan mata dan kastrasi (pemotongan alat kelamin), sedangkan hal kedua adalah penekanan bahwa kalangan sipil anggota organisasi komunis merupakan pelaku tindakan kejam itu.

Harian Angkatan bersenjata yang mengumumkan foto-foto kabur konon merupakan foto jenazah yang membusuk, memberitakan kematian itu sebagai “Perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan. Harian berita Yudha yang selalu lebih hidup, mencatat bahwa “Bekas2 luka di sekudjur tubuh2 akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh2 pahlawan kita.”. Beberapa tanggal juga dengan nada yang serupa menyebutkan pemberitaan mengenai korban-korban tersebut. Pada edisi 11 Oktober Angkatan Bersenjata lebih merinci kematian Tendean dengan menyatakan bahwa dia telah mengalami beberapa kali penyiksaan di Lubang Buaya, tempat diserahkan kepada Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia yang dianggap berafiliasi kepada PKI). Dia dijadikan “permainan djahat” oleh perempuan-perempuan ini, yang menggunakan sebagai bulan-bulanan sasaran latihan menembak mereka. (IPT 1965, 2016 hal 315). Kemudian, yang paling jahat dan sadis ialah bahwa semua orang itu dinyatakan sebagai anggota Gerwani yang amoral di Lobang Buaya, dan itu diberitakan dalam surat-surat kabar di Jakarta. Surat kabar “Angkatan Bersenjata” tiap hari mengobral kebohongan untuk

membakar kemarahan rakyat Indonesia. Gerwani dijuluki Dajal, hingga dimusuhi oleh siapa saja yang termakan berita fitnah itu. (Sulami, 1999 hal.45)

Sedangkan pada kenyataan tidak demikian, dalam akhir penjelasannya menyatakan bahwa Diseluruh laporan ini tidak pernah sekalipun disebut telah terjadi penyiksaan, demikian pula tidak ada jejak pisau cukur atau pisau lipat. Tidak hanya hampir semua luka bukan akibat tembakan diuraikan secara terperinci sebagai akibat trauma bertat dan tumpul, tetapi sasaran pada tubuh-pergelangan kaki, tulang kering, pergelangan tangan, paha pelipis, dan seterusnya—yang pada umumnya tampak acak. (IPT 1965, 2016, hal.319).

Hal yang sangat mencolok adalah bahwa bagian tubuh yang biasanya merupakan sasaran para penyiksa seperti biji pelir, dubur, mata, kuku jari, teliga, dan lidah tidak pernah disinggung. Dengan begitu bisalah dikatakan bahwa dengan kepastian yang masuk akal, bahwa enam korban menemui ajal karena tembakan (hanya kematian Harjono di rumahnya sendiri yang merupakan tanda tanya), dan walaupun tubuh mereka menjadi sasaran kekerasan lain, maka itu akibat hempasan popor senjata yang sebelumnya telah melepaskan tembakan yang mematikan terhadap mereka, atau kerusakan tubuh itu tampaknya merupakan akibat jatuh ke dalam sumur berdinding batu sedalam 11 meter yang kira-kira antara dengan gedung tingkat tiga.

Sekarang hanya tinggal mengatakan bahwa dalam pidatonya tanggal 12 Desember 1965, kepada kantor berita Antara, presiden Soekarno memberi peringatan keras kepada para wartawan karena telah membesar-besarkan berita. Presiden juga menekankan para dokter yang memeriksa tubuh para korban sudah

menegaskan tidak terjadi mutilasi keji pada mata dan alat kelamin seperti dilaporkan pers. (IPT 1965, 2016, hal.320).

Sumber terbuka tentang tujuh orang tewas ini , kita sekarang seperti para pembaca Indonesia pada tahun 1965, hanya bisa bergantung pada laporan dua harian militer; Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha , serta pusat penerangan ABRI sebagai pemasok berita. (IPT 1965, 2016, hal.313). Walaupun beberapa koran sipil terus meberitakannya, pers kiri sudah dibungkam sejak 1 Oktober malam, dan siaran serta televisi pemerintah sudah sepenuhnya berada di tangan militer bahkan sebelum 1 Oktober. (IPT 1965, 2016, hal.313)

Panglima Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya), Jendral Umar Wirahadikusuma, menutup sebagian besar saluran media utama, kecuali dua surat kabar yang dikendalikan oleh angkatan darat, angkatan bersendjata dan Berita Yudha. (Robinson, 2018, hal.76). Wacana Anti-Komunime tersebut terkait dengan penyebutan nama yang digunakan oleh Orde Baru. Selain terkait tentang pemberitaan penyiksaan para jendral sebutan G30S segera diganti dengan sebutan lain: “Gestapu”, akronim dari “Gerakan September Tigapuluh”, entah siapa penciptanya tapi disiarkan pertama, dan terus-menerus oleh koran-koran pendukung utama dan pertama Orde Baru. (Setiawan, 2003, hal.88). Karena itu pemberian nama “Gestapu” itupun harus segera didukung dengan cerita penyiksaan yang sangat kejam terhadap para jendral yang menjadi korban, dengan cara diris-iris kemaluannya selain juga dicongkeli matanya dengan alat pencungkil mata yang jauh hari telah dipersiapkan. (Ling, 2010, hal.193). Namun demikian, kenyataannya bahwa elemen-elemen kebudayaan ini sebenarnya menjadi faktor

kunci dan pendorong utama, dibelakan praktik kekerasan belumlah disadari sepenuhnya. Dengan kata lain, praktik kekerasan langsung atau fisik sebenarnya memerlukan elemen-elemen pendukung yang saya rujuk sebelumnya sebagai produk-produk kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai moral, Ideologis dan artistik yang antikomunis sudah menjadi kekuatan kebudayaan yang digunakan sebagai dasar dari kampanye puluhan tahun untuk mengibliskan komunisme dan praktik-praktik kebudayaan, sebagai bentuk legitimasi atas kekerasan terhadap kaum komunis (Herlambang, 2013, hal.5).

Kajian-kajian yang ada juga menunjukkan representasi bahasa dan visual sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menyiapkan panggung bagi genosida serta jenis kekerasan massal lainnya. Penggambaran kelompok sasaran sebagai yang lebih rendah dari manusia, mengancam, berbahasanya, amoral, atau bejat secara seksual—bersama dengan hasutan secara tersurat maupun tersirat untuk melakukan kekerasan terhadap anggota kelompok tersebut—secara efektif menempatkannya, seperti dikatakan oleh Fein, “di luar ruang lingkup tanggung jawab pelaku” dan membuat kekerasan massal jauh lebih mungkin terjadi. (Robinson, 2018, hal.19).

Jadi, Pers memegang peran penting dalam pembentukan wacana Anti-Komunisme dengan menyebarkan propaganda kematian korban G30S yang bernada kekejaman dan mengandung unsur pornografi. Tidak hanya melalui koran milik militer saja (Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha), tetapi juga dengan memanfaatkan koran lain. Misalnya koran Kompas yang dianggap memiliki independensi, pada masa itu juga digunakan untuk alat propaganda atas kekuasaan

rezim. Selain itu sebaliknya mengenai pembunuhan besar-besaran yang dilakukan kepada PKI dan non PKI ketika itu tidak pernah diberitakan.

4.2 Hukum Sebagai Legitimasi Kekuasaan

Adalah benar bahwa di tiap negara terdapat jurang pemisah antara teori hukum dan praktik kelembagaannya. Tidak ada sistem hukum yang dapat sepenuhnya bebas dari kontrol politis dan tekanan dari mereka yang berkuasa (Southwood, 2013, hal.127). Selanjutnya, akan dibahas kegunaan hukum dalam praktik kekuasaan Orde Baru pada sub bab di bawah ini.

4.2.1 Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) sebagai Rantai Komando Pembunuhan Massal

Pembunuhan massal yang terjadi selama tahun 1965-1966 seolah terjadi karena konflik horizontal. Namun, di balik itu, kejadian tersebut tidak hanya melibatkan warga sipil saja, melainkan juga melibatkan militer sebagai aktor intelektualnya. Hal ini tidak lepas dari peran KOBKAMTIB sebagai lembaga yang bertugas untuk memulihkan keamanan nasional pada waktu itu. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan kutipan-kutipan pada novel di bawah ini.

Aku masih berdiri di atas meja ketika kulihat orang yang malang itu dilempar ke atas truk di depan gerbang sekolah. Di atas truk itu sudah terdapat sejumlah orang, lelaki maupun perempuan—rupanya sekarang orang tidak menciduk pada malam hari, pikirku. Aku terlalu jauh dari truk di luar gerbang sekolah itu untuk bisa mengamati wajah-wajah mereka, jadi sampai hari ini aku hanya teringat wajah orang yang masuk lewat jendela ke dalam kelasku itu saja. Apakah yang dikatakan oleh wajahnya? Aku tidak merasa mampu merumuskannya. (K/HGM/H/KOB/2/21).

Berawal dari ingatan tokoh aku pada masa kecil ketika berada di bangku sekolah dasar, sebuah peristiwa seorang pemuda lari terbirit-birit masuk dalam kelas yang diburu oleh massa yang marah. Orang-orang yang memburunya merangsek dalam kelas. Seorang memukulnya dengan sebuah pentungan besi tepat di kepalanya hingga tak sadarkan diri dan akhirnya diseret keluar kelas dengan darah yang mengucur. Di luar kelas telah banyak orang di angkut ke dalam truk termasuk pemuda tersebut. Ternyata, orang-orang tidak lagi menciduk pada malam hari.

Hal lain mengenai pembunuhan massal bisa dilihat dalam data di bawah ini. Tokoh aku mendatangi pelepasan tapol di stasiun karena dirinya memiliki ikatan emosional atas kejadian-kejadian yang pernah dia lihat dengan mata-kepalanya sendiri terkait pencidukan, hingga pembakaran rumah orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis. Tokoh aku bertemu dengan keempat tapol yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. Selanjutnya tokoh aku menampung mereka di rumahnya. Tokoh aku mendapatkan cerita dari dua orang mantan tapol lainnya yang tidak bisa diceritakan secara langsung. Bagaimana cerita-cerita orang yang dibunuh yang di dengarnya ketika sekolah dasar. Pada akhirnya ketika dewasa dia mendengar langsung dari tapol-tapol tersebut tentang pembunuhan massal yang tidak pernah ditulis dalam sejarah.

Aku telah berjalan dari dunia ke dunia dan kutahu betapa suatu ketika Pulau Jawa berubah menjadi kubangan darah. Di antara semua dunia tidak ada yang lebih menjijikkan daripada sebuah dunia di mana perempuan-perempuan hamil dibelah perutnya, ditusuk kemaluannya, dibelah sampai ke dada, dipotong payudaranya, diambil janinnya untuk dicacah-cacah, dan akhirnya kepala mereka dipenggal pula. Kepala mereka ditancapkan ke ujung bambu dan dipatok berjajar di tepl jalan. Suami-suami mereka

dikebiri dan alat-alat vitalnya digantung di pos-pos jaga dari mana segala marabahaya mengancam umat manusia yang celaka.

(K/HGM/H/KOB/4/66-67)

Rembulan adalah mata malam yang menjadi saksi pembantaian. Orang-orang diikat tangannya kebelakang, didorong sampai tersimpuh di depan lubang, sekali retak nyawa melayang sekaligus badan masuk kuburan. Dua puluh sampai duapuluhlima orang akan terkubur di satu lubang, lantas di atasnya akan ditanam pohon pisang. **(K/HGM/H/KOB/5/67)**

Pengalaman lainnya mengenai kabar telah terjadi pembunuhan massal didapatkan tokoh aku dari berita yang tersebar dari mulut-kemulut. Ia mendengar bahwa telah terjadi pencidukan, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri siapa orang-orang yang bertindak di balik pencidukan tersebut.

Jadi siapa yang membiarkan segala pencidukan itu berlangsung? Dari teman-teman sepermainannku kudengar cerita tentang hutan jati di luar kota tempat orang-orang yang dicituk itu ditembak mati dan dikuburkan.

“Banyak orang dibunuh di sana” aku teringat temanku berbisik-bisik dalam kelas, “termasuk bapaknya si itu”

Ia menunjuk bangku di depanku yang belakangan selalu kosong. **(K/HGM/H/KOB/3/43)**

Gelombang pencidukan di mulai setelah meletusnya Gerakan 30 September yang menganggap PKI sebagai dalang dari kejadian tersebut. Pencidukan terjadi antara tahun 1965-1966 yang memakan korban perkiraan awal 78.000 (jumlah yang dianggap terlalu rendah) oleh komisi pencari fakta dari Soekarno. Pada pertengahan 1966, Kobkamtib menyebutkan hampir angka juta korban. Estimasi ini berdasarkan survei lapangan dari pernyataan wartawan-wartawan asing. 800.000 di antaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 100.000 di Bali dan 100.000 di Sumatra. (IPT 1965, 2016, hal.245).

Menurut Komandan Kostrad Sarwo Edhie, tigajuta orang dibunuh atas perintahnya, tetapi pernyataan ini tidak didukung bukti yang kuat. Pada tahun

2001, Cribb menuliskan lagi sebuah kajian dan mengatakan; “Sebuah konsensus ahli menyebutkan angka 400.000-500.000, tapi jumlah tepatnya bisa setengahnya atau bahkan dua kali lipatnya. Dan “kami mungkin tidak dapat menemukan bukti empiris untuk menjawab pertanyaan ini” (IPT 1965, 2016, hal.247).

Robbinson menyatakan bahwa usaha pemerajaraan dan pembunuhan massal bukanlah sesuatu yang spontan atau tak terelakkan tetapi tindakan itu didorong, difasilitasi, diarahkan, dan dibentuk Angkatan Darat. Dengan kata lain, tanpa kepemimpinan angkatan darat , tekanan tersebut—dan ketegangan pribadi, sosial, ekonomi, agama, serta budayayang memanasinya—tidak akan pernah mengakibatkan pemerajaraan atau pembunuhan massal dalam skala seluas itu. (Robinson, 2018, hal.22).

Pembunuhan massal, peristiwa ini dirancang dan digerakkan dengan garis komando yang jelas, dan dilaksanakan dengan berbagai cara: pembunuhan secara langsung oleh militer, atau dengan menggunakan tangan-tangan sipil yang terlatih sehingga terkesan terjadi konflik horizontal. Korban pembunuhan berkisar 500 ribu hingga 3 juta orang. (aziz dalam tempo, hal.124).

Kejadian pencidukan di dalam kelas dan pembakaran rumah sekeluarga seolah-olah terjadi karena adanya konflik “horizontal”, tetapi dibalik itu semua terdapat peran militer. Militer menggunakan tangan-tangan sipil untuk melakukan eksekusi pembersihan terhapa orang-orang yang dituduh PKI. Dalam sejumlah kecil kesempatan di mana pembantaian massal ini disebutkan secara terbuka dalam sumber-sumber resmi, hal ini dilimpahkan pada “kemarahan rakyat” dan tidak disebut sama sekali soal keterlibatan militer. Salah satu contohnya adalah

pidato Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1971 (pada perayaan lima tahun perintah “Supersemar” yang menurut dugaan ditandatangani oleh Presiden Soekarno, yang mengawali pengambilan kekuatan secara penuh oleh Soeharto) Dalam pidatonya Soeharto mengklaim bahwa pembantaian terjadi di pedesaan pada tahun 1965-1966 sebagai akibat dari ketegangan-ketegangan politik yang sudah ada sebelumnya (IPT 1965, 2016, hal.239).

Instruksi kepada tingkatan tentara yang lebih rendah itu, dikeluarkan Kopkamtib lewat surat bernomor atau dari institusi militer lainnya, seperti Kementerian Pertahanan atau Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) yang juga berada di bawah kendali Soeharto. Dan, ujung dari perintah itu ada di tangan para komandan tingkat distrik atau KODIM (Komando Distrik Militer). Merekalah yang kemudian menentukan hidup dan mati para anggota.

Walaupun perintah-perintah dan operasi-operasi mulai di beberapa daerah sejak tanggal 1 Oktober 1965, sarana utama operasi ini adalah Kopkamtib, yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1965 dengan jenderal Soeharto sebagai komandannya (Pangkobkamtib) (IPT 1965, 2016, hal.234). Namun, kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta pada waktu itu berhasil mendapatkan informasi dari sumber-sumber TNI, dan informasi mengenai peran TNI dalam pelaksanaan atau pengorganisasian pembunuhan-pembunuhan ini terdapat di dalam banyak laporan-laporan dari kedutaan dan dari CIA ke Washington. Telegram-telegram pada bulan November 1965 dengan detail melaporkan cara yang digunakan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di Jawa Tengah dalam menggerakkan milisi sipil untuk membantu perihal penangkapan orang-orang

yang diduga anggota PKI dan dalam pembuangan mereka. Dua peneliti, Douglass Kammen dan David Jenkins, yang sudah menggunakan bahan ini merangkum prosedurnya meliputi: prosedur yang paling umum adalah untuk paramiliter sipil yang beroperasi di bawah arahan pos kecil RPKAD untuk menangkap orang-orang yang diduga komunis dan kemudian membawa mereka ke tempat-tempat penahanan yang sudah ditumpuk. Tawanan kemudian diinterogasi, sesingkat apapun prosesnya, untuk memisahkan kader PKI dari anggota partai biasa, simpatisan, dan keluarga. Kader-kader dibawa ke tempat yang terpencil dan kemudian dibunuh. Tapi berujung dengan banyak sekali tawanan yang tersisa, yang mana bukan termasuk perhatian TNI, dan juga tidak bisa mereka beri makan atau tampung. Maka solusi yang diambil personel militer adalah ‘memindahkan’ para tawanan di malam hari dan dalam perjalanan menyerahkan kepada pasukan jagal sipil.

Pembunuhan massal ini memiliki pola serupa, dalam kurun waktu yang singkat, dan terjadi secara meluas. Seperti pengakuan tapol yang diceritakan kepada tokoh aku mengenai pembunuhan pada data **(K/HGM/H/KOB/4/66-67)** bahwa para perempuan ditusuk kemaluannya dan dipotong payudaranya, sedangkan yang laki-laki dikebiri dan alat kelaminnya digantung di pos-pos jaga, serta kepala mereka ditancapkan ke ujung bambu dan dipatok berjajar di tepi jalan. Tentu saja hal tersebut tidak dilakukan tanpa sebab dan motif. Kemunculan untuk menimbulkan teror, dan ketakutan secara psikologis terhadap lawan-lawan politik, serta kepatuhan terhadap kekuasaan. Robinson menjelaskan ditemukan adanya pola dalam pembunuhan massal di berbagai daerah. Sebuah narasi anonim yang

dikumpulkan pada 1970-an memberikan penjelasan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan di daerah Banyuwangi, Jawa timur pada akhir 1965 dan awal 1966.

Dalam banyak kasus, para perempuan dibunuh dengan cara ditusuk menembus vagina dengan pisau panjang hingga tembus ke perutnya. Kepala dan payudara kemudian dipotong lalu digantung untuk dipajang di pos-pos jaga sepanjang jalan. Korban laki-laki kepala para anggota Pemuda Rakyat dipotong dan dipasang ditongkat bambu di sepanjang pinggir jalan atau digantung dari pepohonan. (Robinson, 2018 hal 175)

Serta pengalaman pencidukan pada siang hari di mana orang-orang di lempar ke dalam truk sesuai dalam data (**K/HGM/H/KOB/2/21**) mengindikasikan adanya keterlibatan selain sipil. Penggunaan truk dalam mengangkut orang-orang yang diciduk juga merupakan fasilitas yang diberikan atau dipergunakan oleh militer. Tidak kalah penting adalah truk dan kendaraan lain yang disediakan oleh angkatan darat untuk mengangkut para prajurit, milisi, serta korban mereka. Narasi-narasi dari hampir seluruh penjuru negeri menjelaskan pengangkutan para terduga, yang diikat tangan dan kakinya dengan kendaraan-kendaraan militer yang terbuka. Kebanyakan truk itu dimiliki Angkatan Darat sendiri, sementara lainnya dikuasai warga sipil sebagai bagian dari operasi angkatan darat. (Robinson, 2018, hal.210).

Besarnya campur tangan KOPKAMTIB di masyarakat terungkap jelas melalui sebuah telaah atas frasa “sistem hukum” di Indonesia. Saat korban-korban Orde Baru diproses melalui sistem hukum, mereka mendapati kopkamtib dan pemutarbalikan hukum di dalam setiap tahapan.

Pada 10 Oktober Soeharto telah melembagakan kewenangan yang diberikan Soekarno kepadanya di Bogor delapan hari sebelumnya untuk ‘memulihkan keamanan dan ketertiban dengan membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) yang diresmikan Soekarno pada tanggal 1 November. (Crouch, 1999, hal.161-162)

Tugas Utama KOPKAMTIB terbaru dimuat dalam keppres No. 9/1974 (keputusan Presiden) adalah sebagai berikut; Untuk menjaga keamanan dan ketertiban setelah pemberontakan G30S/PKI, kegiatan-kegiatan ekstrem dan kegiatan subversif lainnya. Untuk melanjutkan menjaga kewibawaan pemerintah dengan segala cara mulai dari pusat ke daerah dalam rangka mengawali pengamalan Pancasila dan UUD 1945. (Southwood, 2013, hal.120)

Praktik dari menjaga keamanan dan ketertiban yakni menyapu bersih seluruh anggota partai serta para simpatisannya. PKI adalah sebuah partai dengan anggota kurang lebih tiga juta orang. Kalau pemerintah berniat bersikukuh bahwa “PKI” mengorganisasikan G-30-S, maka pemerintah harus mampu menjelaskan siapa di dalam PKI yang mengorganisasikan gerakan tersebut.

Malahan, dengan secara terus-menerus menggunakan istilah “PKI” masyarakat digiring untuk percaya bahwa bukan hanya seluruh tiga juta anggota partai yang bertanggung jawab, tetapi juga siapa pun yang berhubungan dengan partai, seperti para anggota organisasi-organisasi sealiran (seperti Lekra), bertanggung jawab. (Roosa, 2008, hal.xvii)

Jadi, pembunuhan massal bukanlah hal yang spontan, melainkan diarahkan dan difasilitasi oleh militer. Instruksi kepada tingkatan tentara yang lebih rendah itu,

dikeluarkan Kopkamtib lewat surat bernomor. Hal yang paling umum adalah untuk paramiliter sipil yang beroperasi di bawah arahan pos kecil. Pembunuhan massal dinarasikan pemerintah seolah karena kemarahan rakyat saja. Namun, keterlibatan militer itu justru dapat ditengarai melalui pola pembunuhan, dan penggunaan fasilitas truk seperti dalam data.

4.2.2 Undang-Undang No. 5/1969 (Penahanan Tanpa Jangka Waktu yang Ditetapkan)

Penangkapan-penangkapan G30S dilakukan tanpa surat perintah. Biasanya hanya berupa perintah verbal dari komandan militer. Penangkapan G30S dilakukan dengan sewenang-wenang dan tidak terduga kebanyakan di antara dijalankan dengan sangat berhati-hati. Pasti, dalam situasi penangkapan yang dijalankan dengan sangat sewenang-wenang, banyak orang yang kini ditahan sebagai tahanan politik tidak memiliki sejarah politik apapun tapi dikorbankan karena mereka adalah keluarga atau teman orang-orang yang diburu tentara. Tokoh aku bertemu dengan para tapol karena pengalaman batinnya pernah mengalami peristiwa-peristiwa mengerikan selama masa pencidukan. Hal ini bisa tersebut dapat dibuktikan dengan data dibawah ini.

petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air.

Namun diri saya tidak penting, kisah saya tidak akan hebat dari semua kawan yang ditangkap tanpa kesalahan yang jelas. Diadili saja tidak pernah.
(K/HGM/H/UU/5/64)

Seorang tapol bercerita pada tokoh aku bahwa dirinya adalah mantan pengurus Himpunan Sarjana Indonesia. Tapol HSI ditangkap tepat di bandara setelah kembali ke Indonesia. Tapol HSI bercerita bahwa dirinya keluar negeri

mewakili organisasi tapi dalam seminar berbicara dengan semangat mewakili Indonesia, tetapi ketika pulang malah dituduh mengkhianati negeri sendiri. Kawan-kawan tapol tersebut ditangkap tanpa kesalahan yang jelas dan tidak pernah diadili.

Saya dianggap gembong. Padahal sungguh mati tidak tahu apa-apa. Hanya karena kenal baik dengan Untung. Para interogator tidak pernah mau peduli bahwa kenal Untung itu berarti tahu seluruh rencananya pada malam 30 September 1965. Saya memang seorang komandan, dalam setiap tingkatan saya menjadi komandan, tapi saya ini hanya korban—tanpa seorang pun yang barangkali sungguh-sungguh berniat mengorbankan saya...”
(K/HGM/H/UU/3/64)

Seorang tapol lain, yakni seorang anggota Cakrabirawa juga ditangkap dan mendapat penyiksaan yang luar biasa ketika proses introgasi, karena hanya gara-gara dia mengenal “Untung” (Pemimpin Gerakan 30 September). Maka ia dianggap sebagai gembong dan tahu seluruh rencana pada malam 30 September 1965.

Pramudya Ananta toer sastrawan yang terkenal dengan “Keluarga Gerilja” dan terkenal pula sebagai tokoh Lekra telah disergap oleh rakjat di rumahnja dan kemudian diserahkan kepada alat2 Negara jang lantas membawanya ke kodan V Djaya. (K/HGM/H/UU/6/121)

Tokoh aku membaca koran tentang seorang sastrawan yang terkenal yakni Pramudya Anata Toer yang juga dikenal sebagai tokoh Lekra tersebut “disergap” oleh masyarakat. Kemudian pram dibawa oleh militer ke kodam V Djaya untuk ditahan. Pengategorian tahanan tidak memiliki indikator yang jelas. Dalam praktiknya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) syarat penuh dengan penyiksaan seperti yang dialami seorang komandan Cakrabirawa dalam kutipan di bawah ini.

“karena segala siksaan takkan bisa membuka mulut saya bayangkan ada. Saya masih ditindih ketika pengecut lain datang membawa seorang tawanan wanita. Ia sedang hamil dan katanya ia Gerwani. Saya harus melihat bagaimana ia ditelanjangi dari kakinya dibuka paksa, agar sangkur pada bayonet bisa dimasukkan ke kemaluannya. Saya lihat sangkur itu sudah berdarah ketika darah saya naik dan suatu kekuatan luar biasa mendadak merasuki saya, meja itu berhasil saya balik dan menyungkurkan empat pengecut yang sejak tadi onggang-oggang sambil tertawa-tawa”.

“Saya berdiri dan meninuju pemegang bayonet itu sampai pingsan. Wanita malang itu sudah sejak tadi pingsan. Saya kemudian taktahu apa yang terjadi karena sebuah pentungan dari belakang juga membuat saya pingsan... **(K/HGM/H/UU/10/62-63)**

Komandan KOPKAMTIB mengeluarkan sebuah dekrit yang menyatakan. Mereka telah terlibat dalam pengkhianatan G-30-S/PKI diklasifikasi sebagai berikut:

- A. Mereka secara jelas *terlibat langsung*
 - B. Orang-orang yang secara jelas *terlibat tidak langsung*
 - C. Orang-orang yang menunjukkan *indikasi atau yang bisa cukup diasumsikan memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung.*
- (IPT 1965, 2016, hal 245).

Berdasarkan dekrit tersebut bahwa tapol pertama yakni seorang pengurus Himpunan Sarjana Indonesia, masuk ke dalam kategori B dan diberangkatkan ke pulau Buru. Tapol tersebut masuk dalam kategori *terlibat tidak langsung* karena menjadi pengurus Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Serupa dengan organisasi-organisasi dianggap *terlibat tidak langsung* PR, BTI, GERWANI, PERHIMI, IPPI, CGMI, LEKRA, HIS. Seorang Pramodya Ananta Toer pun dikenai tuduhan yang sama karena bernaung dalam organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA). Selain itu tidak hanya organisasi-organisasi tersebut yang dimasukkan dalam kategori *terlibat tidak*

langsung, tapi juga terdapat dalam tubuh Angkatan Bersenjata. Seperti yang dialami Seorang komandan Cakrabirawa mengalami penyiksaan sebelum diberangkatkan ke Pulau Buru. Para intorgator tidak pernah berhasil membuat dia mengaku atau pura-pura mengaku.

Para komandan juga tidak diwajibkan melaporkan penangkapan-penangkapan itu ke pusat di Jakarta. Para tahanan ini bisa ditahan untuk waktu yang tak terbatas, bahkan samapai 10 tahun atau lebih. Sangat sedikit dari mereka yang diadili di pengadilan. Menurut Amnesty Internasional, “Dari ratusan ribu orang yang ditahan pada awal tahun 1977, pemerintah menyatakan telah mengadili 800 tahanan, jadi setahun kira-kira kurang lebih 100 kasus.” Akses ke pengadilan ini tertutup untuk ahli hukum asing. Publikasi resmi dari ABRI tahun 1995 mengatakan ada 1.887 tahanan kategori A, 1009 orang di antaranya diadili di beberapa tipe pengadilan dan 878 orang dipindahkan ke kategori B (tidak ada di antara mereka yang diadili di pengadilan). Sebagian besar kelompok ini dikirim ke pulau buru untuk kerja paksa. (IPT 1965, 2016, hal.252).

Menurut tapol HSI dalam cerita tersebut bahwa dirinya masih beruntung dari pada teman-temannya yang ditangkap dengan alasan yang tidak jelas serta tidak pernah diadili. Selain itu penahanan dalam kasus tersebut tidak memiliki batas waktu tertentu. Sedangkan bagi KOPKAMTIB tidak ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani kasus tahanan G30S. Hukum yang diterapkan pada tahanan lainnya adalah Penetapan Presiden No. 11/1963 tentang Antisubversi yang kemudian diratifikasi menjadi undang-undang pada 1969. Di bawah ketentuan UU ini (lihat terjamahan singkatnya dilampiran II) siapapun

repository.ub.ac.id

dapat ditahan hingga batas satu tahun tanpa persidangan. Masa penahanan dapat diperbarui tanpa batas. Pada tahun 1969 KOPKAMTIB mengeluarkan undang-undang No. 5/1969 yang memberi jaksa Agung kekuasaan untuk menahan terdakwa tanpa persidangan hingga waktu yang tak terbatas. Namun, tanpa undang-undang sekalipun pada 1965 dan setelahnya tidak ada formalitas ketentuan hukum, undang-undang atau dokumen apapun bagi tahanan G30S yang ditangkap. Surat penangkapan hanya dibuat (baca: dipalsukan) Jika tahanan akhirnya dibawa ke persidngnan karena pengadilan memerlukan dokumen tersebut. Kenyataanya, tidak banyak tahanan G30S yang diseret ke meja persidangan. (Southwood, 2013, hal.135)

Pengadilan-pengadilan G30S tidak dibentuk hanya untuk menjatuhkan hukuman. Rezim tidak membutuhkan pengadilan untuk menjalankan aksi pembantaian. Seperti apapun persidangan-persidangan G30S digelar, keputusan selalu terlebih dahulu ditetapkan di tempat lain lewat pembubaran PKI dan pembunuhan-pembunuhan massal. (Southwood, 2013, hal.159). Jadi, tidak ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani kasus tahanan G30S. Hukum yang diterapkan pada tahanan lainnya adalah Penetapan Presiden No. 11/1963 tentang Antisubversi. Siapapun dapat ditahan hingga batas satu tahun tanpa persidangan dengan undang-undang No. 5/1969. Selain itu, Pengategorian tahanan politik dalam praktiknya tidak memiliki dasar yang jelas dan sewenang-wenang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.2.3 TAP MPRS XXV Tahun 1966 (Pembubaran Partai dan Pelarangan Marxisme-Leninisme)

Melalui Tap MPRS XXV/1966, sejak saat itu PKI dibubarkan dan Marxisme-Leninisme dinyatakan sebagai ideologi terlarang. Selain itu, dengan keluarnya Tap MPRS XXV/1966 memiliki dampak lain, di antaranya penghapusan Marxisme dalam ajaran Marhaenisme. Serta digunakan untuk melarang organisasi massa yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Hal ini bisa dibuktikan dengan data di bawah ini.

Sidang paripurna MPRS kemaren dengan aklamasi telah menerima perumusan ketetapan MPRS yang dihasilkan oleh komisi C tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan dijatakn sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia serta pelarangan setiap kegiatan untuk menjebarkan atau mengembangkan paham atau adjaran komunisme/Marxisme-Leninisme diseluruh wilayah Indonesia. **(K/HGM/H/TAP/1/116)**

Tokoh aku membaca klipng koran milik kakaknya yang selama ini telah disimpannya. Seperti biasa tokoh aku membaca berita secara acak dan sesuka hati. Sudah hampir tiga puluh tahun berlalu sejak kakak perempuannya menghilang dan buku klipng itu dibawanya.

Pengurus pusat PMKRI, sehubungan dengan keputusan Penguas Perang Daerah Djakarta Raya, Maj.Djen. Umar Wirahadikusumah tentang pembekuan semua aktivitas orpol/ormas dalam "GESTAPU" jaitu PKI, PR, BTI, GERWANI, PERHIMI, IPPI, CGMI, LEKRA, HIS berpendapat bahwa keputusan tsb., memang merupakan suatu keputusan patriotik, jang harus disambut dengan peningkatan pengganjangan terhadap "GESTAPU" disegala bidang. **(K/HGM/H/TAP/3/214)**

Tokoh aku tidak tahu persis sudut pandang kaka perempuannya dalam menggunting koran berita-berita tersebut. Ketika tengah membaca tokoh aku teringat kakanya yang hilang pada waktu itu. Dia merasa sedih dan beranggapan mungkin saja kakaknya masih hidup, tetapi kakaknya sengaja melenyapkan diri. Kisah tentang bagaimana orang-orang dicituk sangat menghantui tokoh aku dan kemungkinan bisa terjadi pada kakaknya. Dia teringat bagaimana kakaknya menggunting dan menandai koran-koran tersebut dengan pensil merah. Berita tersebut berisi tentang pembubaran PKI dan organisas-organisasi lainnya dengan keluarnya Tap MPRS.

Pengurus Pusat PMKRI menuntut agar PPI, PPSMI, SOBSI dan baperki segera dibubarkan, karena berdasarkan fakta2 jang ada djelas sekali bahwa organisasi2 tsb, telah setjara aktif membantu gerakan kontra revolusi 30 September.

Pengurus Pusat PMKRI menegaskan bahwa adalah suatu konsekuensi revolusioner apabila demonstrasi2 dan massa aksi jg dilantjarkan rakjat Indonesia pada dewasa ini merupakan pukulan jang djitu terhadap kaum kontra revolusi 30 September dan madjikan2nya PKI serta ormas2nja. **(K/HGM/H/TAP/4/214)**

Pelarangan partai komunis seperti dalam berita termuat dalam Tap MPRS XXV tahun 1966. Kecocokan mengenai berita tersebut dapat dirujuk dalam pasal 1 seperti di bawah ini.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasinya yang seazas/ berlindung/ bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan

dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/S/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Sebelum munculnya pelarangan terhadap PKI melalui tap MPRS XXV, terlebih dahulu telah terjadi pembunuhan massal, penahanan, serta persekusi terhadap orang-orang yang dituduh menjadi anggota PKI. Hegemoni Orde Baru semakin kuat dengan adanya hukum yang melarang dan menyatakan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang beserta ajarannya. Ini berarti, semakin mudah menyingkirkan musuh politik dari rezim ini. Pelarangan partai komunis juga berarti meruntuhkan salah satu pilar Nasakom yakni Komunis dibawah pimpinan Soekarno. Salah satu dari tiga kekuatan politik yang memperkuat politik Soekarno telah dihancurkan, sehingga mengakibatkan kekuatan politik dan pamor Soekarno luruh perlahan. Maka dengan itu, berakhirilah era demokrasi terpimpin yang digadang-gadang oleh Soekarno.

TAP MPRS XXV tahun 1966 juga menjadi dasar pelarangan organisasi-organisasi yang dianggap menjadi *underbouw* PKI. Organisasi PR, BTI, GERWANI, PERHIMI, IPPI, CGMI, LEKRA, HIS yang dianggap belindung dibawah dan seazas dengan PKI akhirnya dibubarkan. Bahkan dalam data (K/HGM/H/TAP/4/214) pengurus PMKRI menuntut pembubaran PPI, PPSMI, SOBSI dan Baperki, karena menurut mereka bahwa organisasi-organisasi tersebut telah secara aktif membantu gerakan kontra revolusi 30 September. Terlebih, Gerwani yang selalu menjadi bahan propaganda kejahatan komunis karena terlibat dalam pembunuhan ke enam jendral. Organisasi-organisasi ini terkenal kritis dan sering melakukan aksi massa. Pelarangan terhadap organisasi-organisasi ini berarti

telah menutup saluran-saluran oposisi, serta kritik terhadap pemerintahan yang baru. Pada akhirnya, organisasi-organisasi ini juga tak luput dari persekusi dan serangan massa. Selain itu, pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme juga berarti juga membersihkan ajaran Marheanisme milik Soekarno yang terkandung di dalamnya.

Menurut Soekarno Marheanisme merupakan penerapan marxisme yang dicocokkan dengan keadaan Indonesia. Marhaenisme tanpa marxisme berarti telah kehilangan inti dari ajaran tersebut. Tetapi di tahun 1966, setelah kontra-revolusi mulai berkuasa, keluar Tap MPRS nomor XXV tentang pelarangan Marxisme. Juga Tap MPR XXVI/ MPRS/ 1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang berusaha membersihkan ajaran-ajaran Bung Karno dari marxisme. Kemudian, pada bulan Desember 1967, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwidjaja yang disokong rezim Orde Baru, membuat Pernyataan Kebulatan Tekad untuk membersihkan marhaenisme dari marxisme. Dan sejak itu marhaenisme di tangan PNI mulai kehilangan api-nya (Hartono, 2016, hal.14) Karena kepentingan yang sama, pemikiran Sukarno pun diobok-obok. Marxisme segera diceraikan dari Marhaenisme. Bahkan, kita tahu, nama Sukarno sendiri sampai dicabut sebagai bapak Marhaenisme. (Mastono, 2016, hal 13)

Munculnya Tap MPRS terlebih dahulu diawali dengan keluarnya surat perintah sebelas maret. Surat Perintah Sebelas Maret ini memperkuat hegemoni rezim Orde Baru karena memiliki kekuatan hukum (akan dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya).

Surat Perintah Sebelas Maret adalah fondasi awal kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Dengan manipulasi politik lewat Dekrit Presiden No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966, dengan dalih “atas perintah presiden”, Soeharto membubarkan PKI dan organisasi komunis lainnya (Caldwell dkk, 2011 hal.282).

Ketetapan ini kontradiktif karena Soekarno menginginkan Soeharto “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.” Dengan surat itu, Soeharto punya kuasa bertindak apa saja dalam pemulihan keamanan pasca Gerakan 30 September 1965. Jika dipahami, Supersemar sama sekali bukan surat pengalihan kekuasaan. Itu sebabnya Presiden Soekarno marah ketika Letjen Soeharto menggunakan Supersemar untuk membubarkan PKI. Keluarnya Tap MPRS XXV tahun 1966 berarti berlawanan dengan konstitusi UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat. Padahal, tidak ada larangan bagi setiap orang dalam menganut paham atau ajaran tertentu.

Sejalan dengan itu tokoh Islam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan pelarangan terhadap paham Komunisme dan Leninisme justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Kita harus mengacu kepada UUD 45. Karena UUD 45 memberikan kebebasan berfikir, berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat. Ini adalah hal-hal prinsipil yang harus digunakan dalam hidup berbangsa. Karena itu saya mengusulkan untuk mencabut TAP MPRS No. 25/MPRS/1966 yang memasung paham Marxisme dan Leninisme.” Jadi, Tap MPRS XXV tahun 1966 melarang partai komunis beserta paham Marxisme-Leninisme yang berimplikasi pada runtuhnya NASAKOM

karena kehilangan satu pilarnya, dibubarkannya organisasi-organisasi massa yang dianggap berafiliasi dengan PKI, serta peringkusan Marxisme dalam ajaran Marhaenisme milik Soekarno. Maka dengan itu pula berakhirilah Demokrasi terpimpin serta melemahnya kekuatan politik Soekarno beserta rezimnya.

4.2.4 SUPERSEMAR (Pembersihan Menteri-menteri Soekarno)

Supersemar juga dijadikan alat untuk menangkap menteri pendukung Sukarno menjelang lahirnya Orde Baru. Penangkapan sejumlah menteri merupakan langkah kedua setelah Soeharto menerima Supersemar. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan kutipan-kutipan di bawah ini.

Baru kusadari sekarang apa maksudnya kata “singkirkan” dalam syair lagu itu, yang ternyata berbalik menggulung para penganjurnya bagaikan air bah tak terbendung lagi. **(K/HGM/H/SS/3/211)**

Tokoh aku membaca kliping koran milik kakaknya, berita tersebut berisi tentang aktivis lekra yang dicari-cari yang juga merupakan pengarang lagu “nasakom bersatu”. Hal itu membawa ingatan pada masa kecilnya ketika dengan sekuat tenaga menyanyikan lagu tersebut. Ternyata syair yang berisikan “singkirkan” malah balik menggulung para penganjurnya yakni Soekarno.

ANGKATAN BERSENDJATA DEWI MEMBANTAH

Berhubungan dengan dimuatnja foto saja pada mingguan Angkatan Bersendjata tgl 10 April halaman satu, dengan tulisan di bawahnja Djuga simpanan JMD entah jg dirumahnjalah JMD didjemput Alat Negara dan diketemui uang tunai Rp. 2000,- (ub). Diatas foto tsb. Ditulis nama saja Dewi Roelyanti, maka dengan ini saja mengatakan bantahan dengan keras dan mohon agar di ralat. **(K/HGM/H/SS/2/116)**

Tokoh aku membaca koran yang berisi seorang perempuan yang bernama Dewi. Dewi membantah dan meminta agar berita tersebut diralat atas anggapan keterlibatannya dengan menteri Jusuf Muda Dalam. Berita ini menunjukkan adanya *blunder* yang dilakukan oleh berita Angkatan Bersendjata yang memperkuat berita-berita amoral tentang Jusuf Muda. Sandiwara persidangan menteri-menteri senior sukarno seperti Sobenariono, Jusuf Muda Dalam, dan Omar Dhani sama artinya dengan mengadili rezim Soekarno. Pengadilan-pengadilan ini mempertontonkan betapa Sukarno tidak layak menjadi Presiden karena telah membiarkan dirinya dipengaruhi penasihat-penasihat yang ‘terbukti’ tidak kompeten, korup; dan dalam beberapa kasus berada di belakang kudeta. (Southwood, 2013, hal.167)

Ban & J.M.D mulai sinting?

Djakarta, 27 april (AB)

Bekas Waperdam DR. Subandriono dan bekas Menteri Jusuf MD dan berapa bekas menteri lainja, ketjuali Ir. Surrachman dan Achadi jang belum tertangkap, telah dilakukan pemeriksaan jang teliti oleh team-pemeriksa dari ke-4 angkatan.

Keadaan “djiwa” Subandriono dan Jusuf MD sangat “berlainan”, mungkin karena pelajan2 “istimewanja” tidak berad disampingnja.

Sebagai reaksi dari “kechawatiran” sementara pemimpin2 terhadap oknum2 pedjabat jang tersangkut dalam G-30-S oleh Djendral Sujipto SH dikatakan, bahwa ABRI tidak akan membuat “Lubang Buaja ke-II” sebab ABRI berpegang pada adjaran2 Pantjasila. (K/HGM/H/SS/1/43)

Melalui kekuasaan penuh Soeharto melakukan penyingkiran dan pemenjaraan 21 menteri loyalis Sukarno. Berita tersebut memuat Waperdam DR. Subandriono dan bekas Menteri Jusuf MD dan berapa bekas menteri lainnya, serta Ir. Surrachman dan Achadi jang belum tertangkap. Sandiwara persidangan menetri-menteri senior sukarno seperti Sobenariono, Jusuf Muda Dalam, dan

Omar Dhani sama artinya dengan mengadili rezim Soekarno. Pengadilan-pengadilan ini mempertontonkan betapa Sukarno tidak layak menjadi Presiden karena telah membiarkan dirinya dipengaruhi penasihat-penasihat yang ‘terbukti’ tidak kompeten, korup; dan dalam beberapa kasus berada di belakang kudeta (Southwood, 2013, hal.167).

Surat Perintah 11 Maret dipergunakan untuk membersihkan para menteri Soekarno dan sekaligus menurunkan Soekarno sendiri dari jabatannya. Sebelumnya melakukan pelarangan partai komunis yang berarti meruntuhkan salah satu pilar Nasakom. Selain itu, pelarangan ajaran marxisme berarti juga membersihkan ajaran marhehinisme milik Soekarno yang terkandung di dalamnya.

Masyarakat tidak lagi bersifat kritis mempertanyakan misalnya, mengapa setelah berhasil menghancurkan kekuatan PKI melalui pembunuhan massal Soeharto masih sibuk menyingkirkan para pendukung bung karno meskipun mereka ini bukan komunis. Hal ini terlihat ketika pada april 1966 Soeharto mengeluarkan orang-orang yang pro Bung Karno di tubuh PNI, Divisi Diponegoro, dan DPR/MPR. (Wardaya, 2007, hal 28).

Banyak pihak lain juga menderita meski mereka tidak terkait dengan atau bersimpati terhadap PKI. Seiring dengan waktu, target pun meluas lebih jauh untuk mempersiapkan restrukturasi masyarakat di mana birokrat dan tentara dibersihkan dari orang kiri pada umumnya, termasuk banyak pendukung Presiden Soekarno dan anggota progresif PNI yang dalam banyak kasus juga menderita karena persekusi. (IPT 1965, 2016, hal.235).

PNI turut menjadi korban operasi intelijen dan politik yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. PNI yang beraliran nasionalisme-radikal ditangkap rezim militer. Terutama Ir. Surachman, yang kemudian dituduh sebagai anggota PKI yang menyusup ke dalam tubuh PNI. Tuduhan tersebut didasarkan pernyataan yang dibuat oleh PNI tentang Peristiwa Gestok. Ir. Surachman sebagai sekjen PNI mengeluarkan salah satu pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya memberikan penghargaan kepada prajurit yang telah menunjukkan kesetiaan mereka untuk menyelamatkan Bung Karno. Dengan dalih ini maka Ir. Surachman dianggap terlibat Gestok. Setelah menyerang PKI dan ormas-ormasnya, PNI Ali-Surachman juga terkena imbasnya. Istilah “PNI ASU” (PNI Ali Sastroamidjojo-Surachman) disematkan kepada partai dengan tujuan untuk menjatuhkan para pendukung Soekarno.

Soeharto memerintahkan operasi “pengamanan” dengan dalih keselamatan diri para menteri dari amukan demonstran. Dalam pidato yang disiarkan RRI, Soeharto menempatkan para menteri itu dalam tiga macam kategori. Pertama, para menteri memiliki hubungan dengan PKI atau G30S dengan indikasi yang cukup. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan. Dan ketiga, mereka yang hidup amoral dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. “Dapat dikatakan, semua ditahan karena kesungguhan mereka membantu presiden dan bukannya kegagalan mereka yang menyebabkan mereka ditangkap,” tulis Crouch dalam *Militer dan Politik di Indonesia*. “Semuanya, kelima belas orang itu, mendukung presiden dalam usahanya mengembalikan tentara di bawah kontrolnya.

Surat Perintah 11 Maret berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi (1) mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi; (2) mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya; (3) supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut di atas/

Presiden Sukarno sempat mengecam aksi Soeharto menggunakan Supersemar di luar kewenangan yang dia berikan. Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah), 17 Agustus 1966 menegaskan bahwa Supersemar bukanlah *transfer of sovereignty* dan bukan pula *transfer of authority* yang sama sekali bukan pengalihan kekuasaan. Selama persidangan G30S pers memainkan peran penting dalam rekayasa dan manipulasi peristiwa. Tidak semua persidangan diberi keistimewaan yang sama. Kenyataanya, sebagian besar persidangan diadakan tanpa pemberitahuan dan dengan sedikit publikasi. Meski demikian, cukup banyak persidangan besar yang dipaparkan pers secara terperinci, difilmkan, disiarkan di Radio Republik Indonesia (misalnya persidangan Soebandrio dan Jusuf Muda Dalam) atau

diperdengarkan kepada kerumunan massa di luar sidang—pengumuman vonis hukuman yang samar-samar dapat membuat jalannya persidangan yang lain kurang terpublikasi menjadi efektif. (Southwood, 2013, hal.114).

Seperti dalam data bahwa menteri Soebandriyono dan Jusuf Muda mendapat ekspos yang dipaparkan melalui pers. Koran di atas menunjukkan upaya ekspos terhadap menteri yang disidangkan di Mahmilub. Tuduhan di Mahmilub ini akan menunjukkan gagalnya rezim sebelumnya yakni rezim Soekarno dan pembenaran atas terjadinya pembunuhan massal. Penangkapan-penangkapan menteri tersebut dilakukan setelah adanya surat perintah sebelas maret. Jadi, Surat Perintah 11 Maret dipergunakan untuk membersihkan para menteri Soekarno. Beberapa menteri mendapatkan ekspos lebih dalam berita. Tidak hanya PKI saja yang terseret, tetapi juga para pendukung Soekarno termasuk PNI. Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk menarasikan bahwa Soekarno dipengaruhi penasihat-penasihat yang tidak kompeten, korup, dan terlibat dalam G30S, sekaligus membuktikan bahwa rezim tersebut dianggap telah gagal.

4.3 Legitimasi Kekuasaan Melalui Moral

Moral menjadi patokan nilai baik dan buruk dalam masyarakat. Moral memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia. Ia bisa menjadi senjata ampuh untuk mengalahkan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap musuh dari kekuasaan. Selanjutnya, akan dibahas kegunaan moral dalam praktik kekuasaan Orde Baru pada sub bab di bawah ini.

4.3.1 Moral perorangan

Pada bagian awal diceritakan bahwa tokoh aku sering bermain ke hutan bambu. Di dalam hutan bambu tersebut terdapat sebuah gundukan kecil dan sebelas kuburan orang jepang. Ternyata gundukan kecil itu adalah kuburan anak perempuan yang mati dibakar bersama keluarganya yang difitnah sebagai anggota Lekra, yang kemudian diceritakan tokoh aku menyaksikan secara langsung pembakaran rumah sebuah keluarga tersebut. Kesebelas kuburan orang jepang itu akhirnya dipindahkan ke negaranya. Namun, kuburan kecil itu tidak dipindahkan ke pemakaman umum. Maka dari itu kuburan tokoh saudara kembar tersebut tidak dipindahkan ke pemakaman umum melainkan dibiarkan saja seperti semula di hutan bambu yang terkenal angker.

“Bohong, tentu karena bukan orang jepang, kan? Meski tidak ada keluarganya kan boleh saja dipindah ke pemakaman umum?”
 “bapak tidak bohong, malah dia pesan agar dibawakan mainan. Tapi bapak nggak ngerti, mainan seperti apa yang dia mau”
 ...”kasihan juga pikirku” (K/HGM/M/MP/1/12)

Tentu saja ini berkaitan dengan moral, bahwa .sampai jadi mayat pun orang PKI tidak akan diterima oleh masyarakat. Maka kuburan tersebut dibiarkan saja berada disitu dan tidak dipindahkan ke pemakaman umum atau tempat yang lebih layak lainnya. Adanya kontruksi moral yang telah dibangun oleh rezim Orde Baru melalui wacana anti komunisme membuat seorang yang dianggap PKI adalah seorang yang biadab dan tak pantas untuk hidup.

Apakah yang akan dialami seorang yang seolah-olah akan hidup terus dengan gambar palu arit di jidatnya? Berita itu ku baca dari koran tanggal 9 bulan Desember 1965. Dia akan berusia 40 tahun lebih sekarang. (K/HGM/M/MP/3/157)

Jika dengan menjadi seorang PKI atau orang yang terduga PKI, maka konstruksi moral yang dibuat seolah-olah akan hidup terus dengan gambar palu arit dijidatnya. Konstruksi moral yang dibuat juga menguatkan bahwa dengan menjadi seorang atau yang dituduh sebagai PKI maka akan masuk neraka dan menjadi seorang yang sungguh biadab.

Empat manusia yang telah dicituk empat belas tahun. Mereka saling berpandangan. Tidak seorang pun sanak saudara menjemput mereka. (K/HGM/M/MP/2/61)

Hal ini juga dialami para tapol yang telah bebas selama beberapa tahun ditahan. Para tapol hidup sebatangkara dan tidak seorang pun menjemput mereka. Mereka telah mengalami penderitaan yang panjang di dalam tahanan, dan setelah keluar juga mendapat pengasingan dari keluarga sendiri dan juga masyarakat. Jadi, derita seorang tapol berlipat ganda karena setelah mendapat persekusi, siksaan, hukuman penjara, serta pencabutan hak-hak kewarganegaraannya, maka masih harus menerima stigma serta pengucilan ketika mereka semua kembali ke masyarakat.

4.3.2 Moral Keluarga

Menjadi anggota keluarga bagi seorang yang dianggap PKI adalah hal yang tidak mudah. Selain mendapat ancaman mendapat persekusi juga dianggap memiliki moral yang buruk hingga diasingkan dari masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dalam kutipan-kutipan di bawah ini.

“... Istri saya yang cantik dan sangat saya cintai. Semenjak saya ditangkap ia langsung melenyapkan diri, melenyapkan identitasnya sebagai istri saya...ia mengganti namanya. Tidak memberitahukan keberadaan saya kepada anak saya yang masih terlalu kecil. Putus-Hubungan sama sekali...dengar dari keluarganya...saya sebelum diberangkatkan ke Pulau

Buru...ia menikah lagi. Saya tidak menyalahkan orang menjadi takut, sampai mengganti nama sendiri... **(K/HGM/M/MK/3/65)**

Tokoh aku karena memiliki ikatan emosional dengan para tapol, akhirnya mendatangi pelepasan tapol dan menampung mereka untuk sementara waktu. Ketika dalam penampungan itu tokoh aku menadapat beberapa cerita mengenai penyiksaan, pembunuhan massal, dan cerita tentang keluarga tapol. Salah seorang tapol bercerita, sebelum dirinya menjadi tapol ia adalah seorah pengurus Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) dan ia akhirnya ditangkap ketika kembali ke negeri. Ia menceritakan tentang keadaan istrinya setelah ia ditangkap.

Dengan tewasnya kedua orangtua dan kembarannya, sementara segenap dokumen terbakar bersama rumahnya, tiada sanak saudara...takut mengaku sebagai sanak saudara keluarga itu—keluarga yang rumahnya dikepung orang banyak sembari berteriak “ganyang!” bukanlah jenis keluarga yang mudah diakui sebagai sanak keluarga tanpa resiko diperlakukan sama. **(K/HGM/M/MK/2/46)**

Sama halnya dengan keluarga tokoh wanita gila yang saudaranya mati terbakar, keluarga lainnya juga enggan mengakui sebagai sanak saudara karena akan mendapat resiko perlakuan yang serupa.

Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka yang harus mengalami pengasingan masyarakat sebagai anak PKI. Pengasingan yang sungguh-sungguh tidak adil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. **(K/HGM/M/MK/4/212)**

Tokoh aku membaca berita tentang seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Tokoh aku membayangkan bagaimana kehidupan anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang dianggap sebagai anggota PKI. Moral seperti rantai yang mengikat tidak hanya pelaku tapi sekelilingnya, termasuk, istri, keluarga sekitarnya. Seperti halnya moral, bagaimana jika seorang anggota/simpatisan PKI

atau bahkan hanya orang yang diduga secara moral dianggap seorang yang biadab. Maka tidak hanya orang tersebut melainkan seluruh keluarga yang dikenalnya akan dipukul rata dan dianggap akan bermoral sama. Maka tak jarang orang akan melakukan pengasingan. Bahkan pemutusan rantai keluarga untuk terbebas dari moral yang dianggap biadab tersebut.

Melalui wacana anti komunisme yang disebarluaskan oleh pers tentang kebiadaban anggota PKI maka moral juga ikut melekat di sana. Hal ini yang ditunjukkan oleh rezim orde Baru bahwa PKI biadab dan militer adalah pahlawan yang berpegang teguh pada ajaran pancasila—maka dianggap benar, secara moral. Moral dibentuk oleh penguasa sesuai dengan tujuan kekuasaannya untuk mendapatkan legitimasi serta mengelabui masyarakat. Moral dibentuk pada tataran kekuasaan negara yang secara tidak langsung, nilai-nilai tersebut telah diserap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap benar. Bahkan kegiatan membunuh akan bermoral baik jika yang dibunuhnya adalah anggota PKI. Penderitaan seorang yang diduga PKI akan berlipat ganda, setelah tidak diakui oleh negara, dan hak-haknya dicabut, masih juga mendapat diskriminatif dari masyarakat atas stigma yang melekat pada dirinya yang telah dibuat dan dibentuk oleh negara.

Tetapi yang terpenting peristiwa 1965-1966 telah menghancurkan kehidupan jutaan orang yang secara resmi mendapat stigma karena keterkaitan keluarga atau lainnya dengan mereka yang dibunuh atau ditahan secara sewenang-wenang. (Robinson, 2018, hal.2)

Seperti yang dialami oleh seorang anggota Gerwani yang tidak tahu menahu ketika meletusnya peristiwa G30S bernama Sulami. Ia sempat menjadi buron dan akhirnya mengalami masa penahanan yang lama yakni dua puluh tahun. Selain itu Ibu Sulami harus mengalami berbagai siksaan, dipaksa untuk menjadi saksi palsu dalam persidangan, dan membuat kesaksian-kesaksian palsu di bawah ancaman. Selama dalam penjara dia menceritakan para perempuan-perempuan yang ada dalam penjara.

Keluarga saya yang tak tahu-menahu tentang persoalan saya telah lama ditahan dan dipecat dari pekerjaannya. Ibu saya yang tinggal jauh di desa pun selalu menghadapi ancaman dan ejekan. (Sulami, 1999, hal.10). Yang paling jahat dan sadis ialah bahwa semua orang itu dinyatakan sebagai anggota Gerwani yang amoral di Lobang Buaya, dan itu diberitakan dalam surat-surat kabar di Jakarta. Surat kabar “Angkatan Bersenjata” tiap hari mengobral kebohongan untuk membakar kemarahan rakyat Indonesia. Gerwani dijuluki Dajal, hingga dimusuhi oleh siapa saja yang termakan berita fitnah itu. (Sulami, 1999, hal.45). Orang takkan mengerti, bahwa rekaman film video yang mempertunjukkan “tari genjer-genjer di tengah kehidupan porno” yang diperlihatkan dalam sebuah sidang Mahmilub di Jakarta untuk mengadili seorang penting itu adalah buatab Bukit Duri. Petugas yang beringas telah berhasil menggiring para tapol muda untuk menari-nari di aula penjara, dan itulah yang disiarkan oleh semua koran di Jakarta seolah terjadi di Lobang Buaya.

Sungguh kejam dan sadis pembuat video itu. Dan yang menerina akibatnya bukan orang-orang yang bersangkutan atau mempunyai masalah politik

besardengannya, melainkan rakyat yang tak berdosa dan tak ada urusan sama sekali dengan Lobang Buaya. (Sulami, 1999, hal.61).

Kalau yang ditahan hanya bapak atau ibu, masih lumayan kalau keduanya, hancurlah segalanya. Anak-anak dikeluarkan dari sekolah, yang tidak dikeluarkan diejek-ejek dari kanan dan kiri. Padahal orang tua mereka itu tak ada urusan dengan yang namanya G30S atau Lobang Buaya. Itu adalah urusan orang-orang tertentu saja, orang-orang atasan. Bukan urusan seluruh rakyat Indonesia atau urusan orang-orang bawahan. (Sulami, 1999, hal.90).

Tapi berapa banyaknya anak tapol menjadi korban kejadian yang tak bisa dipahami itu. Hanya akal budi manusialah yang mampu mengangkat anak-anak itu, hingga mereka bisa makan, minum, berpakaian, menjaga kesehatan, dan terus bersekolah. Hanya akal manusia juga yang menyebabkan mereka akhirnya dapat meraih gelar kesarjanaan atau menjadi penguasa yang berhasil, dan hidup layak sebagaimana manusia-manusia lain, walau itu harus ditebus dengan menjadi tukang becak, tukang bangunan, pedagang kecil dan sebagainya. (Sulami, 1999, hal.90). Jadi, moral memainkan peran yang penting dalam melakukan hegemoni. Moral bagaikan mata rantai yang tak terpisahkan. Jika seorang anggota keluarga mendapatkan moral yang buruk maka keluarga yang lain juga ikut menjadi korban. Moral sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi patokan nilai baik dan buruk seseorang dalam masyarakat, ternyata moral tak luput dimainkan oleh rezim sebagai suatu alat legitimasi sesuai dengan kepentingan rezim. Hegemoni semakin kuat setelah munculnya propaganda dan hukum terlebih dahulu sebagai legitimasi. Sehingga moral menjadi pelengkap yang kuat dalam menyempurnakan hegemoni.

4.3.3 Moral Masyarakat

Masyarakat dikonstruksikan sebagai masyarakat yang memiliki budaya amuk. Justru masyarakat dikonstruksikan untuk melakukan amuk dengan adanya propaganda-propaganda yang disebarkan oleh Orde Baru. Stigma PKI yang ateis dan amoral, serta konflik-konflik yang telah ada jauh sebelum G30S, diangkat kembali dan diperkuat secara terus menerus melalui propaganda-propaganda tersebut. Moral masyarakat dikonstruksikan sebagai masyarakat yang senang dengan kekerasan. Hal tersebut bisa dibuktikan dalam data di bawah ini.

Nafasnya memburu, tubuhnya berkeringat, dan ia sudah terpojok. Orang-orang yang memburu masuk kelas membawa pentungan, golok, dan celurit.
(K/HGM/M/MM/1/19)

Massa merangsek ke dalam kelas dengan membawa pentungan, golok, dan celurit. Massa meringkus seorang pemuda rakyat yang terjebak dengan memukulnya tepat di kepala hingga berdarah dan jatuh ke lantai. Lalu massa menyeretnya ke luar, sedangkan diluar sudah banyak orang di lempar ke dalam truk. Tokoh aku bertanya-tanya apakah hal tersebut lumrah terjadi di dalam dunia orang dewasa.

Hampir semua cerita tentang pencidukan kudengar. Namun suatu hari kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri pencidukan pada siang bolong, yang tidak mirip dengan pencidukan sama sekali.

Pulang sekolah kulihat orang-orang mengepung rumah yang terbakar. Orang-orang berteriak
"PKI! Keluar!"...

(K/HGM/M/MM/5/24)

Tokoh aku sering mendengar istilah ciduk, hingga pada akhirnya melihat langsung pencidukan yang tidak mirip dengan pencidukan sama sekali. Tokoh aku melihat pembakaran rumah oleh massa yang marah. Terdapat satu keluarga di dalamnya yang mendapat fitnah bahwa seorang ayah dari keluarga tersebut telah mengajarkan lagu genjer-genjer terhadap anak-anak.

Rezim Orde baru meligitimasi bahwa masyarakat memiliki budaya amuk. Rezim Orde Baru menarasikan bahwa yang terjadi di masyarakat merupakan spontanitas dan respon atas terjadinya peristiwa G30S.

Interpretasi paling awet bertahan mengatakan bahwa pembunuhan berakar dari pola budaya eksotis seperti “amuk”. Sebuah artikel dalam majalah *Time* pada pertengahan 1966 adalah contohnya yang khas: “Amuk adalah kata bahasa Jawa dan ini menjelaskan apa yang terjadi setelah gagalnya kudeta komunis. Dalam ledakan kebencian terpendam secara nasional, Indonesia dengan suka ria melakukan pembantaian yang memakan korban jiwa lebih banyak daripada yang pernah diderita oleh AS dalam semua perang di abad ini” (Robinson, 2018, hal.13)

Penjelasan semacam ini disukai oleh para pejabat Indonesia dengan sekutu-sekutu dekatnya, tetapi umumnya tidak dianggap serius oleh para cendekiawan—atau setidaknya tidak seharusnya demikian. Sebab hal itu sangat reduksionisme budaya yang bermasalah. Selain juga suatu cara mencurangi pertanyaan vital yang bertanggung jawab. Bahkan fakta tersebut tidak sesuai dengan fakta paling mendasar dalam kasus ini. Lagi pula pernyataan semacam ini tidak memberikan penjelasan atas rencana penahanan massal sewenang-wenang yang berlangsung lebih dari satu dekade. (Robinson, 2018, hal.13)

Penggambaran kelompok sasaran sebagai yang lebih rendah dari manusia, mengancam, berbahaya, amoral, atau bejat secara seksual—bersama dengan hasutan secara tersurat maupun tersirat untuk melakukan kekerasan terhadap anggota kelompok tersebut. Otomatis dengan dihilangkannya kendali moral

terhadap tindakan kekerasan, maka representasi semacam itu membantu membentuk kesepakatan sosial atau setidaknya kepatuhan populer yang merupakan komponen penting kekerasan massal. (Robinson, 2018, hal.19). Jadi, moral masyarakat dikonstruksikan untuk melakukan kekerasan massal. Rezim Orde Baru menghilangkan kendali moral terhadap tindak kekerasan dengan propaganda-propaganda kejahatan komunis.

4.4 Simbol Sebagai Legitimasi Kekuasaan

Simbol-simbol yang diproduksi atau yang telah ada digunakan untuk menciptakan, merawat, mengubah nilai moral. Menurut Bourdieu Simbol adalah instrumen *par excellence* untuk menciptakan "integrasi sosial": sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi...integrasi logika adalah syarat bagi integrasi "moral" (dalam Herlambang, 2013, hal.39). Selanjutnya, akan dibahas kegunaan simbol dalam praktik kekuasaan Orde Baru pada sub bab di bawah ini.

4.4.1 Segala yang Berhubungan dengan PKI Haram

Simbol-simbol juga mengandung moral, moral yang dibentuk oleh kelompok tertentu dan disebarluaskan untuk seluruh kelompok untuk mendapatkan legitimasi. Simbol-simbol yang berasosiasi dengan PKI maka dianggap buruk. Hal ini bisa dibuktikan dalam data di bawah ini.

Namun semenjak berlangsung pencidukan di mana-mana, sekarang kami mempunyai gambar lain; itulah simbol bergambar belati pasukan komando baret merah yang menjadi pujaan dimana-mana. Setelah beberapa bulan aku pun bosan dan suatu kali menggambar yang lain: yakni lambang palu arit. (K/HGM/S/HR/1/22)

Selama masa pencidukan, anak-anak mempunyai gambar lain selain gambar pemandangan sawah dengan dua gunung, yakni gambar belati pasukan komando baret merah. Tokoh aku merasa bosan setelah satu bulan menggambar belati pasukan komando baret merah. Suatu kali tokoh aku menggambar yang lain yakni lambang palu arit. Belum selesai menggambar seorang temannya berteriak bahwa dia telah menggambar palu arit. Setelah itu teman-temannya menegerumuninya dan menyainya “bapakmu PKI ya?”. Meskipun sering mendengar istilah PKI tapi tokoh aku tidak tahu apa hubungan gambar palu arit dengan PKI. Suatu hari pernah ia dengar seorang temannya tidak masuk sekolah lagi karena bapaknya PKI.

“kamu lihat gambar seperti ini dari mana?”

“Perangko”

“Ya perangko CCCP, pak “

“CCCP? Apa itu?”

“Perangko soviet pak”...

(K/HGM/S/HR/2/23)

Gambar itu membuatnya mendapat persoalan besar dengan bapak guru yang wajahnya risau. Lalu teman-temannya menyarakinya “Anak PKI! Anak PKI!”. Tokoh aku mendapat gambar tersebut dari perangko CCCP, perangko soviet, karena dia suka mengoleksi perangko. Persoalan selesai sampai situ, dan tokoh aku baru mengetahui betapa gawatnya dan nyaris sebetulnya keadaan semacam itu bagi keluarganya. Bahwa palu arit diasosiasikan dengan PKI, representasi dari logo partai yang dilarang tersebut, dan PKI adalah sesuatu yang buruk atau biadab. Sedang belati pasukan baret merah adalah simbol militer yang dianggap penyelamat negara dari komunis, maka itu dianggap baik.

Seperti halnya lagu genjer-genjer yang diidentikan dengan PKI. Seorang telah memfitnah keluarga tokoh wanita gila bahwa ayahnya adalah bagian dari anggota Lekra yang mengajarkan anak-anak lagu genjer-genjer.

Bagaimanakah orang banyak bisa berkumpul di depan rumah yang kemudian akan dibakar itu? Seseorang telah melakukan fitnah kepada ayahnya, yang sehari-harinya hidup mengajar anak-anak bermain musik. “Dia anggota Lekra dan dia mengajar anak-anak menyanyikan lagu genjer-genjer” (K/HGM/S/HR/3/126)

Sejarah kelim Genjer-Genjer bisa dikatakan berlangsung seiring dengan proyek mitologi komunisme yang dibangun rezim Orde Baru. Melalui media massa, Orde Baru sukses melakukan manuver politik dan sekaligus membangun wacana tandingan untuk menumbangkan ideologi komunis di Indonesia. Titik puncak yang signifikan untuk menunjukkan proyek ini masih menjadi skala prioritas Orde Baru yaitu ketika film “Pengkhianatan G30S/PKI” dirilis oleh pemerintah tahun 1984. (Parlindungan 2014, hal.238).

Pelarangan yang tak resmi itu disebabkan karena Genjer-Genjer dianggap sebagai lagu yang mengandung isyarat rencana pemberontakan pagi buta pada 1 Oktober 1965. Bahkan di salah satu koran yang meliput peristiwa itu menyebutkan penemuan notasi lagu Genjer-Genjer di area Lubang Buaya. Indikasi ini semakin diperkuat oleh pers Orde Baru, karena baris kedua bait awal syair lagu yang berbunyi “neng kedhokan pating keleler/di petak sawah berhamparan” diplesetkan menjadi “esuk-esuk pating keleler/di pagi buta berhamparan” (Hersri, 2003, hal.92).

Di era pemerintahan Soekarno, Genjer-genjer adalah lagu populer seperti lagu-lagu populer lain yang seangkatan. Genjer-genjer lahir dari rahim kesenian

Gandrung. Genjer-Genjer biasa dinyanyikan dalam kesenian gandrung sebagai representasi identitas masyarakat suku *Osing*. Penciptanya adalah M. Arief, seorang musisi *Osing* terkenal asal Banyuwangi. Genjer-Genjer tercipta ketika Banyuwangi di bawah penjajahan Jepang tahun 1942. Genjer-Genjer difungsikan sebagai media kritik atas penjajahan. Setelah terbebas dari Jepang tahun 1945, M. Arief bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Genjer-Genjer dipergunakan untuk kepentingan politik, lagu Genjer-Genjer dipopulerkan oleh PKI. Selanjutnya pada tahun 1963, lagu Genjer-Genjer memasuki babak baru ketika diperdengarkan secara intensif melalui siaran RRI dan TVRI. Bahkan berkumandang di setiap kegiatan yang melibatkan anggota dan simpatisan PKI. Tak terkecuali PKI yang terbilang partai komunis terbesar nomor tiga dunia dan partai pemenang pemilu urutan keempat saat itu. Di tangan PKI lagu Genjer-Genjer menjadi semakin populer. Pada tahun 1963, Genjer- Genjer telah diperdengarkan melalui siaran RRI maupun tayangan di TVRI. Namun, Setelah G30S meletus, lagu Genjer-Genjer dilarang oleh pers Orde Baru karena konon lagu tersebut dijadikan lagu dalam ritual pembantaian enam Jenderal dan seorang Ajudan di Lubang Buaya. Serta film yang diproduksi oleh rezim Orde Baru menampilkan visualisasi pembantaian para jenderal diselingi dengan lagu Genjer-Genjer. Lagu itu dinyanyikan Gerwani dan Pemuda Rakyat dengan iringan tarian striptease “Harum Bunga”.

Memang Orde Baru tidak melakukan pelarangan secara resmi lagu Genjer-Genjer. Namun, kasus penangkapan di beberapa daerah juga melibatkan orang-orang yang dituduh komunis, karena menyanyikan lagu Genjer-Genjer. Jadi, hal-

hal yang berkaitan dengan PKI yang bentuknya mirip maupun serupa menjadi terlarang. Simbol palu-arit dan lagu genjer-genjer diklaim sebagai representasi dari partai tersebut. Atribut-atribut yang berkaitan dengan PKI telah mendapat stigma, secara tidak langsung masyarakat yang menggunakan atribut-atribut tersebut dianggap sebagai anggota atau dianggap menganut ajaran komunisme.

4.4.2 Pengkultusan

Tokoh aku membaca berita mengenai para jenderal yang tewas di dalam lubang buaya. Ternyata di dekat sumur tersebut ditemukan tujuh buah durian yang dianggap sebagai representasi atau pertanda dari tujuh jenderal yang tewas.

Menurut Bridgen Hartono, sumur maut tsb, kini telah dipagari dan diberi atap. Rumah2 sekitarnya, bekas tempat penjemputan djenderal2 sebelum dibunuh, tetap dirawat sebagai mana adnja untuk dijadikan pengisi monumen, sedang 7 buah durian jang kedapatan pada sebuah pohon durian jang tumbuh di samping sumur maut itu, kini telah diawetkan di lembaga pertanian bogor. (K/HGM/S/PK/7/41)

Tidak melulu hal yang besar, tetapi hal-hal kecil bahkan dicontohkan dalam kasus ini adalah “ 7 buah durian” mampu memainkan manipulasi psikologis dengan mengultuskannya menjadi alat legitimasi atas peristiwa yang terjadi.

Berita ini kubaca samapai habis. Lucu sih, Ada durian di awetkan segala, Rugi dong. Padahal ada tujuh buah! Mengapa tidak dimakan saja? Hehe. Aku pikir agak keterlaluhan kalau tujuh durian itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali para korban. (K/HGM/S/PK/8/41)

Maka tokoh aku menanggapi berita tersebut dengan respon yang lucu sebagai anak kecil, tapi sekaligus satir. Terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dipergunakan untuk mendukung mitos-mitos yang dibangun oleh Orde Baru tentang peristiwa G30S. Seolah-olah tujuh buah durian itu merupakan pertanda

atau sebuah peringatan atas kematian tujuh orang yang berada dalam Lubang Buaya, yakni enam orang Jedral dan satu orang ajudan.

Selain itu, Adanya proyek mitologi secara kultural bahwa tempat-tempat yang menjadi kuburan seorang yang dianggap sebagai PKI dinarasikan sebagai sebuah tempat yang angker yang jarang dijamah oleh orang. Tempat-tempat menjadi ladang pembantaian, tempat esekusi, ataupun kuburan-kuburan

Padahal di dalam hutan bambu itu hanya terdapat kuburan .ada dua belas kuburan di sana, sebelas kuburan tentara jepang dan satu kuburan anak kecil yang bisa diduga dari ukurannya yang juga kecil. **(K/HGM/S/PK/1/3-4)**

Pada awal diceritakan terdapat hutan bambu yang sering didatangi oleh tokoh aku. Di sana dia menemukan ada sebelas kuburan jepang dan satu kuburan kecil bernisan. Selain itu Di hutan bambu terdapat empang yang airnya tidak mengalir. Orang-orang sekitar menyebut tempat itu angker.

Air empang itu begitu keruh dan karena itu menjadi jarang dijamah, tidak aneh jika kemudian disebut sebagai tempat yang angker. **(K/HGM/S/PK /4/11)**

Kata Pak Ranuwisid, ia sering mendengar lolong panjang seorang gadis kecil, yang sepertinya minta diberikan sesuatu dari balik tempat yang disebut angker itu. **(K/HGM/S/PK /5/11)**

Pada hutan bambu itu tokoh aku bertemu dengan sosok gadis kecil yang kuburannya berupa gundukan kecil dengan nisan tanpa nama. Gadis kecil tersebut merupakan korban pencidukan sebuah keluarga yang dianggap sebagai PKI. Sebuah pencidukan yang tidak seperti pencidukan yang dilihat oleh tokoh aku ketika sepulang sekolah dengan orang-orang berkerumun di sekitar rumah yang dibakar.

Inilah kuburan tanpa peziarah seolah-olah memang sudah tak terhubung lagi dengan dunia ini...selain ukuran yang menandakan seorang anaklah

yang termakamkan dalam kuburan—barangkali seorang anak kecil perempuan. (K/HGM/S/PK/2/7)

Jadi, telah terjadi pengkultusan terhadap benda-benda yang mendukung cerita tentang kematian para jendral yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali, dan juga pengkultusan terhadap tempat kuburan orang-orang komunis yang memiliki konotasi negatif.

4.4.3 Legitimasi Melalui Monumen

Monumen secara fisik (besar) dan dampaknya besar pula sebagai alat legitimasi. Monumen didirikan untuk meligitimasi apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Monumen dibangun berdasarkan fakta-fakta sejarah yang di buat oleh penguasa. Melalui fakta-fakta tersebut penguasa membuat kelompok-kelompok, kategori-kategori berdasarkan kriteria yang dikehendaki. Hal ini bisa dibuktikan dalam kutipan di bawah ini.

Dalam waktu singkat sumur maut itu serta tanah daerah lubang buaya di Pondok Gede dekat lapangan terbang Halim Perdanakusuma itu akan dibeli oleh Angkatan Darat untuk dijadikan daerah Monumen TNI Angkatan Darat. (K/HGM/S/MN/2/41)

Tokoh aku membaca koran dari kliping kakaknya yang berisi tentang sumur bekas ditemukannya mayat para jendral akan digunakan sebagai sebuah monumen. Versi resmi peristiwa tersebut terus digambarkan secara aktif selama periode Orde Baru, dan masih bertahan hingga saat ini. Pada tahun 1973 kompleks monumen di Lubang Buaya yang menampilkan mural yang menggambarkan kekejaman dengan detail jelas dibuka untuk umum. (IPT 1965, 2016, hal.278).

Pada tahun 1991 Pusat sejarah angkatan bersenjata menambahkan diorama representasi yang lebih jelas tentang penyiksaan para perwira di kompleks monumen Lubang Buaya. (IPT 1965, 2016, hal.278).

Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, folklor agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan karya sastra (Herlambang, 2013, hal.5). Jadi, monumen menjadi alat legitimasi secara fisik (besar) dan dibangun melalui fakta sejarah resmi versi rezim yang di dalamnya memuat kekejaman untuk memunculkan sentimen terhadap komunisme.

4.4.4 Legitimasi Melalui Sekolah

Tokoh aku mendapat kesadaran bahwa selama ini orang-orang telah salah memandang peristiwa pencidukan dan sejarah yang dipelajari di dalam kelas. Ternyata sejarah yang dibaca banyak memuat kebohongan.

Berapa lama kami menjadi buta dalam memandang orang-orang yang dicituk? Berapa lama kami semua, anak-anak kecil yang tidak terdidik di sekolah dengan mestinya mengira berapa orang-orang yang dicituk memang pantas dicituk? Berapa lama kami semua mendapatkan pelajaran sejarah yang ternyata kini hanya bisa dibaca sebagai pelajaran cara berbohong? Aku masih saja membaca. (K/HGM/S/SK/1/159)

Sekolah adalah sebuah lembaga yang menjadi alat dan kepanjangan tangan bagi suatu kekuasaan untuk menanamkan sesuatu. Melalui sejarah tentunya, kisah-kisah tentang pembunuhan para jenderal diajarkan. Sejarah yang diajarkan tersebut membentuk sikap, serta cara pandang terhadap kejadian tersebut.

Pada Desember 1965, ketika PKI, para pengikutnya, mau pun orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan dibantai oleh militer dan sekutu sipil mereka,

Nugroho Noto Susanto, Sejarawan UI yang menjabat Kepala Pusat Sejarah ABRI sejak 1964, menulis tentang percobaan kup 30 September 1965 versi militer. Versi ini yang kemudian menjadi versi Orde Baru dan memungkinkan terbentuknya ideologi anti komunis dalam praktik politik dan kebudayaan hingga puluhan tahun sesudahnya. (Herlambang, 2013, hal.137). Dari buku itulah sejarah resmi versi Orde Baru diajarkan di seluruh negeri melalui pelajaran Sejarah.

Ada dua hal yang mendasar menurut Gramsci biang keladinya, yaitu pendidikan di satu pihak dan mekanisme kelembagaan di lain pihak. Untuk itu gramsci mengatakan (dalam Hendarto, 1993, hal.82) bahwa pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah, Gereja, partai-partai politik, media massa dan ebagainnya) menjadi “tangan-tangan” kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis itu. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitasnya maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan. (Arief dan Patria, 2015, hal.127)

Tokoh aku belajar dari klipng-kliping kakanya yang selalu dia baca sampai ketika ia berada di dalam penjara. Selain itu tokoh aku belajar atas pengalaman-pengalaman menyeramkan yang dia alami. Cerita-cerita dari para mantan tapol yang mendapat siksaan, pengasingan, dan perampasan hak hidupnya membuat tokoh aku sadar atas kejadian-kejadian yang dialami saat itu. Selain itu hal ini juga didorong rasa ingin tahu tokoh aku dalam memahami kejadian tersebut. Sehingga

tokoh aku mendapatkan kesadaran dan sikap kritis dalam memahami kejadian tersebut. Jadi, sekolah menjadi kepanjangan tangan dari rezim serbagai sarana untuk menyampaikan sejarah resmi yang diterima sebagai kebenaran mutlak. Ternyata sejarah telah menyimpan banyak kebohongan, dan kebohongan-kebohongan tersebut dapat diungkap dengan adanya kesadaran-kesadaran. Sehingga munculnya kesadaran dapat melepaskan seseorang dari hegemoni yang menyelubungi selama ini.



BAB V

PENUTUP

Pada bab V ini akan dipaparkan (1) simpulan dari hasil analisis penelitian, dan (2) saran keberlanjutan penelitian untuk direalisasikan berbagai pihak.

5.1 Simpulan

Hegemoni Orde Baru belum runtuh sepenuhnya meskipun rezim tersebut sudah tumbang. Hegemoni Orde Baru dibangun selama waktu yang cukup lama yakni 32 tahun. Selama itulah Orde Baru menggunakan propaganda-propaganda melalui bahasa, pers, undang-undang, moral, serta simbol untuk melegitimasi kekuasaannya.

Hegemoni yang paling kentara dalam novel ini adalah hegemoni terhadap orang-orang yang dianggap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia. Bahkan orang-orang yang dicurigai atau menjadi simpatisan partai tersebut, serta orang-orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Tidak hanya itu, dengan adanya hegemoni Orde Baru, maka sedikit demi sedikit dan bertahap, rezim ini mendapatkan kekuasaannya hingga meruntuhkan rezim sebelumnya yakni rezim Orde Lama.

Warisan hegemoni Orde Baru yang masih terasa dan menjadi alat politis adalah phobia terhadap komunisme. Komunisme sampai saat ini, menjadi isu yang terus dirawat sejak zaman Orde Baru. Komunisme merupakan isu yang terus muncul di tengah masyarakat. Bahkan digunakan sebagai kambing hitam untuk menyerang musuh politik. Atribut yang berbau dengan partai tersebut juga



menjadi terlarang. Simbol-simbol yang berasosiasi dengan PKI maka dianggap buruk. Seperti halnya lambang palu arit dan lagu genjer-genjer yang diidentikan dengan PKI. Tuduhan menyebarkan ajaran komunisme Marxisme-Leninisme juga masih banyak muncul di masyarakat. Hal ini tidak luput dari proses hegemoni yang dibentuk oleh Orde Baru.

Hegemoni dimulai dengan penggunaan bahasa melalui propaganda-propaganda yang ada dalam pers untuk membuat sesuatu kebenaran versi rezim. Hegemoni berkembang lagi dan diperkuat secara hukum dan disahkan oleh negara dengan adanya peraturan-peraturan secara resmi. Moral dan simbol merupakan hal yang paling dekat dan melekat dengan masyarakat menjadi bagian penyempurna hegemoni. Maka secara urut, Orde Baru menggunakan pers sebagai kekuatan awal hegemoninya.

Pers memegang peran penting dalam melanggengkan kekuasaan. Pers harus tunduk dibawah rezim Orde Baru dan menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang diinginkan oleh rezim. Masyarakat digiring dan dicekoki dengan berita-berita satu arah yang harus diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak.

Peraturan mengenai pers juga diatur oleh rezim. Keberadaan pers menjadi penting dan kepinginan pers berada ditangan siapa yang berada dibalik pers itu sendiri. Pers di bawah Orde Baru memegang peran penting dalam pembentukan wacana Anti-Komunisme dengan menyebarkan propaganda kematian korban G30S yang bernada kekejaman dan mengandung unsur pornografi. Hegemoni melalui pers berlanjut pada hegemoni hukum.

Kekuasaan Orde Baru secara hukum dimulai sejak munculnya Kopkamtib yang dibentuk atas dasar dekrit presiden untuk melakukan tindakan keamanan nasional, hingga kemunculan Supersemar yang memperkuat kekuasaan Orde Baru untuk melengserkan kekuasaan Orde Lama sedikit demi sedikit beserta peraturan-peraturan yang menghancurkan musuh politiknya. Ketika mencapai pada hegemoni hukum, Orde baru mengesampingkan tragedi kemanusiaan yang seolah-olah terjadi karena konflik horizontal.

Pembunuhan massal tidak pernah diberitakan melalui pers maupun dalam sejarah. Pembantaian massal di Indonesia, disusul sejumlah peristiwa yang menyertainya sepanjang 1965-1966 merujuk pada keterkaitan erat peristiwa dengan propaganda. Mutilasi para jendral yang dituduhkan pada gerwani adalah rekayasa yang 'membuktikan' sekaligus memelihara dongeng kejahatan komunis. Selain itu, peristiwa 1965-1966 telah menghancurkan kehidupan jutaan orang yang secara resmi mendapat stigma karena keterkaitan keluarga atau lainnya dengan mereka yang dibunuh atau ditahan secara sewenang-wenang. Bukan orang-orang yang bersangkutan atau mempunyai masalah politik besar yang menerina akibatnya, melainkan rakyat yang tak berdosa dan tak ada urusan sama sekali dengan G30S.

Kekerasan massal yang dilakukan seolah-olah menjadi hal yang biasa dan bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat. Kekerasan massal seolah-olah terjadi secara horizontal, tetapi dibalik itu terdapat peran militer dalam memfasilitasi keberlangsungan kejadian tersebut. Tidak sampai di sini saja,

setelah terjadi kekerasan massal dan penahanan, orang-orang yang dianggap terlibat G30S masih harus menanggung stigma dari masyarakat.

Moral memainkan peran yang penting dalam melakukan hegemoni. Moral bagaikan mata rantai yang tak terpisahkan. Jika seorang anggota keluarga mendapatkan moral yang buruk maka keluarga yang lain juga ikut menjadi korban. Moral sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi patokan nilai baik dan buruk seseorang dalam masyarakat, ternyata moral tak luput dimainkan oleh rezim sebagai suatu alat legitimasi sesuai dengan kepentingan rezim. Hegemoni semakin kuat setelah munculnya propaganda dan hukum terlebih dahulu sebagai legitimasi. Sehingga moral menjadi pelengkap yang kuat dalam menyempurnakan hegemoni. Moral tersebut tidak lepas dari narasi yang disebarluaskan oleh rezim.

Sejarah atau narasi yang berkembang semasa Orde Baru hanyalah narasi resmi. Narasi resmi ini berpuluh-puluh tahun bercokol di kepala masyarakat dan menjadi turun-temurun antar generasi.. Narasi-narasi resmi ini diterapkan dalam film, diorama, monumen, dan sebagainya dalam praktik penyebarluasannya. Tentunya sangat sulit untuk mencari fakta yang sebenarnya ketika rezim ini masih berdiri dan juga narasi tandingan tidaklah cukup kuat untuk melawan narasi resmi pada waktu itu.

Tokoh aku mendapat kesadaran bahwa selama ini orang-orang telah salah memandang peristiwa pencidukan dan sejarah yang dipelajari di dalam kelas. Ternyata sejarah yang dibacanya banyak memuat kebohongan. Tokoh aku belajar dari klip-kliping kakanya yang selalu dia baca sampai ketika ia berada di dalam penjara. Selain itu tokoh aku belajar atas pengalaman-pengalaman

menyeramkan yang dia alami, serta cerita-cerita dari para mantan tapol yang mendapat siksaan, pengasingan, dan perampasan hak hidupnya.

Seno Gumira Ajidarma menyelipkan fakta-fakta kedalam cerita dalam novel surealisme ini. Novel ini memberikan sudut pandang sejarah dengan versi yang berbeda. Novel ini membeberkan fakta-fakta yang tidak pernah ditemukan dan ditulis dalam sejarah formal. Penggunaan klipng koran, gambar, dan lirik lagu memperkuat penceritaan, memuat fakta-fakta, serta menjadi nilai tawar dalam novel ini.

5.2 Saran

Bagi para peneliti selanjutnya agar fokus pada satu aspek dalam Novel , misalnya membahas mengenai aspek hukum. Perlu adanya kajian-kajian lebih lanjut mengenai peristiwa tragedi 1965 yang terdapat dalam novel-novel Indonesia. Selain itu masih dalam lingkup penelitian yang sama, peneliti selanjutnya bisa mengkaji melalui sosiologi sastra yang berfokus pada pembaca, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan efek dari hegemoni Orde Baru yang masih tersisa. Membuka ladang bagi penelitian Linguistik terfokus pada analisis wacana (*Discourse*) terhadap koran-koran berita tahun 1965. Semoga penelitian ini berguna bagi para peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidarma, Seno Gumira. 2006. *Kalatidha*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ajidarma, Seno Gumira. 1997. *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara*. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Caldwell, M & Utrecht, E., 2011, *Sejarah Alternatif Indonesia*, Terjemahan Indonesia, Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Djaman Baroe, Yogyakarta.
- Faruk. 2014. *Pengantar Sosiologi Sastra dari strukturalisme genetik samapai Post-modernisme*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Hendarto, Heru, 1993. “Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci”, dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Tim Redaksi Driyarkoro. Jakarta Gramedia.
- Herlambang, Wijaya. 2013. *Kekerasan Pasca 1965*. Tangerang: Marjin Kiri
- Hill, David T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- IPT1965 Foundation. 2017. *Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965*. Bandung: Ultimus
- Kurniawan dkk, *Pengakuan Algojo 1965*. Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965, Jakarta: Tempo Publishing, 2013.
- Latif Yudi dan Idi Subandi Ibrahim (ed.) . 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung. Mizan.
- Ling, Tan Swie. 2010. *G30S 1965 Perang Dingin & Kehancuran Nasionalisme: Pemikiran Cina Jelata Korban Orba*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Nurudin. 2002. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ong, H.H. 2015. *Aku dalam Pusaran Sejarah Negeriku: Proklamasi kemerdekaan sampai G30S 1965*. Bandung: Ultimus
- Parlindungan, Utan. 2014. *Mitos Genjer-Genjer: Politik Makna dalam Lagu*. Jogjakarta: UGM
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 1999. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

- Ratna, Nyoman Kutha. 2013. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Robinson, Geoffrey B. 2018. *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*. Depok: Komunitas Bambu
- Roosa, John. 2018. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September & Kudeta merangkak Soeharto*. Temanggung: Kendi
- Sastropetro, Santoso. 1990. *Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta
- Sulami. 1999. *Perempuan-Kebenaran dan Penjara*, Jakarta: Yayasan Cipta Lestari
- Setiawan, Hesri. 2003. *Kamus Gestok*. Yogyakarta: Galang Press
- _____. 2015. *Memoar Pulau Buru I*. Jakarta: Kelompok Populer Gramedia (KPG).
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Southwood, Julie & Patrick Flanagan. 2013. *Teror Orde Baru: Penyelewengan Hukum & Propaganda*. Depok: Komunitas Bambu.
- Tornquist, Olle. 2017. *Penghancuran PKI*. Depok: Komunitas Bambu
- Wardaya, Baskara T. 2007. *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Yogyakarta: Galang Press
- Wilson. 2015. *Soekarno, Komunis, dan Fasis Orba*. Malang: Kelompok Intrans Publishing
- Yusuf, Ahmad Mukhlis. 2008. *Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita I (1965-1967)*. Jakarta: Antara Pustaka Utama

SINOPSIS

Seorang pengusaha fiktif telah tertangkap dan dijebloskan kedalam tahanan. Hari-harinya diisi dengan membaca klipng koran milik kakaknya yang hilang dalam gelombang pencidukan 1965-1966. Kliping-kliping koran membawanya kembali pada ingatan-ingatan peristiwa yang dialaminya: melihat langsung peristiwa pencidukan yang terjadi dalam kelas, pembakaran rumah oleh warga yang dituduh sebagai PKI, hingga dirinya yang mendapat masalah karena menggambar Palu-Arit dalam kelas.

Kejadian-kejadian tersebut mebuatnya memiliki ikatan batin terhadap tahanan politik yang dianggap terlibat dalam G30S, yang diantaranya, seorang pasukan Cakrabirawa, dan seorang anggota HSI. Selama ia menampung mereka, tokoh aku mendapat kisah-kisah tragis selama sampai setelah keluar tahanan.

Ingatannya yang lain membawanya kepada pembakaran rumah beserta satu keluarga di dalamnya. Tokoh aku mendapati dua orang saudara kembar yang tinggal di sana. Pada akhirnya salah satu ikut mati terbakar dan hidup abadi dalam dunia kabut, dan yang lain selamat dan menjadi seorang wanita gila. Tokoh wanita gila dirasuki oleh kemberannya yang telah mati melakukan aksi balas dendam terhadap orang-orang yang memerkosanya ketika berada dalam rumah sakit jiwa, hingga membunuh orang-orang yang akhirnya diketahui turut ikut serta dalam melakukan pencidukan 1965-1966.

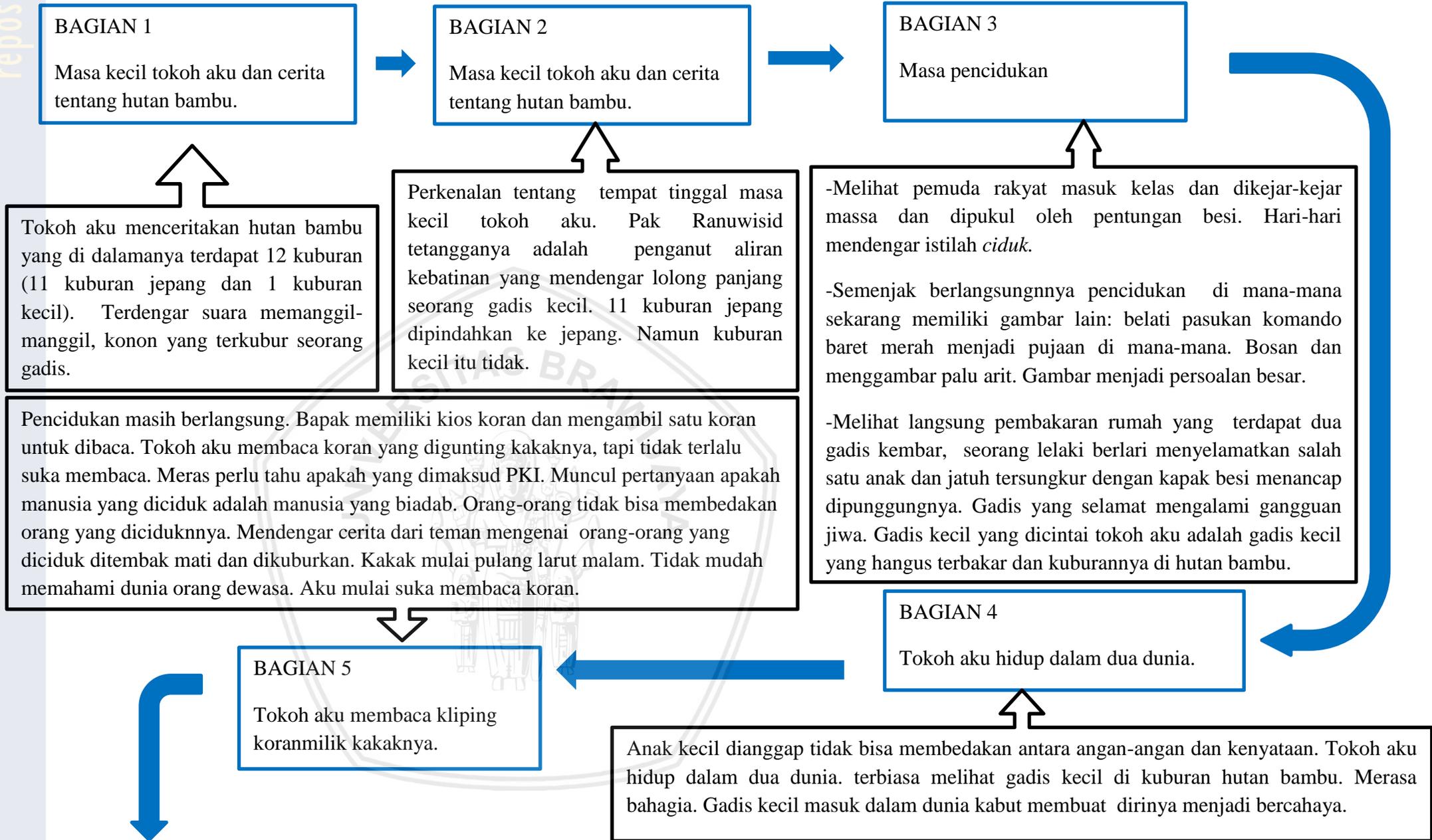
“Berapa lama kami semua menjadi buta dalam memandang orang yang dicituk? Berapa lama kami semua, anak-anak kecil yang tidak dididik di sekolah dengan semestinya mengira betapa orang-orang yang dicituk memang pantas dicituk? Berap lama kami semua mendapatkan pelajaran sejarah yang ternyata kini hanya bisa dibaca sebagai pelajaran cara berbohong?” pungkas tokoh aku yang pada akhirnya juga menjadi gila.

Lampiran

Alur Cerita Novel Kalatidha karya Seno Gumira Ajidarma

Keterangan → : Alur maju

→ : Alur mundur



BAGIAN 6

Tokoh aku mendengar cerita tentang gadis gila

Nasib kedua gadis berbeda . cerita tentang gadis gila yang diasuh orang kampung, kemudian diserahkan ke panti asuhan, tapi kemudian sering menghilang dan menggelandang. Tidak ada saudara yang mengakuinya karena kemungkinan akan mendapat resiko yang sama. Tumbuh menjadi wanita yang terganggu jiwanya Tanah tempat bekas dia tinggal diambil alih oleh seorang purnawirawan militer dan sering mondar-mandir di depan rumahnya. Dibawa ke rumah sakit jiwa setelah itu diperkosa oleh dokter sekaligus petugas-petugas yang membersihkannya.

BAGIAN 7

Tokoh aku masuk dalam dunia kabut

Tokoh aku seperti pejalan olak-alik, tokoh aku dan kedua gadis kembar sama-sama tumbuh menjadi remaja. Melihat dunia kabut.. Perumpaan seperti ratu lautan yang begitu rapuh sekaligus berkuasa. Mengada selama dipuja dan lenyap dengan sekedar melupakannya. Tokoh wanita diburu oleh ratu cahaya.

BAGIAN 8A

Tokoh aku mendatangi pelepasan tapol

karena memiliki ikatan batin atas kejadian yang dilihatnya.

BAGIAN 8B

Tokoh aku mendapat cerita dari tapol

Seorang anggota cakrabirawa dituduh terlibat dengan Gestapu karena kenal dengan untung dan mengalami penyiksaan selama dalam tahanan.. Melakukan perlawanan kaarena melihat seorang gerwani yang sedang hamil disiksa dengan memasukkan bayonet kedalam kelaminnya hingga berdarah. Seorang anggota HSI sepulang dari luar negeri ditangkap. Istrinya meninggalkan dan mengganti namanya dan memiliki keluarga baru akhirnya diketahui tinggal serumah dengan istri dan suami barunya. Bagaikan Rajapati seekor makhluk purba yang haus darah dimana pulau jawa menjadi kubangan darah menjelma menjadi ratusan manusia untuk menculik penghuninya lantas membunuhnya dan memasukkannya dua puluh orang setiap lubang.

Sesama penghuni tidak ada yang menyentuhnya kecuali si Joni gila. Joni suka memukul dan menendang-nendang. Joni si malin kundang karena disuatu pagi ia membunuh bapaknya sendiri. Ketika joni gila telah pergi maka sipir sampai dokter bergantian memperkosa gadis gila. Saudara kembar perempuan itu selalu berada di dekatnya. Jeritan entah dari mana datangnya menenmbus segala dunia. Perasaan yang sangat sedih.

BAGIAN 10

Wanita gila bertemu dengan Joni Gila di RSJ

Seorang pengusaha tambang dan ekspor timah fiktif dan berhasil mendapatkan dana yang besar. Kemampuan kibulnya berakhir, dia hanyalah satu saja dari komplotan para pengibul. Pengibul terbesar adalah Dimas mendirikan perusahaan dengan usaha fiktif, ajukan kredit yang akan dibayar dengan kredit, tak satupun aliran dana menunjukkan perannya sebagai dalang. Melibatkan petugas bank dan nama-nama penting dalam struktur pemerintahan negeri melalui Ardi seorang yang flamboyan. cerita keberuntungan pengibul berbalik. Mereka tak terlacak karena tokoh aku dan perusahaan fiktifnya hanya untuk melindungi nama ardi dan Dimas. Tokoh aku tidak mengetahui langsung mengenai Ardi dan Dimas. Berkat kemampuannya tokoh aku memberikan nama Ardi dan Dimas. Mendengar bisikan dari dunia yang lain. Semakin banyak yang terjaring termasuk sejumlah pejabat bank. Dipenjara tokoh aku dihajar oleh preman-preman bayaran dari dimas. Dan mempertemukannya kepada gadis gila ketika berada di rumah sakit.

BAGIAN 9

Tokoh aku menceritakan dirinya sebagai pengusaha fiktif dan masuk penjara

BAGIAN 11

Catatan yang ditulis oleh Joni gila

BAGIAN 12

Tokoh aku masuk dunia cahaya dan melihat perburuan tokoh kembaran wanita gila oleh penguasa cahaya

BAGIAN 13

Tokoh aku masuk rumah sakit polisi dan melihat wanita gila dirasuki kembarannya membunuh pemerkosa

Tokoh aku berada dalam rumah sakit polisi melihat gadis gila dirasuki oleh kembarannya menjelama sebagai pendekar dengan senjata dan kekuatan. Melakukan balas dendam dengan membunuh orang yang telah memperkosa saudar kembarannya. Joni si maling kundang dituduh pertama kali dan ditahan diduga sebagai pembunuh. Mayat mayat dibuat menyerupai karya seni.

BAGIAN 15B

Cerita tentang pembakaran

BAGIAN 15A

Joni menjadi tersangka tanpa bukti. Wanita gila yang dirasuki membalas dendam

BAGIAN 14B

Tokoh aku menceritakan tentang kakaknya

BAGIAN 14A

Di Penjara tokoh aku membaca kliping koran

Seorang telah melakukan fitnah terhadap ayahnya menuduhnya sebagai Lekra dan mengajari lagu genjer-genjer. Korban berjatuh dan terhubung bahwa korban sama-sama pernah memimpin pencidukan dari rumah antara tahun 1965-1969. Mereka bukan politikus, aktivis, bahkan juga bukan ipatisan lawan PKI, melainkan sekedar orang-orang yang hanya bisa mendapatkan kesenangan dalam penderitaan orang lain. seananya situasi politik berbalik, mereka juga berada dibarisan terdepan dalam perusakan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan dan pembunuhan. Mendatangi seorang kakek beranak bercucu limabelas yang akuh tidak membunuhnya tapi kakek menjawab bukan padanya dia bertanggungjawab.

Tokoh aku meraga sukma dan melihat pembalasan dendam oleh gadis gila terhadap orang yang memperkosa tidaklah cukup. Dalam tubuh saudara kembarannya dia buru setiap orang yang dianggap bertanggungjawab atas nasib malang saudara kembarannya dan itu dimulai dengan adegan pembakaran rumah.

Menceritakan tentang kakak aku. Yang dikira sebagai seorang Gerwani padahal bukan. Ia memiliki pacar seorang PKI. Bersahabat dengan semua orang. Dikenala sangat kritis. Yakin bukan lawan debatannya yang menculiknya. Mungkin lazim terjadi pada kakak perempuannya. Ingat bagaimana menandai berita akan diguntingnya. Kakanya berpesan bahwa Jangan melupakan sejarah. Tokoh aku ingin tahu kesalahan apa yang terjadi pada masa lalu. Dibebaskan dari kerja karena sakit.

Tenggelam dalam kliping kakaknya. 30 tahun sejak kakanya hilang.

BAGIAN 16

Tokoh aku masuk dalam dunia cahaya (kabut)

BAGIAN 17

Catatan joni gila (2)

BAGIAN 18

Di dalam penjara tokoh aku membaca klipng koran lagi

BAGIAN 19

Pertanyaan tokoh aku tentang tuhan. Melihat wanita menyelamatkan anak-anak yang hampir ditelan ombak.

Melihat perbedaan yang kontras antara di bumi dan dubia cahaya. Muncul sosok kristal tak bisa dibedakan jenis kelamin, tanpa mata, tanpa bibir, tanpa telinga tanpa kulit daging. Diri yang berpikir tanpa otakmembatin tanpa naluri. Segala begitu sama serupa. Manusi a mengaku-aku miliknya, atas nama sebagai pemilik, dibagi-bagi. Undang-undang haruslah indah karena undang-undang haruslah merupakan penipuan paling indah seindah-indah penipuan, tanpa undang-undang tiada negara dan tanpa negara peluang untuk menguasai akan sangat membuang tenaga.

Catatan joni gila 2. Dengan tulisan waras-ketidakwarasan menceritakan dia bertemu dengan gadis itu dan mengatakanna memang tak bersalah. Mengungkap bahwa dia membalaskan dendam ibunya karena bapaknya yang membunuhnya.

Lagi-lagi membaca koran. Sejarah sengaja dicatat untuk diingat. Tak tahan membaca penulisan yang buruk. Menyampaikan berita tentang para pemimpin yang seperti selalu mengajak rakyatnya berperang. → 40 thn lebih skrg. Berita tentang mahasiswi yang regu penganiyaya calon korban G30S. berapa lama kami semua menjadi buta memandng orang yang dicituk. Mendapat pelajaran sejarah yng ternyata kini hanya bisa dibaca sebagai pelajaran cara berbohong. Berita tentang tanda tangan men-pangdad yang dipalsu.

Kembali pada dirinya sendiri bersama kabut yang turun perlahan. masa kecil aku dengan ketapel sedang memburu wirog. Pak ranuswid tersenyum seperti biasa dan tertawa terbahak-bahak seperti mengerti isi pikiran tokoh aku. Gadis kecil membawanya masuk dalam kabut berpendar menjelma dunia cahaya.

Dalam penjara mendapat cerita dari teman masa kecil tentang bulduser menyapu habis hutan bambu. Semuanya tertegun mendengar mesin menderum-derum. Kan tidak ada berita apapun sebelumnya bahwa akan ada penggusuran. Buldoser tidak bisa meratakan gundukan berbatu nisan. Dibekas hutan bambu dibangun sebuah mall. Rumah penduduk memang sama sekali tidak digusur. Rupanya tanah yang rata itu sudah digali sedimikian rupanya. Sehingga gundukan itu ikut terpindahkan entah kemana. Tetapi cerita tutur masih berlanjut. Gadis kecil itu menampakkan diri kepada beberapa orang di sana sambil menggendong kucing.

BAGIAN 21

Di dalam penjara tokoh aku mendengar kabar tentang buldoser yang meratakan hutan bambu untuk dibuat mall

BAGIAN 20B

Masa kecil tokoh aku ketika berburu wirog (tikus) di hutan bambu

BAGIAN 20A
Tokoh aku masuk dalam dunia cahaya (kabut)



BAGIAN 22

Tokoh aku kehilangan dunia kabut bersama hilangnya hutan bambu dan segala isinya

Hilangnya hutan bambu berarti juga hilangnya dunia berkabut milik tokoh aku. Tokoh aku merasa benar-benar terpenjara. Membuatnya harus bertahan dengan dunia yang menghidupi tubuhnya. Dimas akhirnya dihukum 15 tahun penjara.. tokoh aku mulai dianggap tidak waras.

BAGIAN 23

Catatan Joni gila (3)

BAGIAN 24

Tokoh aku membaca koran lagi di penjara dan joni gila ternyata adalah keponakan tokoh aku

-Karena tidak ada lagi keluarga yang masih hidup semenjak gelombang pencidukan tahun 1965-1966, setelah dilacak dan ditelusuri ternyata tinggal tokoh aku yang masih bisa dianggap keluarga dan karena itu berhak mendapat warisan setelah dia meninggal.

-Mengingat pada masa bangku sekolah dirinya dan kawan-kawannya dilatih menyanyikan lagu nasakom bersatu. Ternyata berbalik menggulung para penganjurnya. Tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka yang harus mengalami pengasingan masyarakat sebagai anak PKI. Pengasingan yang sungguh tidak adil, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan keberadaannya diburu seperti anjing.

-Keberadaan koran sebagai media menjadi milik siapa yang memanfaatkannya dan terbayang kepentingan yang didalamnya.

BAGIAN 25

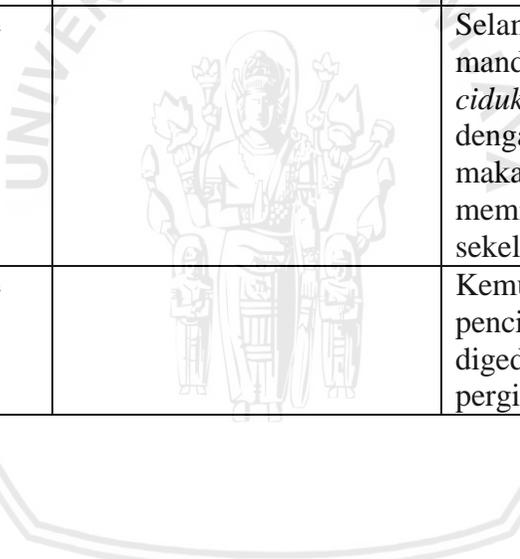
Tokoh aku sering melamun

Kalatidha. Tokoh aku sudah tidak peduli kenapa dipenjara. Menanyakan diri sendiri tentang pengalaman yang dialaminya. Apakah benar-benar terjadi.

LAMPIRAN

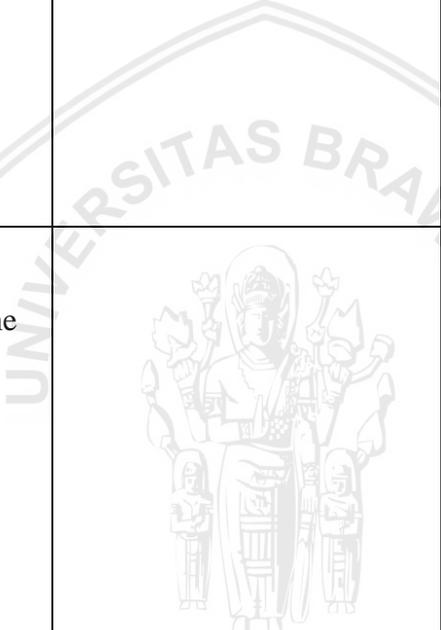
LAMPIRAN 1. KODE DAN DATA

1. BAHASA

No	Aspek	Subaspek	Indikator	Data	Kodifikasi
1.	Bahasa	Eufimisme Bahasa	Deskripsi/istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana bahasa yang mendapat penghalusan dari maksud aslinya	Hari-hari itu memang aku banyak mendengar kosa kata baru . mungkin lebih tepat kosa kata lama yang mendapatkan makna baru, seperti misalnya kata <i>ciduk</i> .	K/HGM/B/EF/1/20
2	Bahasa	Eufimisme Bahasa		Selama ini kata itu ku kenal dalam hubungannya dengan mandi, bahwa kalau mandi kita memakai gayung atau <i>ciduk</i> , dan kalau mengambil air kita <i>menciduk</i> ; juga dengan hubungannya dengan makan, bahwa di meja makan kita <i>menciduk</i> sayur dan mangkok besar dan memindahkannya ke piring. Suatu hari tetanggaku sekeluarga menghilang dan katanya mereka dicituk.	K/HGM/B/EF/2/21
3	Bahasa	Eufimisme Bahasa		Kemudian sangat sering kudengarkan cerita tentang pencidukan ini. Mereka yang sedang tidur pintu rumahnya digedor antara dua atau tiga pagi, dan begitu saja dibawa pergi entah ke mana—kini aku percaya jika dikatakan	K/HGM/B/EF/3/21

				mereka dibunuh, tetapi waktu itu sebagai anak kecil aku mendapat pengetahuan yang sangat terbatas mengenai apa yang terjadi. Hanya dikatakan mereka dituduk.	
4.	Bahasa	Eufimisme Bahasa		Hampir semua cerita tentang pencidukan hanya kudengar. Namun satu hari kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Pencidukan pada siang hari bolong, yang sangat tidak mirip dengan pencidukan sama sekali.	K/HGM/B/EF/ 4/24
5.	Bahasa	Pengubahan Ejaan	Deskripsi/istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana bahasa yang menyatakan adanya dampak perubahan ejaan	Meskipun keinginanku untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa itu besar, aku tak tahan membaca cara penulisan yang buruk. Barangkali seleraku terlanjur dibentuk oleh buku-buku bacaan yang baru kusadari belakangan ditulis dengan sangat bagus.	K/HGM/B/EY/ 1/153
6.	Bahasa	Pengubahan Ejaan		Hari masih pagi, tapi kepalaku sudah pusing. Kurasa para pembaca koran masa itu lebih menderita dari pada aku, karena mereka terpaksa membaca berita –berita semacam itu tiap hari. Koran-koran itu menyampaikan berita tentang para pemimpin yang seperti selalu mengajak rakyatnya berperang.	K/HGM/B/EY/ 6/155
7.	Bahasa	Wacana Anti- Komunisme	Deskripsi/istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana bahasa untuk menarasikan keburukan Komunis	Senjata gelap masih berada ditangan Gestapu Sehubungan dengan itu Bridgen Amir Machmud menjdelaskan bahwa beberapa ratus sendjata gelap masih berada di tangan Gestapu. Tokoh tokoh mereka masih ada jang dapat menjelinap masuk dalam organisasi2 lain dan sementara ini mereka ini luput dari pencedjaran...	K/HGM/B/AK /1/37
8.	Bahasa	Wacana Anti-		ANGKATAN BERSENJATA SISA2 GESTAPU	K/HGM/B/AK /2/37

		Komunisme		MERUPAKAN BAHAJA Masih punja senjata gelap & ada tokoh2 yang luput & merembes ke dalam organisasi2 lain. Djakarta, 19 April (AB) Pangdam V/Djaya Bridgen TNI Amir Machmud menjatakan bahwa sekalipun tubuh bangsa Indonesia masih terasa adanja luka2 sebagai akibat petualangan kontrev/Gestapu/PKI...	
9.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		Hari senin siang perwira2 TNI angkatan Darat dari 17 Kodam setelah Ziarah dalam rangka penutupan rapat kerdja Logistik Angkatan Darat 1966 di Djakarta telah menindjau dan menjaksikan dari dekat sumur maut Lubang Buaja, bahwa tempat penganiajaan 7 Pahlawan revolusi korban "Gestapu/PKI"	K/HGM/B/AK /3/40
10.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		Bridgen, Hartono Ass IV Men/Pangdad selaku ketua rombongan antara lain dalam kata pendjelasannya mengatakan bahwa almarhum Djendral A. Yani beserta 6 Orang Pahlawan revolusi lainnja sebelum dimasukkan kedalam sumur tsb. Lebih dulu disiksa dan dibunuh setjara kedjam oleh manusia2 biadab Gestapu/PKI	K/HGM/B/AK /4/40
11.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		KOMPAS Antara Tugas dan Tjinta Jogjakarta (Antara) MARSIJATIN, gadis djelita mahasiswa IKIP Jogja jang diperiksa Pepekuper Kulonprogo karena terlibat "G30S" mengakui bahwa dia termasuk regu penganiaja tjalon korban "G30S". Ia didjadikan honorarium, tiap djiwa jang	K/HGM/B/AK /5/156

				<p>dibunuh berupa uang sebanyak Rp 1 djuta dari Aidit melalui tokoh PKI setempat.</p> <p>Gadis djelita itu telah berhasil menipu seorang anggota ABRI setempat, sehingga dikawin oleh anggota ABRI itu. Setelah disinjalin Masijatin termasuk "G30S", maka dengan kesadaran yang mendalam dan karena terdjebak penipuan gadis itu, sang suami segera menjerahkan M kepada jang berwadajib</p>	
12.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		<p>Pengurus pusat PMKRI, sehubungan dengan keputusan Penguas Perang Daerah Djakarta Raya, Maj.Djen. Umar Wirahadikusumah tentang pembekuan semua aktivitas orpol/ormas dalam "GESTAPU" jaitu PKI, PR, BTI, GERWANI, PERHIMI, IPPI, CGMI, LEKRA, HIS berpendapat bahwa keputusan tsb., memang merupakan suatu keputusan patriotik, jang harus disambut dengan peningkatan pengganjangan terhadap "GESTAPU" disegala bidang.</p>	K/HGM/B/AK /6/214
13.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		<p>KOMPAS</p> <p>Subronto K. Atmodjo Masih berkeliaran</p> <p>Djakarta, 25 Sept (kompas)</p> <p>Pengikut Lekra Gestapu/PKI Subronto K. Atmodjo sampai kini ternjata masih berkeliaran di Tebet dengan bebasnja. Subronto K. Atmodjo dan isterinja adalah aktivitas Lekra dan Gerwani jang sangat giat dalam</p>	K/HGM/B/AK /7/210

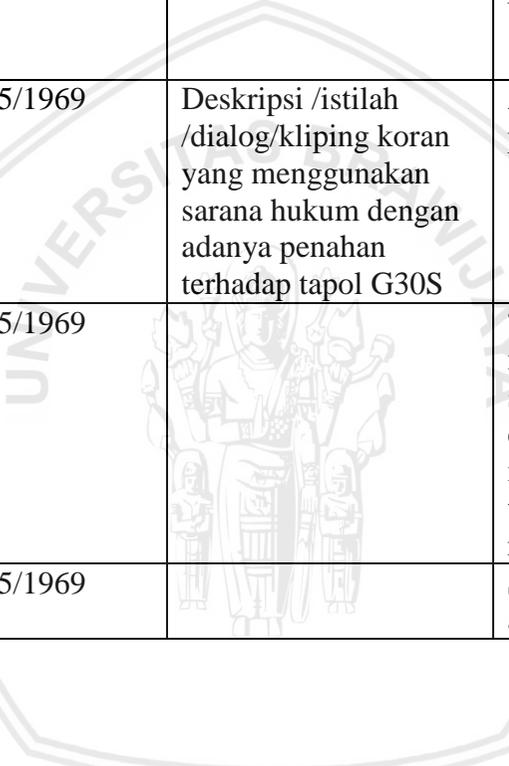
				<p>“Gerakan 30 September” (G30S) bahkan isterinja Nj. Titi Subronto turut aktif mengatur dan melaksanakan persiapan2 pengchianatan berdarah PKI di lubang Buaja. Subronto K. Atmodjo adalah pengarang lagu “Nasakom Bersatu” dan Resopim</p> <p>Sumber KNI menjatakan keduanya nampak aktif melakukan “Gerpoleksos” di Djakarta akchir2 ini.</p>	
14.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		<p>Pengurus Pusat PMKRI menuntut agar PPI, PPSMI, SOBSI dan baperki segera dibubarkan, karena berdasarkan fakta2 jang ada djelas sekali bahwa organisasi2 tsb, telah setjara aktip membantu gerakan kontra revolusi 30 September.</p> <p>Pengurus Pusat PMKRI menegaskan bahwa adalah suatu konsekuensi revolusioner apabila demonstrasi2 dan massa aksi jg dilantjarkan rakjat Indonesia pada dewasa ini merupakan pukulan jang djitu terhadap kaum kontra revolusi 30 September dan madjikan2nya PKI serta ormas2nja.</p>	K/HGM/B/AK/8/214
15.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		<p>Dilantjarkannya demonstrasi2 dan massa aksi tsb, menundjukkan tidak tertahankannya lagi kemarahan rakjat Indonesia terhadap PKI dan antek2nja, ajang telah mengadakan kudeta dan terror terhadap pemerintahan republik Indonesia jang dipimpin PJM Presiden Pemimpin Besar Revolusi Pangti ABRI Bung Karno.</p>	K/HGM/B/AK/9/214
16.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		<p>Peristiwa ini bukan jang pertama kali dan terakhir, tetapi bahkan merupakan titik tolak daripada peledakan perlawanan jang akan lebih gigih dan lebih luas dari rakjat indonesia terhadap kaum kontra revolusi dimasa datang</p>	K/HGM/B/AK/10/214

				dan sekaligus merupakan dorongan yang kuat untuk menegakkan pantjasila, mengorbankan semangat memenangkan Dwikora.	
17.	Bahasa	Wacana Anti-Komunisme		Ditegaskan juga bahwa kalau sekarang massa rakjat Indonesia yang progresip revolusioner marah kepada PKI dan ormas2nya , hal ini memang wajar dan dapat dimengerti sepenuhnya oleh setiap yang pantjasilais dan Manipolis sedjati. Kemarahan massa rakjat itu adalah juga merupakan manifestasi daripada hebatnya kejakinan mereka akan kebenaran doktrin revolusi yang tegas nekolim, anti kaum konta revolusioner dari manapun datangnja.	K/HGM/B/AK /11 /215
18.		Wacana Anti-Komunisme		Kepada semua Orpol/oramas Progresip revolusioner diseluruh tanah air pengurus pusat PMKRI menjerukan agar terus menerus meningkatkan pengganjangan terhadap "GESTAPU" dan antek2nja diamanapun mereka berada dan supaja dalam melaksanakan tugas revolusi ini supaja didjaga sampai terdjadi penjelewengan yang dapat memperlemah potensi perdjjuangan seluruhnja. (hlm 215)	K/HGM/B/AK /12/215

2. HUKUM

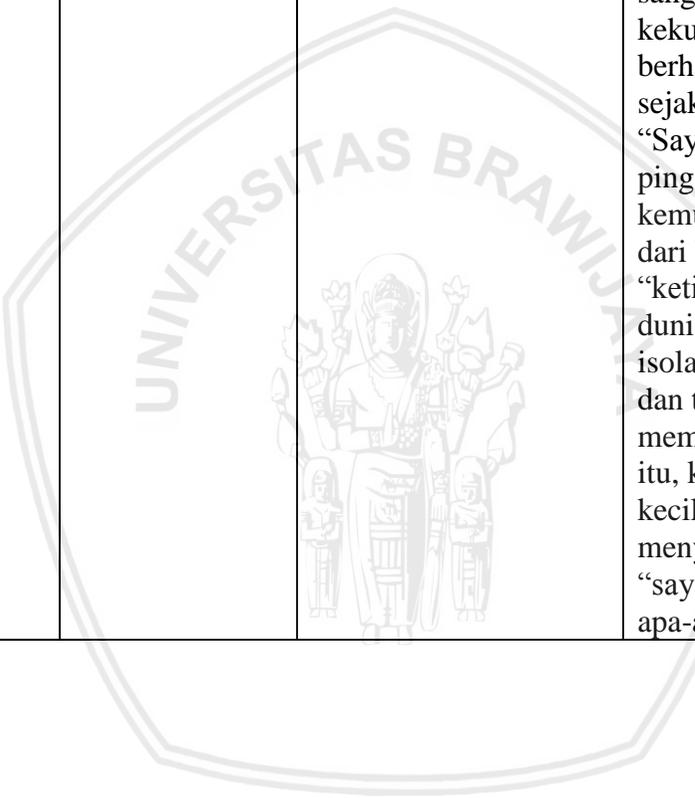
No	Aspek	Subaspek	Indikator	Data	Kodifikasi
1.	Hukum	KOBKAMTIB	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya keterlibatan KOBKAMTIB	Kemudian sangat sering kudengar cerita tentang pencidukan ini. Mereka yang sedang tidur pintu rumahnya digedor antara pukul dua atau tiga pagi, dan begitu saja dibawa pergi entah kemana—kini aku percaya jika dikatakan mereka dibunuh, tetapi waktu itu sebagai anak kecil aku mendapat pengetahuan yang sangat terbatas mengenai apa yang terjadi. Hanya dikatakan mereka diciduk.	K/HGM/H/KOB /1/21
2.	Hukum	KOBKAMTIB		Aku masih berdiri di atas meja ketika kulihat orang yang malang itu dilempar ke atas truk di depan gerbang sekolah. Di atas truk itu sudah terdapat sejumlah orang, lelaki maupun perempuan—rupanya sekarang orang tidak menciduk pada malam hari, pikirku. Aku terlalu jauh dari truk di luar gerbang sekolah itu untuk bisa mengamati wajah-wajah mereka, jadi sampai hari ini aku hanya teringat wajah orang yang masuk lewat jendela ke dalam kelasku itu saja. Apakah yang dikatakan oleh wajahnya? Aku tidak merasa mampu merumuskannya.	K/HGM/H/KOB /2/21
3.	Hukum	KOBKAMTIB		Jadi siapa yang membiarkan segala pencidukan itu berlangsung? Dari teman-teman sepermainannku kudengar cerita tentang hutan jati di luar kota tempat orang-orang yang diciduk itu ditembak mati dan dikuburkan. “Banyak orang dibunuh di sana” aku teringat temanku berbisik-bisik dalam kelas, “termasuk bapaknya si itu”	K/HGM/H/KOB /3/43

				Ia menunjuk bangku di depanku yang belakangan selalu kosong.	
6.	Hukum	KOBKAMTIB		Aku telah berjalan dari dunia ke dunia dan kutahu betapa suatu ketika Pulau Jawa berubah menjadi kubangan darah. Di antara semua dunia tidak ada yang lebih menjijikkan daripada sebuah dunia di mana perempuan-perempuan hamil dibelah perutnya, ditusuk kemaluannya, dibelah sampai ke dada, dipotong payudaranya, diambil janinnya untuk dicacah-cacah, dan akhirnya kepala mereka dipenggal pula. Kepala mereka ditancapkan ke ujung bambu dan dipatok berjajar di tepi jalan. Suami-suami mereka dikebiri dan alat-alat vitalnya digantung di pos-pos jaga dari mana segala marabahaya mengancam umat manusia yang celaka.	K/HGM/H/KOB /4/66-67
7.	Hukum	KOBKAMTIB		Rembulan adalah mata malam yang menjadi saksi pembantaian. Orang-orang diikat tangannya kebelakang, didorong sampai tersimpuh di depan lubang, sekali retak nyawa melayang sekaligus badan masuk kuburan. Dua puluh sampai dua puluh lima orang akan terkubur di satu lubang, lantas di atasnya akan ditanam pohon pisang.	K/HGM/H/KOB /5/67
8.	Hukum	KOBKAMTIB		Kebun pisang, kebun karet, dan kebun kopi menjadi arena pembantaian tempat bakat-bakat para penjagal disalurkan. Para penjagal yang kelak kuharap mendapat balasan, tersiksa oleh ketakutan dan mimpi-mimpi mengerikan sepanjang zaman, karena jika tidak apakah memang ada yang disebut keadilan?	K/HGM/H/KOB /6/68
9.	Hukum	KOBKAMTIB		Kakak perempuanku memang menghilang. Kata orang dia gerwani. Padahal dia bukan Gerwani. Meski memang benar dia pernah mempunyai kekasih seorang anggota PKI.	K/HGM/H/KOB /7/113-114

				Memang benar pula dia mempunyai teman dan sering berdiskusi dengan orang-orang Gerwani maupun PKI—tentu benar pula jika ia dengan sendirinya pernah mampir ke kantor organisasi atau tempat pertemuan Gerwani atau PKI.	
10.	Hukum	KOBKAMTIB		Namun peristiwa yang dialami kakakku lazim terjadi saat itu. Hilang lenyap tanpa berita—dan sama sekali tidak perlu kesalahan untuk itu. Seperi tidak ada satu pun keluarga yang tidak kehilangan anggota keluarganya. Bangsa ini telah membantai dirinya sendiri.	K/HGM/H/KOB/8/114
11.	Hukum	KOBKAMTIB		“toh mereka, seperti korban-korban yang dicituk, juga tidak pernah ditangkap dan diadili”	K/HGM/H/KOB/9/130
12.	Hukum	UU 5/1969	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya penahan terhadap tapol G30S	Aku yang sengaja datang ke stasiun untuk menyaksikan pelepasan para tahanan politik mendatangi mereka	K/HGM/H/UU/1/61
13.	Hukum	UU 5/1969		“Saya tidak tahu apa-apa sebenarnya soal gestapu. Saya memang anggota cakrabirawa dan kenal untung—tapi apa salahnya kalau kenal untung?” hampir setiap hari sebelum diberangkatkan ke pulau buru saya disiksa dan disuruh mengakui. Saya tidak tahu harus mengakui apa dan kalau pun tahu kenapa saya harus mengakui? Katanya saya mengakui rencana penculikan para jendral.	K/HGM/H/UU/2/62
14.	Hukum	UU 5/1969		Saya dianggap gembong. Padahal sungguh mati tidak tahu apa-apa. Hanya karena kenal baik dengan Untung. Para	K/HGM/H/UU/3/64

				interogator tidak pernah mau peduli bahwa kenal Untung itu berarti tahu seluruh rencananya pada malam 30 September 1965. Saya memang seorang komandan, dalam setiap tingkatan saya menjadi komandan, tapi saya ini hanya korban—tanpa seorang pun yang barangkali sungguh-sungguh berniat mengorbankan saya...”	
15.	Hukum	UU 5/1969		Saya salah satu pengurus Himpunan Sarjana Indonesia. Saya ditahan setelah kembali ke luar negeri. Ditangkap begitu saja, sesuai paspor dicap petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air.	K/HGM/H/UU/4/64
16.	Hukum	UU 5/1969		petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air. Namun diri saya tidak penting, kisah saya tidak akan hebat dari semua kawan yang ditangkap tanpa kesalahan yang jelas. Diadili saja tidak pernah.	K/HGM/H/UU/5/64
17.	Hukum	UU 5/1969		Pramudya Ananta toer sastrawan yang terkenal dengan “Keluarga Gerilja” dan terkenal pula sebagai tokoh Lekra telah disergap oleh rakjat di rumahnja dan kemudian diserahkan kepada alat2 Negara jang lantas membawanya ke kodan V Djaya.	K/HGM/H/UU/6/121
18.	Hukum	UU 5/1969		Sumber jang dihubungi “kompas” hari kamis membenarkan adanya rentjana Pemerintah untuk menempatkan sebagian dari tahanan Gestapu/PKI dikepulauan Maluku Untuk rentjana tsb, sedang diadakan survey oleh team khusus untuk meninjau kemungkinan2 dimanfaatkannja para tahanan Gestapu/PKI ini bagi usaha pembangunan Negara.	K/HGM/H/UU/7/122
19.	Hukum	UU 5/1969		Diperoleh keteranagn bahwa pada tahap pertama Pemerintah bermaksud untuk menempatkan sekitar 10.000 orang tahanan di beberapa pulau di Maluku. Dengan bantuan anak organisasi	K/HGM/H/UU/8/122-123

				PBB, UNDP (United Nations Development Program) mereka akan dipekerdjakan diprojek2 pembangunan sehingga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mereka sudah akan dapat self-supporting dalam kenutuhan hidup sehari2. Besarnya Bantuan UNDP baru akan ditentukan setelah survei selesai.	
20.	Hukum	UU 5/1969		“Saya salah satu pengurus Himpunan Sarjana Indonesia. Saya ditahan setelah kembali dari luar negeri. Ditangkap begitu saja, sesuai paspor dicap petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air. Sya keluar negeri mewakili organisasi, tapi dalam seminar saya bicara dengan semangat mewakili Indonesia. Saya seorang nasionalis dan setelah kembali dikatakan mengkhianati negeri sendiri . Namun diri saya tidak penting, kisah saya tidak akan lebih hebat dari semua kawan yang ditangkap tanpa salah yang jelas. Diadili saja tidak pernah.	/ K/HGM/H/UU/ 9/64
21.	Hukum	UU 5/1969		“Mereka tidak pernah berhasil membuat saya mengaku ataupun pura-pura mengaku. Dua sampai empat orang setiap hari menyiksa sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Suatu kali masing-masing sepasang tangan dan kaki saya ditindih empat kaki meja, dengan empat orang dewasa duduk onggang-onggang di atasnya. Saya tetap tidak bisa mengakui ataupun pura-pura mengaku. Dari saat ke saat saya berjuang mengatasi penderitaan. Usaha bertahan dan rasa sakit menantang kemampuan saya. Dalam kesatuan saya, pasukan pengawal istana, saya termasuk orang pilihan. Sayalah yang harus selalu mempertontonkan kemahiran , bagaiman empat pisan yang diujungnya dijepit lima jari saya	K/HGM/H/UU/ 10/62-63

			 <p>bisa menancap pada sasaran dalam sekali lemparan. Tapi tangan itu kini ditindih meja dengan empat serdadu pengecut di atasnya. Saya juga tentara, tapi saya tidak akan pernah menyiksa.</p> <p>“karena segala siksaan takkan bisa membuka mulut saya bayangkan ada. Saya masih ditindih ketika pengecut lain datang membawa seorang tawanan wanita. Ia sedang hamil dan katanya ia Gerwani. Saya harus melihat bagaimana ia ditelanjangi dari kakinya dibuka paksa, agar sangkur pada bayonet bisa dimasukkan ke kemaluannya. Saya lihat sangkur itu sudah berdarah ketika darah saya naik dan suatu kekuatan luar biasa mendadak merasuki saya, meja itu berhasil saya balik dan menyungkurkan empat pengecut yang sejak tadi onggang-oggang sambil tertawa-tawa.</p> <p>“Saya berdiri dan meninuju pemegang bayonet itu sampai pingsan. Wanita malang itu sudah sejak tadi pingsan. Saya kemudian taktahu apa yang terjadi karena sebuah pentungan dari belakang juga membuat saya pingsan...</p> <p>“ketika mata saya terbuka, kepala saya sangat pening dan dunia terasa gelap. Ternyata saya dijebloskan ke dalam sel isolasi. Setelah beberapa saat saya terbiasa dengan kegelapan dan ternyata ada lubang kecil yang bukan hanya akan memberi cahaya. Selama sebulan saya disekap di sel isolasi itu, kadang diberi makan kadang tidak, tetapi dari lubang kecil itulah kawan-kawan sesama tahanan bisa menyelundupkan makanan.</p> <p>“saya dianggap gembong. Padahal sungguh mati tidak tahu apa-apa. Hanya karena kenal baik dengan untung. Para</p>	
--	--	--	---	--

				interogator tidak pernah mau peduli bahwa kenal Untung tidak berarti tahu seluruh rencananya pada malam 30 September 1965 itu. Saya memang seorang komandan , dalam setiap tingkatan saya menjadi komandan, tetapi saya ini hanya korban –tanpa seorang pun yang barngkali sungguh-sungguh berniat mengorbankan saya....”	
22.	Hukum	TAP MPRS XXV tahun 1966	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya dampak penggunaan Tap MPRS XXV 1966	wilayah Indonesia serta pelarangan setiap kegiatan untuk menjebarkan atau mengembangkan Sidang paripurna MPRS kemaren dengan aklamai telah menerima perumusan ketetapan MPRS yang dihasilkan oleh komisi C tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan dijatakn sebagai organisasi terlarang diseluruh paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme diseluruh wilayah Indonesia.	K/HGM/H/TAP /1/116
23.	Hukum	TAP MPRS XXV tahun 1966		Dalam ketetapan ini dikatakan menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Pangti ABRI berupa pembubaran PKI termasuk semua bagian organisasinja dari tingkat pusat samapai kedaerah beserta semua organisasi jang berlindung dibawahnja, yang telah dikeluarkan tanggal 12 Maret Jl.	K/HGM/H/TAP /2/116-117
24.	Hukum	TAP MPRS XXV tahun 1966		Pengurus pusat PMKRI, sehubungan dengan keputusan Penguas Perang Daerah Djakarta Raya, Maj.Djen. Umar Wirahadikusumah tentang pembekuan semua aktivitas orpol/ormas dalam “GESTAPU” jaitu PKI, PR, BTI, GERWANI, PERHIMI, IPPI, CGMI, LEKRA, HIS berpendapat bahwa keputusan tsb., memang merupakan suatu keputusan patriotik, jang harus disambut dengan peningkatan pengganjangan terhadap “GESTAPU” disegala	K/HGM/H/TAP /3/214

				bidang.	
25.	Hukum	TAP MPRS XXV tahun 1966		<p>Pengurus Pusat PMKRI menuntut agar PPI, PPSMI, SOBSI dan baperki segera dibubarkan, karena berdasarkan fakta2 jang ada djelas sekali bahwa organisasi2 tsb, telah setjara aktip membantu gerakan kontra revolusi 30 September.</p> <p>Pengurus Pusat PMKRI menegaskan bahwa adalah suatu konsekuensi revolusioner apabila demonstrasi2 dan massa aksi jg dilantjarkan rakjat Indonesia pada dewasa ini merupakan pukulan jang djitu terhadap kaum kontra revolusi 30 September dan madjikan2nya PKI serta ormas2nja. (KHH/3/214)</p>	K/HGM/H/TAP/4/214
26.	Hukum	SUPERSEMAR	<p>Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana hukum dengan adanya dampak penggunaan Supersemar</p>	<p>Ban & J.M.D mulai sinting? Djakarta, 27 april (AB) Bekas Waperdam DR. Subandriyono dan bekas Menteri Jusuf MD dan berapa bekas menteri lainja, ketjuali Ir. Surrachman dan Achadi jang belum tertangkap, telah dilakukan pemeriksaan jang teliti oleh team-pemeriksa dari ke-4 angkatan.</p> <p>Keadaan “djiwa” Subandriyono dan Jusuf MD sangat “berlainan”, mungkin karena pelajan2 “istimewanja” tidak berad disampingnja.</p> <p>Sebagai reaksi dari “kechawatiran” sementara pemimpin2 terhadap oknum2 pedjabat jang tersangkut dalam G-30-S oleh Djendral Sujipto SH dikatakan, bahwa ABRI tidak akan membuat “Lubang Buaja ke-II” sebab ABRI berpegang pada adjaran2 Pantjasila.</p>	K/HGM/H/SS/1/43
27.	Hukum	SUPERSEMAR		<p>ANGKATAN BERSENDJATA DEWI MEMBANTAH</p>	K/HGM/H/SS/2/116

				Berhubungan dengan dimuatnja foto saja pada mingguan Angkatan Bersendjata tgl 10 April halaman satu, dengan tulisan di bawahnja Djuga simpanan JMD entah jg dirumahnjalah JMD didjemput Alat Negara dan diketemui uang tunai Rp. 2000,- (ub). Diatas foto tsb. Ditulis nama saja Dewi Roelyanti, maka dengan ini saja mengatakan bantahan dengan keras dan mohon agar di ralat.	
28.	Hukum	SUPERSEMAR		Baru kusadari sekarang apa maksudnya kata “singkirkan” dalam syair lagu itu, yang ternyata berbalik menggulung para penganjurnya bagaikan air bah tak terbendung lagi.	K/HGM/H/SS /3/211

3. MORAL

No	Aspek	Subaspek	Indikator	Data	Kodifikasi
1.	Moral	Perorangan	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana Moral terhadap seseorang yang dianggap PKI	“Bohong, tentu karena bukan orang jepang, kan? Meski tidak ada keluarganya kan boleh saja dipindah ke pemakaman umum?” “bapak tidak bohong, malah dia pesan agar dibawakan mainan. Tapi bapak nggak ngerti, mainan seperti apa yang dia mau” ...”kasihan juga pikirku”	K/HGM/M/MP/ 1/12
2.	Moral	Perorangan		Empat manusia yang telah diciduk empat belas tahun. Mereka saling berpandangan. Tidak seorang pun sanak saudara menjemput mereka.	K/HGM/M/MP/ 2/61

3.	Moral	Perorangan		Barangkali semenjak usia enam tahun di kelas satu sekolah dasar kawan-kawannya membicarakan dalam kerumunan dari jauh	K/HGM/M/MP/ 3/157
4.	Moral	Perorangan		Apakah yang akan dialami seorang yang seolah-olah akan hidup terus dengan gambar palu arit di jidatnya? Berita itu ku baca dari koran tanggal 9 bulan Desember 1965. Dia akan berusia 40 tahun lebih sekarang. (hlm	K/HGM/M/MP/ 4/157
5.	Moral	Perorangan		Kemungkinan apa sajakah yang terjadi selama itu? Telah kuceritakan kepadamu tentang apa yang kualami setelah menggambar palu arit karena meniru gambar peranko itu— apakah yang akan dialami seseorang yang seolah-olah akan hidup terus dengan gambar palu arit dijidatnya?	K/HGM/M/MP/ 5/157
6.	Moral	Perorangan		Barangkali ia akan tertunduk dengan sedih. Hampir saja ia percaya selama ini bahwa cukup dengan menjadi anggota PKI seorang terjamin masuk neraka.	K/HGM/M/MP/ 6/158
7.	Moral	Perorangan		Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka yang harus mengalami pengasingan masyarakat sebagai anak PKI. Pengasingan yang sungguh-sungguh tidak adil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.	K/HGM/M/MP/ 7/212
8.	Moral	Keluarga	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana Moral terhadap keluarga yang dianggap PKI	Wajah teman-temanku sama ganasnya dengan orang-orang yang memburu orang sampai masuk kelas waktu itu. “bapakmu PKI ,ya?” “Bapakmu PKI?” “kamu PKI?” Memang sudah sering kudengar istilah PKI waktu itu. Suatu hari ada seorang anak yang tak pernah datang lagi ke sekolah dan penjelasan yang ku dengar hanyalah, “Bapaknya	K/HGM/M/MK /1/24

				PKI,”Namun aku sungguh tidak tahu apa hubungan gambar palu arit itu dengan PKI.	
9.	Moral	Keluarga		Dengan tewasnya kedua orangtua dan kembarannya, sementara segenap dokumen terbakar bersama rumahnya, tiada sanak saudara yang mana pun kemungkinan besar takut mengaku sebagai sanak saudara keluarga itu—keluarga yang rumahnya dikepung orang banyak sembari berteriak “ganyang!” bukanlah jenis keluarga yang mudah diakui sebagai sanak keluarga tanpa resiko diperlakukan sama.	K/HGM/M/MK/ 2/46
10.	Moral	Keluarga		“yang ingin saya ceritakan adalah istri saya. Istri saya yang cantik dan sangat saya cintai. Semenjak saya ditangkap ia langsung menyapkan diri, menyapkan identitasnya sebagai istri saya. Dari jakarta ia kembali ke kampung halamannya Kalimantan ia mengganti namanya. Tidak memberitahukan keberadaan saya kepada anak saya yang masih terlalu kecil. Putus- Hubungan sama sekali. Semua ini saya dengar dari keluarganya yang pernah menengok saya sebelum diberangkakan di pulau buru. Kemudian bahkan ia menikah lagi. Saya tidak menyalahkan orang menjadi takut , sampai mengganti nama sendiri, tapi dengan begitu saya menjadi kagum dengan istri-istri lain. Yang tabah menanti tanpa kepastian dalam waktu yang begitu panjang. Sekarang saya hanya ingin berjumpa dengan anak saya. Sisa hidup saya jalani tanpa cita-ita yang berlebihan. Saya telah menjadi tumbal zaman agar lakon dunia bisa berjalan. Saya tidak pasrah tapi juga tidak mempunyai banyak harapan. Bisa bertemu dengan anak saya adalah satu-satunya keinginan” Kemudian aku tahu dia bisa ketemu puteranya, yang setelah	K/HGM/M/MK/ 3/65

				<p>berusia 16 tahun baru tahu bahwa dia mempunyai ayah lain. Ibunya tidak pernah bercerita sama sekali tentang keberadaan ayahnya itu. Ketika ayah dan ibunya kemudian bertemu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan—ibunya sudah terlanjur menjadi istri orang lain yang masih hidup, cerita semacam ini pernah kudengar dari orang lain, bahwa istri yang ditinggal telah menikah lagi, tetapi karena tiada tempat lain untuk bernaung sepulang dari Pulau Buru, maka sang tahanan politik terpaksa ditampung di bekas rumahnya sendiri itu, meski suami baru itu tinggal di rumah itu juga.</p> <p>Tidak adakah cerita yang lebih indah, meski masa-masa pencidukan sudah lama berlalu?</p>	
11.	Moral	Keluarga		<p>Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka yang harus mengalami pengasingan masyarakat sebagai anak PKI. Pengasingan yang sungguh-sungguh tidak adil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.</p>	K/HGM/M/MK/ 4/212
12.	Moral	Masyarakat	<p>Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana Moral terhadap Masyarakat yang melakukan kekerasan massal</p>	<p>Nafasnya memburu, tubuhnya berkeringat, dan ia sudah terpojok. Orang-orang yang memburu masuk kelas membawa pentungan, golok, dan celurit.</p>	K/HGM/M/MM /1/19
13.	Moral	Masyarakat		<p>Pak guru belum sempat melakukan sesuatu ketika dari jendela dan pintu muncul pula orang-orang memburu lelaki yang melompati jendela itu..Hei pemuda Rakyat! Menyerahlah! Orang itu meludah dan memaki. Para pemburu serempak maju dan meringkusnya, seperti kambing yang</p>	K/HGM/M/MM /2/19-20

				menancapkan kakinya menolak untuk disembelih. Salah seorang memukul kepalanya dengan pentungan besi. Ia angung pingsan dengan darah mengalir di wajahnya.	
14.	Moral	Masyarakat		Kejadian itu berlangsung cepat. Murid-murid ternganga. Pak Guru juga hanya bisa ternganga. Di luar kelas rupanya sudah banyak sekali orang masuk ke halaman sekolah. Mereka berteriak-teriak dan memaki-maki. Segala kata yang tabu diucapkan di rumah dan di sekolah kami dengar semua hari itu. Semuanya kata-kata yang menindas dan kejam. Hari ini kami melihat dan mendengar segala sesuatu yang tidak pernah dibenarkan. Kami melihat betapa seseorang bisa dikutuk dan dihakimi begitu rupa.	K/HGM/M/MM /3/20
15.	Moral	Masyarakat		Hampir semua cerita tentang pencidukan kudengar. Namun suatu hari kusaksikan dengan mata kepala sendiri pencidukan pada siang bolong , yang tidak mirip denan pencidukan sama sekali. Pulang sekolah kulihat orang-orang mengepung rumah yang terbakar. Orang-orang berteriak “PKI! Keluar!”...	K/HGM/M/MM /5/24
16.	Moral	Masyarakat		Seseorang telah berkemat-kamit sejenak melompat pagar dan berusaha masuk, saat itu dari dalam rumah muncul seorang lelaki menggandeng gadis kecil...namun sebelummencapai tempatku ia sudah jatuh menggelosor. Ia meluncur tengkurap di atas tanah dan berhenti tepat didepanku. Dipunggungnya terdapat sebilah kapak. Menancap erat menembus daging mematahkan tulang. Tetapi ia tidak mati.	K/HGM/M/MM /6/25
17	Moral	Masyarakat		Di depan rumah yang terbakar kulihat gadis kecil itu terisak-isak. Lelaki yang jatuh dengan kapak menembus punggung itu	K/HGM/M/MM

				bukan ayahnya. Berarti yang masih berada di dalam rumah adalah ayah, ibu, dan saudata kembar gadis kecil itu. Api berkobar menghabiskan rumah.	/7/26
--	--	--	--	--	-------

4. SIMBOL

No	Aspek	Subaspek	Indikator	Data	Kodifikasi
1.	Simbol	Berhubungan dengan PKI	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana objek, simbol, yang berkaitan dengan PKI	Namun semenjak berlangsung pencidukan di mana-mana, sekarang kami mempunyai gambar lain; itulah simbol bergambar belati pasukan komando baret merah yang menjadi pujaan dimana-mana. Setelah beberapa bulan aku pun bosan dan suatu kali menggambar yang lain: yakni lambang palu arit	K/HGM/S/HR/1/22
2.	Simbol	Berhubungan dengan PKI		<p>“kamu lihat gambar seperti ini dari mana?”</p> <p>“Perangko”</p> <p>“Ya perangko CCCP, pak “</p> <p>“CCCP? Apa itu?”</p> <p>“Perangko soviet pak”</p> <p>...</p>	K/HGM/S/HR/2/23
3.	Simbol	Berhubungan dengan PKI		<p>Bagaimanakah orang banyak bisa berkumpul di depan rumah yang kemudian akan dibakar itu? Seseorang telah melakukan fitnah kepada ayahnya, yang sehari-harinya hidup mengajar anak-anak bermain musik.</p> <p>“Dia anggota Lekra dan dia mengajar anak-anak menyanyikan lagu genjer-genjer”</p>	K/HGM/S/HR/3/126

4.	Simbol	Pengkultusan	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana objek, simbol, yang dikultuskan (baik/buruk)	Padahal di dalam hutan bambu itu hanya terdapat kuburan .ada dua belas kuburan di sana, sebelas kuburan tentara jepang dan satu kuburan anak kecil yang bisa diduga dari ukurannya yang juga kecil.	K/HGM/S/PK/1 /3-4
5.	Simbol	Pengkultusan		Inilah kuburan tanpa peziarah seolah-olah memang sudah tak terhubung lagi dengan dunia ini. Dunia orang hidup dan dunia orang mati, mungkinkah dihubungkan oleh kuburan? Meski terbedakan dalam kerimbunan semak-semak di hutan bambu selusin kuburan itu tetap saja tampak tidak terawat dan tidak terurus—hanya gundukan dan pembatas batu yang membuatnya tampak seperti kuburan. Sebelas kuburan hanya gundukan berbatas batu tetapi yang keduabelas adalah sebuah nisan. Tiada nama tiada tanggal tiada tanda apa pun yang bisa memberi sekadar dugaan atas keberadaan nisan itu selain ukuran yang menandakan seorang anaklah yang termakamkan dalam kuburan—barangkali seorang anak kecil perempuan.	K/HGM/S/PK/2 /7
6.	Simbol	Pengkultusan		Tidak jelas benar bagaimana bisa diketahui bahwa yang terkubur adalah seorang anak perempuan, selain pengetahuan penduduk sekitar dari sumber yang tidak jelas bahwa konon yang terkubur di dalam tanah adalah seorang anak perempuan.	K/HGM/S/PK/3 /7
7.	Simbol	Pengkultusan		Air empang itu begitu keruh dan karena itu menjadi jarang dijamah, tidak aneh jika kemudian disebut sebagai tempat yang angker.	K/HGM/S/PK /4/11
8.	Simbol	Pengkultusan		Kata Pak Ranuwisid, ia sering mendengar lolong panjang seorang gadis kecil, yang sepertinya minta diberikan sesuatu dari balik tempat yang disebut angker itu.	K/HGM/S/PK/5 /11

9.	Simbol	Pengkultusan		Lurah pondok Gede Lubang Buaja dengan didampingi oleh Tjamat serta Kodim setempat a.l. menjelaskan dihadapan para perwira bahwa pada suat malam dari dalam sumur maut jang berukuran dalam 12 mtr, dan lebar 75 cm itu telah keluar sinar tjahaja terang selama satu jam.	K/HGM/S/PK/6 /41
10.	Simbol	Pengkultusan		Menurut Bridgen Hartono, sumur maut tsb, kini telah dipagari dan diberi atap. Rumah2 sekitarnya, bekas tempat penjempanan djendral2 sebelum dibunuh, tetap dirawat sebagai mana adnja untuk dijadikan pengisi monumen, sedang 7 buah durian jang kedapatan pada sebuah pohon durian jang tumbuh di samping sumur maut itu, kini telah diawetkan di lembaga pertanian bogor.	K/HGM/S/PK/7 /41
11.	Simbol	Pengkultusan		Berita ini kubaca samapai habis. Lucu sih, Ada durian di awetkan segala, Rugi dong. Padahal ada tujuh buah! Mengapa tidak dimakan saja? Hehe. Aku pikir agak keterlaluhan kalau tujuh durian itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali para korban.	K/HGM/S/PK/8 /41
12.	Simbol	Monumen	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana monumen untuk melegitimasi kekuasaan	Menurut Bridgen Hartono, sumur maut tsb, kini telah dipagari dan diberi atap. Rumah2 sekitarnya, bekas tempat penjempanan djendral2 sebelum dibunuh, tetap dirawat sebagai mana adnja untuk dijadikan pengisi monumen, sedang 7 buah durian jang kedapatan pada sebuah pohon durian jang tumbuh di samping sumur maut itu, kini telah diawetkan di lembaga pertanian bogor.	K/HGM/S/MN/ 1/41
13.	Simbol	Monumen		Dalam waktu singkat sumur maut itu serta tanah daerah lubang buaya di Pondok Gede dekat lapangan terbang Halim Perdanakusuma itu akan dibeli oleh Angkatan Darat untuk dijadikan daerah Monumen TNI Angkatan Darat.	K/HGM/S/MN/ 2/41

14.	Simbol	Sekolah	Deskripsi /istilah /dialog/kliping koran yang menggunakan sarana objek, simbol, yang disampaikan melalui Sekolah	Berapa lama kami menjadi buta dalam memandang orang-orang yang diciduk? Berapa lama kami semua, anak-anak kecil yang tidak terdidik di sekolah dengan mestinya mengira berapa orang-orang yang diciduk memang pantas diciduk? Berapa lama kami semua mendapatkan pelajaran sejarah yang ternyata kini hanya bisa dibaca sebagai pelajaran cara berbohong? Aku masih saja membaca.	K/HGM/S/SK/1 /159
-----	--------	---------	--	---	----------------------



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Nurul Firdaus
2. NIM : 125110700111035
3. Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Topik Skripsi : Sastra
5. Judul Skripsi : Sejarah Hegemoni Orde Baru dalam Novel Kalatidha Karya Seno Gumira Ajidarma
6. Tanggal Mengajukan Skripsi : 20 Juni 2017
7. Tanggal Selesai Revisi : 9 Juli 2019
8. Nama Pembimbing : Bapak Nanang Bustanul Fauzi, S.S, M.Pd.

Keterangan Konsultasi *)

No.	Tanggal	Materi	Paraf
1.	Selasa, 20 Juni 2017	Pengajuan Judul Skripsi	
2.	Selasa, 27 Juni 2017	Persetujuan Judul Skripsi	
3.	Senin, 3 Juli 2017	Proposal : Konsultasi 1	
4.	Selasa, 11 Juli 2017	Proposal : Konsultasi 2	
5.	Kamis, 3 Agustus 2017	Konsultasi 3 : Latar Belakang	
6.	Senin, 11 September 2017	Konsultasi 4 : BAB I	
7.	Senin, 18 September 2017	Konsultasi 5 : BAB I dan BAB II	
8.	Selasa, 26 September 2017	Konsultasi 6 : BAB II	
9.	Rabu, 4 Oktober 2017	Konsultasi 7 : BAB III	
10.	Selasa, 10 Oktober 2017	Konsultasi 8 : ACC Sempro	
11.	Selasa, 9 Februari 2018	Konsultasi 9 : Konsultasi Data	
12.	Senin, 19 Februari 2018	Konsultasi 9 : Konsultasi Data	

13.	Selasa, 17 April 2018	Konsultasi 10 : Konsultasi Data	l
14.	Rabu, 20 Februari 2019	Konsultasi 11 : BAB IV	l
15.	Rabu, 20 Maret 2019	Konsultasi 12 : BAB IV	l
16.	Rabu, 27 Maret 2019	Konsultasi 13 : BAB IV	l
17.	Kamis, 1 April 2019	Konsultasi 14 : ACC Semhas	l
18.	Kamis, 16 Mei 2019	Konsultasi 15 : Konsultasi Revisi Semhas	l
19.	Selasa, 22 Juni 2019	Konsultasi 16 : Konsultasi Revisi Semhas	l
20.	Kamis, 24 Juni 2019	Konsultasi 17 : ACC Ujian Skripsi	l
21.	Selasa, 10 Juli 2019	ACC Jilid Skripsi	l

9. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai

A

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa
Fakultas Ilmu Budaya

Malang, 11 Juli 2019
Dosen Pembimbing



(Dr. Sony Sukmawan, M.Pd.)

NIP. 19770719 200604 1 001



(Nanang Bustanul Fauzi, S.S., M.Pd)

NIP. 19850511 200812 1 003

Curricukum Vitae

Nama Lengkap : Nurul Firdaus

Nama Panggilan : Daus

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Oktober 1993

Alamat Asal : Perum Bukit Karang Jl. Intani,
blok A no.3 , Kec. Semanding,
Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur

Nomor *Handphone* : 081235702879

Alamat *Email* : dauslawas@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN Latsari 2 Tuban (2000-2006)

SMPN 3 Tuban (2006-2009)

SMA N 1 Tuban (2009-2012)

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Universitas Brawijaya Malang (2012-2019)

Motto : Lakukan yang terbaik!

